

# WORKSHOP

HASIL KEGIATAN NFP FACILITY FAO

REGIONAL MALUKU DAN MALUKU UTARA

# PROSIDING



AMBOI, 08 NOVEMBER 2008

W O R K S H O P  
HASIL KEGIATAN NFP FACILITY FAO  
REGIONAL MALUKU DAN MALUKU UTARA

P r o s i d i n g  
Ambon, 08 November 2008

© 2008 oleh Fakultas Pertanian Unpatti  
Publikasi Tahun 2008  
Dicetak oleh Aman Jaya, Ambon.

Cover Design : Ir. R. Loppies, MScF & Irwanto, S.Hut.MP

Layout : Irwanto, S.Hut, MP & Ir. R. Loppies, MScF

ISBN : 978 - 602 - 8403 - 00 - 9

Diterbitkan oleh :



**BADAN PENERBIT FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS PATTIMURA  
(BFPF - UNPATTI)**

Kotak Pos 95 Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka -Ambon 97233  
Telp (0911) 322499, Fax (0911) 322498, Email : bfpf\_unpatti@yahoo.co.id

Dengan dukungan dana dari :



National Forestry Programme (NFP)



Food and Agriculture Organization (FAO)



Fakultas Pertanian Universitas Pattimura



## FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON

# Pengantar

Hutan memiliki kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan manusia, karena hutan memiliki manfaat langsung berupa sumber pendapatan, sumber papan, sumber pangan, sumber protein, sumber bahan obat-obatan, sumber energi bahan bakar dan sumber oksigen yang sangat diperlukan manusia. Selain itu hutan juga memiliki manfaat tidak langsung, yaitu sebagai pengatur sistem tata air bumi, penyerap CO<sub>2</sub>, stabilisator iklim regional, memperbaiki kesuburan tanah, tempat hidup berbagai satwa, tempat rekreasi dan lain-lain.

Maluku saat ini memiliki luas hutan kira-kira 5.4 juta hektar dengan taksiran laju kerusakan sebesar 2 - 3 % per tahun. Kontribusi utama kerusakan ini adalah legal dan illegal logging, perladangan berpindah, kebakaran hutan serta konversi lahan untuk pertanian dan perkebunan.

Pemerintah telah berupaya untuk membangun kembali hutan yang rusak melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) yang sudah berjalan sejak tahun 2005. Melalui GNRHL, laju aktivitas rehabilitasi hutan dan lahan di Maluku ditaksir sebesar kira-kira 1.000 - 3.000 hektar per tahun.

Berdasarkan data citra terdapat kira-kira 1.2 juta hektar lahan kritis di Maluku. Ini berarti proyek GNRHL baru mampu merehabilitasi hutan di Maluku sebesar 1 % selama 3 tahun terakhir. Jika dalam 3 tahun hanya 1 % luas lahan yang direhabilitasi berarti diperlukan lebih dari 100 tahun untuk merehabilitasi 1,2 juta hektar lahan kritis di Maluku. Jika demikian diperlukan upaya-upaya lain agar laju rehabilitasi hutan dan lahan di Maluku dapat ditingkatkan luasannya pada setiap tahun, misalnya dengan mencari donatur dari dalam dan luar negeri.

National Forestry Programme Facility (NFP-Facility) adalah sebuah lembaga dibawah FAO (Food and Agriculture Organization). Fungsi utama lembaga ini adalah membantu melakukan fasilitasi proses-proses pembangunan kehutanan nasional diseluruh dunia. Di Indonesia NFP Facility telah berproses sejak tahun 2000, tetapi di Maluku dan Maluku Utara sebagai satu wilayah pengembangan menurut pengelompokan NFP-Facility, baru dimulai sejak tahun 2006 dengan Fakultas Pertanian Unpatti sebagai Local partner.

Selanjutnya pada Juli 2006 NFP Facility membantu Maluku dan Maluku Utara melalui sebuah workshop untuk menentukan arah program bantuan NFP Facility bagi pembangunan Kehutanan di Maluku dan Maluku Utara untuk tahun anggaran 2007/2008.

## PROSIDING

"WORKSHOP HASIL KEGIATAN NFP FACILITY FAO REGIONAL MALUKU DAN MALUKU UTARA"

Sebagai tindak lanjut implementasi workshop Juli 2006, disetujui 6 kegiatan NFP Facility di Maluku dengan para pelaksana adalah Yayasan Inlulins di Kabupaten Maluku Tenggara, Yayasan Toma Lestari, Yayasan Hualopu dan Lembaga Kewang Haruku di Kabupaten Maluku Tengah, Yayasan Titamae dan Kelompok Studi Uwen di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kemudian ke 6 NGO dan CBO ini telah melakukan kegiatannya sejak Pebruari 2008 dan berdasarkan monitoring dan evaluasi, mereka telah selesai melakukan aktivitas kerja di lapangan sesuai kontrak kerja yang disepakati. Karena itu pada workshop ini mereka akan menyampaikan hasil-hasil kegiatan mereka dan harapan saya agar melalui workshop ini ada usul dan saran-saran perbaikan guna penyempurnaan kegiatan NFP Facility pada tahun yang akan datang.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan berbagai hal terkait suksesnya kegiatan ini. Kepada para pelaksana kegiatan NFP Facility yang telah menyajikan hasil kegiatannya, saya menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas kerjasama baik yang ditunjukkan selama ini.

Akhirnya semoga hasil workshop ini membawa manfaat bagi pembangunan hutan dan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara ke depan. Sekian dan terima kasih.

Ambon, 08 November 2008

Dekan,



Ir. Maris E. Th. Hetharia, MA  
NIP. 131 535 615

# Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Ringkasan Eksekutif	vi
1. Yayasan Hualopu : Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Manajemen Hutan Berkelanjutan Di Pulau Nusalaut	1
2. Yayasan Inlulins : Pengetahuan Tradisional Dalam Manajemen Hutan Berkelanjutan Untuk Penyediaan Air di Pulau Kei Kecil	26
3. Kelompok Studi Desa Uwen : Penguatan Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Desa Uwen dan Sekitarnya. Kecamatan Taniwel	48
4. Kewang Negeri Haruku : Program Penguatan Kapasitas Dan Pendidikan Lingkungan Untuk Komunitas Di Negeri Haruku	62
5. Yayasan Titamae : Model Rehabilitasi Lahan Kritis Dengan Pola Agroforestry Di Dusun Sokowati, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat	71
6. Yayasan Toma Lestari : Perbaikan Sistem Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Pendekatan Zonafikasi Lahan di Horale.	77
7. Diskusi Makalah Stakeholder	90
8. Diskusi Manfaat dan Keberlanjutan Kegiatan NFP-FAO	94
9. Lampiran - Lampiran :	98
1. Daftar Peserta	98
2. Jadwal Workshop	100
3. Dokumentasi Kegiatan	101

## PROSIDING

# Ringkasan Eksekutif

## *WORKSHOP HASIL KEGIATAN NFP FACILITY FAO REGIONAL MALUKU DAN MALUKU UTARA*

**M**aluku dan Maluku Utara merupakan 2 provinsi di Indonesia bagian Timur yang tersusun dari banyak pulau kecil. Kedua provinsi ini memiliki laju kerusakan hutan 2 -3 % tiap tahun, disamping juga memiliki luas lahan kritis kira-kira 2 juta hektar. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem hutan pada pulau-pulau di Maluku dan Maluku Utara sangat peka terhadap perubahan lingkungan terutama akibat aktivitas manusia dan bencana alam. Selain itu kondisi masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar hutan pada umumnya adalah miskin dan memiliki rata-rata tingkat pendidikan yang rendah.

Selama ini pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di lain pihak pemerintah daerah Maluku maupun Maluku Utara hampir tidak pernah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun hutan. Pada hal hutan bagi Maluku dan Maluku Utara adalah sangat penting karena kedua provinsi ini merupakan wilayah yang mayoritas tersusun dari pulau-pulau kecil dengan resiko bencana alam yang sangat tinggi. Terkait dengan kondisi keuangan yang terbatas maka diperlukan terobosan-terobosan untuk memperoleh bantuan dana dari lembaga donor yang lain guna membangun hutan di kedua provinsi.

National Forestry Programme Facility (NFP-Facility) adalah sebuah lembaga dibawah FAO (Food and Agriculture Organization). Fungsi utama lembaga ini adalah membantu melakukan fasilitasi proses-proses pembangunan kehutanan nasional di seluruh dunia. Di Indonesia NFP Facility telah berproses sejak tahun 2000, tetapi di Maluku dan Maluku Utara baru dimulai sejak tahun 2006 dengan Fakultas Pertanian Unpatti sebagai Local partner. Pada Juli 2006 NFP Facility membantu Maluku dan Maluku Utara melalui sebuah workshop untuk menentukan arah program bantuan NFP Facility bagi pembangunan Kehutanan di Maluku dan Maluku Utara untuk tahun anggaran 2007/2008.

Tindak lanjut implementasi workshop Juli 2006, disetujui 6 kegiatan NFP Facility di Maluku dengan para pelaksana adalah Yayasan Inlulins di Kabupaten Maluku Tenggara, Yayasan Toma Lestari, Yayasan Hualopu dan Lembaga Kewang Haruku di Kabupaten Maluku Tengah, Yayasan Titamae dan Kelompok Studi Uwen di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Yayasan Hualopu mempunyai kegiatan terfokus pada peningkatan peran masyarakat dalam manajemen hutan berkelanjutan di Pulau Nusalaut. Tujuan kegiatannya adalah membangun kesepakatan-kesepakatan antar masyarakat tentang peruntukan lahan bagi kawasan perlindungan dan konservasi serta meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan kawasan perlindungan dan konservasi.

Yayasan Inlulins mengarahkan kegiatannya pada pengembangan pengetahuan tradisional dalam manajemen hutan berkelanjutan untuk penyediaan air di Pulau Kei Kecil. Tujuan dari pada kegiatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan-kemandirian dan kenyamanan masyarakat lokal, baik perempuan maupun lelaki pada kawasan

## PROSIDING

OHOIFUNWARMANEU (Ohoinol, Marfun, Warwut, Semawi, Letvuan, Evu) serta masyarakat Pulau Kei Kecil dan Dullah melalui manajemen hutan berkelanjutan bagi kelestarian tanah dan air berbasis pengetahuan tradisional.

Kelompok Studi Desa Uwen melalui NFP Facility diperoleh kegiatan terkait penguatan hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Desa Uwen dan sekitarnya, dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang unsur/kriteria masyarakat hukum adat di desa Uwen dan sekitarnya serta memperoleh kepastian batas kawasan / areal petuanan masyarakat adat.

Kewang Negeri Haruku mendapat bantuan kegiatan yang terarah pada penguatan kapasitas dan pendidikan lingkungan untuk komunitas di Negeri Haruku. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Yayasan Titamae memperoleh kegiatan yang terkait dengan pengembangan model rehabilitasi lahan kritis dengan pola agroforestry di Dusun Sokowati, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan lahan dengan pola agroforestry.

Yayasan Toma Lestari terkonsentrasi pada kegiatan perbaikan sistem pemanfaatan lahan berdasarkan pendekatan zonafikasi lahan di Desa Horale. Tujuan adalah untuk mengkaji bentuk pemanfaatan lahan berdasarkan pengetahuan lokal dan pengenalan model pendekatan zonafikasi lahan.

Workshop berlangsung di Manise Hotel Tanah Tinggi Ambon selama 1 hari dan dihadiri oleh 47 peserta yang berasal dari berbagai instansi terkait (Dinas Kehuatan Propinsi Maluku, Dinas Kehutanan Kota Ambon, Dinas Kehutanan Kapupaten Seram Bagian Barat, Dinas Kehutanan Kabupten Maluku Tengah, Taman Nasional Manusela, Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua, Balai pengelolaan DAS Waehapu-Batu Merah, Balai Konservasi Sumberdaya Alam, Bappeda Provinsi Maluku, Bappeda Kota Ambon, Bappedalda, Perguruan Tinggi dan NGO).

Metode workshop adalah seminar dan diskusi. 6 NGO dan CBO penerima bantuan dana NFP Facility melakukan penyajian makalah dalam bentuk seminar dan tanya jawab terkait permasalahan dari setiap aktivitas kerja di lapangan. Peserta kemudian memberi masukan-masukan dalam bentuk saran, komentar maupun tanya jawab. Selanjutnya dilakukan diskusi kelompok untuk membahas manfaat proses NFP Facility di Maluku dan Maluku Utara, serta arah kegiatan NFP Facility untuk progarm bantuan tahun 2009/2010. Dalam diskusi ini lahir sejumlah saran dan pendapat terkait peran dari pada NFP Facility bagi pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara seperti perlu ditingkatkan bantuan NFP Facility pada tahun-tahun akan datang dengan fokus bantuan pada prioritas pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara. Hasil diskusi merekomendasikan 2 issue terpenting pembangunan kehutanan untuk kegiatan berikut, yaitu : (1). memberdayakan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, dan (2). Melakukan rehabilitasi dan konservasi hutan.

## PROSIDING



# 1

## YAYASAN HUALOPU

### PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM MANAJEMEN HUTAN BERKELANJUTAN DI PULAU NUSALAUT

#### 1. PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Ekosistem pulau kecil yang rawan terhadap kerusakan membutuhkan pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan perlu disepakati oleh setiap stake holder. Salah satu persoalan klasik yang sering ditemukan adalah sebagian besar masyarakat kita hidup di pesisir namun tradisi mereka sebenarnya lebih tergantung dari sumberdaya alam darat, walaupun pilihan-pilihan mereka terhadap sumberdaya alam darat sebenarnya sudah sangat terbatas. Kondisi ini memberi tekanan yang cukup kuat terhadap ekosistem pulau kecil. Hutan pulau kecil sangat rawan terhadap kerusakan seringkali menjadi sasaran tindakan sporadis dalam pemanfaatannya. Di sisi lain dengan memelihara hutan akan berdampak terpeliharanya lingkungan, memelihara stabilitas daerah aliran sungai, menjaga tersedianya air, melindungi dari badai, kebutuhan subsisten (kayu api, arang, bahan bangunan, buah madu, pewarna obat dan sebagainya). Hal ini perlu dipahami oleh masyarakat terutama masyarakat adat yang memiliki akses kuat dalam pemanfaatan hasil hutan.

Kelembagaan kewang dan sistem sasi yang telah melegenda dalam tradisi orang Maluku seharusnya menjadi panggung utama pengembangan konsep pengelolaan sumberdaya alam. Berbicara mengenai konsep konservasi adanya sasi sebagai kearifan lokal telah memberi banyak inspirasi dalam penegelolaan sumberdaya alam di berbagai wilayah bahkan oleh masyarakat internasional. Sasi secara substansi bukan saja mengatur soal sumberdaya alam tetapi sebenarnya yang paling mendasar adalah bagaimana perilaku masyarakat juga diatur.

Pemilihan Nusalaut sebagai tempat pelaksanaan program memiliki berapa alasan yang cukup mendasar, selain masuk dalam katagori pulau kecil dengan luas pulau hanya  $\pm 32,5$  kilometer<sup>2</sup> didiami oleh 7 negeri adat. Ketujuh negeri yang ada di pulau tersebut merupakan negeri adat yang memiliki solidaritas dan ikatan adat yang cukup kuat. Dengan dikeluarkannya PERDA No. 1. tentang Negeri oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggeliat bangkit dan manata tatanan sosial kemasyarakatan berbasis pada adat dengan merevitalisasi pranata-pranata adat yang telah lama kehilangan spiritnya menjadi kekuatan baru yang dilatarbelakangi dengan pemikiran yang konseptual dan spirit yang kuat sebagai *social capital* menuju kedaulatan rakyat atas sumberdaya alamnya. Kewang sebagai salah satu kelembagaan adat harus memainkan peran penting terutama pengawasan sumberdaya alam. Untuk itu, pemberdayaan terhadap kelembagaan kewang

#### PROSIDING

"WORKSHOP HASIL KEGIATAN NFP FACILITY FAO REGIONAL MALUKU DAN MALUKU UTARA"

termasuk menguatkan dan memperluas fungsi dan perannya bukan saja terhadap isu dan permasalahan pada tingkat Negeri saja tetapi diharapkan mengambil peran yang signifikan dalam pengelolaan pada tingkat pulau.

Penataan yang arif sesuai dengan kapasitas dan kerentanan lahan diharapkan akan berimplikasi terhadap ketersediaan cukup hutan dengan vegetasi yang baik sebagai daya dukung pulau. Konservasi hutan pada area-area sekitar sumber air oleh masyarakat membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara *catsmen* area di hutan. Namun kesadaran ini perlu ditunjang dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang pengelolaan hutan pulau kecil.

## 1.2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

- Tradisi pengelolaan hutan dengan membudidayakan tanaman-tanaman tahunan dapat tetap dipertahankan sehingga fungsi perlindungan dan konservasi secara alami tetap berjajalan secara parmanen.
- Membangun kesepakatan-kesepakatan masyarakat tentang peruntukan lahan untuk kawasan perlindungan wilayah konservasi
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan kawasan perlindungan hutan dan konservasi.

## 1.3. Output Yang Diharapkan

- Jangka pendek
  - Adanya kawasan hutan lindung untuk tata air di tiap negeri
  - Adanya kawasan konservasi di tiap negeri
  - Kewang dan sasi aktif dan berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam
  - Terbentuknya jaringan kewang tingkat pulau
- Jangka panjang
  - Kelembagaan Kewang dan Sistem sasi dapat dikembangkan dengan nilai-nilai konservasi dan kearifan tradisional maupun teknologi maju yang bersifat memulihkan (regenerasi) keadaan lingkungan.
  - Daerah tangkapan air (*catsmen* area) tetep terjaga di pulau Nusalaut

## 2. GAMBARAN UMUM LOKASI KEGIATAN

### 2.1. Letak dan Luas

Pulau Nusalaut merupakan salah satu pulau dari gugusan kepulauan Lease yang Secara geografis berbatasan sebelah utara dengan pulau seram dan Saparua, sebelah selatan dengan laut banda, sebelah timur dengan laut banda, dan sebelah barat dengan separuh laut banda. Secara astronomis pulau Nusalaut terletak pada posisi 03°37'00'' - 03°42'00'' Lintang Selatan dan 128°44'00'' - 128°48'00'' Bujur Timur. Pulau Nusalaut memiliki laus 32,50 Km<sup>2</sup>

### 2.2. Penduduk

Adapun total jumlah penduduk secara keseluruhan pada ketujuh Negeri berjumlah 5.954 jiwa yang teridri dari laki-laki 2.928 jiwa dan perempuan sebanyak 3.026 jiwa. Rasio

## PROSIDING

kepadatan penduduk Pulau Nusalaut yakni : 183 Jiwa/ Km<sup>2</sup>. Seera detail dapat dijelaskan untuk 4 negeri antara lain :

Tabel 1. Data Penduduk Menurut Tingkat Umur

UMUR	NALAHIA		AMETH		AKOON		ABUBU	
	L	P	L	P	L	P	L	P
0 - 5 Thn	33	40	71	90	46	28	95	15,10
6 - 11 Thn	31	32	98	110	45	43	88	13,99
12 - 16 Thn	14	20	70	79	33	34	43	6,84
17 - 45 Thn	87	101	201	281	92	116	281	44,67
46 Thn keatas	70	80	200	205	96	101	122	19,40
Jumlah	508	273	640	765	308	322	629	100

Tabel 2. Data Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN	NALAHIA		AMETH		AKOON		ABUBU	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Petani	80	61	90	63	15 1	47	82	60
Nelayan	103	-	130	-	20	-	191	-
UKM	19	10	6		7	4	10	11
PNS	16	18	50	72	10	7	9	17
Pensiunan	6	7	5	-	6	2	-	-
Swasta	-	-	7	-	2	-	-	-

Tabel 3. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	NALAHIA		AMETH		AKOON		ABUBU	
	L	P	L	P	L	P	L	P
TK	10		20		-	-		
SD	67		302		153	195	211	
SMP	15		647		41	38	59	
SMA	10		309		55	60	100	
Perguruan Tinggi	-		33		2	7	8	
Lain-lain					51	32		

### 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

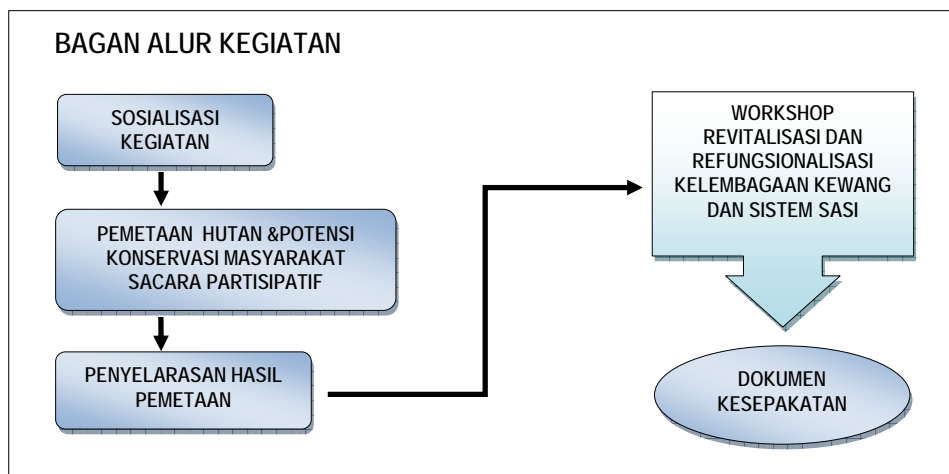
#### 3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Program ini dilaksanakan di Pulau Nusalaut sebagai lokasi sasaran, secara spesifik per sub kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ➔ Kegiatan sosialisasi, pemetaan potensi hutan , kawasan lindung , kawasan konservasi masyarakat dan penyelarasan hasil pemetaan dilaksanakan di 4 (empat) Negeri meliputi Negeri Nalahia, Negeri Ameth, Negeri Akoon dan Negeri Abubu

- Kegiatan Workshop Revitalisasi dan Refungsionalisasi Kelembagaan Kewang dan Sistem Sasi dilaksanakan di Negeri Ameth dengan melibatkan peserta dari 7 (tujuh) Negeri Adat di Nusalaut
- Program ini dilaksnakan pada bulan April - September 2008

### 3.2. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan



Guna keberhasilan pelaksanaan kegiatan survey dan pemetaan ini, maka dilakukan beberapa tahapan proses berupa metode yang digunakan dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Pemetaan Partisipatif
- PRA (*Participatory Rural Appraisal*)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Sosialisasi

#### a. Gambaran Kegiatan

Sosialisasi program implementasi pengelolaan hutan dan area konservasi berbasis masyarakat ini dilaksanakan di 4 desa target yakni Negeri Nalahia, Ameth, Akoon dan Abubu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan perangkat Pemerintah Negeri dan perwakilan masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perwakilan perempuan). Sedangkan tim dari Yayasan Hualopu berjumlah 4 orang. Sosialisasi kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat di keempat Negeri sasaran ruang lingkup program dan menyepakati rencana kerja terkait dengan implementasi program di tiap Negeri.

#### b. Respon Masyarakat

Masyarakat memberi dukungan yang positif terhadap program ini, mengingat kondisi pulau Nusalaut sebagai pulau kecil yang sangat rawan terhadap eksploitasi hutannya terutama terutama perlindungan terhadap sumber-sumber air. Terkait dengan rencana revitalisasi dan refungsionalisasi kelembagaan kewang dan sasi di Nusalaut masyarakat menyambut positif rencana ini karena di Nusalau sendiri telah berlaku sistim pemerintahan adat dimana pranata-pranata adat akan

dihidupkan kembali. Masyarakat bahkan mengusulkan agar rencana ini disosialisasikan kepada pihak kecamatan agar ada sinergitas dengan program-program kecamatan.

#### c. Kesepakatan

Beberapa kesepakatan yang diperoleh dalam kegiatan ini antara lain :

- Pemerintah dan masyarakat dari masing-masing Negeri mendukung sepenuhnya rencana implementasi program pengelolaan hutan dan area konservasi berbasis masyarakat
- Perlu ada pembentukan tim kajian dan pemetaan tingkat Negeri
- Kelembagaan Kewang dan sasi sebaiknya dilaksanakan untuk 7 Negeri agar ada kesepakatan-kesepakatan kerjasama pada tingkat pulau.

## 4.2. Pemetaan Hutan dan Potensi Wilayah Konservasi

### 4.2.1. Negeri Nalahaia

Gambar 1. Sketch Map Potensi SDA (Tampak Miring)



Jenis Sumberdaya	- Cengkih - Durian - Pala - Tanaman campuran	- Cengkih - Durian - Pala - Bambu - Tanaman campuran	- Cengkih - Durian - Pala - Sagu - Tanaman campuran	- Cengkih - Bambu - Pala - Sagu - Tanaman campuran	- Cengkih - Bambu - Pala - Sagu - Tanaman campuran (kasbi, keladi, patatas, kelapa, kenari, pisang)
Jenis Tanah	- Tanah Hitam (tanah + batu)	- Tanah Hitam (tanah + batu)	- Tanah Hitam (tanah + batu) - Tanah taisal (tanah + batu + pasir)	- Tanah Hitam (tanah + batu) - Tanah taisal (tanah + batu + pasir)	- Tanah Hitam (tanah + batu) - Tanah taisal (tanah + batu + pasir)
Teknologi	- Parang - Kapak (tradisional)	- Parang - Kapak (tradisional)	- Parang - Pacul - Kapak (tradisional)	- Parang - Pacul - Kapak (tradisional)	- Parang - Pacul - Kapak (tradisional)
Aturan	-	-	-	Konservasi hutan untuk daerah tangkapan air tanah	Konservasi hutan untuk daerah tangkapan air tanah
<i>Sumber Data : Hasil FGD Dengan Kelompok Masyarakat</i>					

#### a. Profil Vegetasi

Sebaran vegetasi pada lahan darat memiliki profil yang cukup beragam. Dengan topografi yang dominan berbukit, profil vegetasi dapat dikategorikan atas tiga kategori yaitu :

1. Padat : Vegetasi padat umumnya ditemukan pada hutan campuran dimana terdapat hutan kayu dan tanaman budidaya masyarakat. Tanaman-tanaman hutan yang tumbuh secara liar dan memiliki kepadatan tinggi mulai

dari anakan, sapihan sampai tegakan dan pohon. Di beberapa lokasi seperti, Tapano, Amano, Mital, Una'a biasanya pada areal ini keragaman jenis tanaman cukup tinggi. Untuk tanaman-tanaman budidaya masyarakat terdiri dari cengkik, pala, durian, kenari, cempedak dan tanaman buah-buahan lainnya sifatnya (*multi crop*) dan menempati areal yang luas mulai dari areal hutan pantai sampai ke daratan. dengan sebaran tanaman lebih didominasi cengkik.

2. Sedang: Katagori vegetasi sedang merupakan wilayah yang sebagian besar ditumbuhi oleh tanaman kayu putih dan beberapa areal yang dihuni oleh tanaman masyarakat seperti pisang, kelapa, dan tanaman palawija.

3. Jarang : Vegetasi jarang di wilayah petuanan negeri Nalahia lebih banyak terdapat pada daerah lahan kayu putih, namun dengan pohon yang relatif lebih tua. Selain itu juga terdapat pada kebun-kebun tanaman palawija yang berada di sekitar pemukiman masyarakat. Jarang sekali terdapat lahan yang terbuka atau kosong.

Porsentase tutupan vegetasi di rata-rata pada vegetasi dengan tingkatan kepadatan tinggi memiliki canopy yang relatif tertutup dan sangat baik untuk *catchment area*. Untuk keseluruhan wilayah Nalahia kondisinya masih sangat baik hanya pada beberapa areal bervegetasi jarang termasuk tanaman-tanaman budidaya masyarakat yang relatif tua memiliki canopy yang terbuka.

#### b. Pola Kepemilikan Lahan

Secara umum hak kepemilikan atas tanah di Nalahia, mirip dengan yang berlaku di Negeri-Negeri lainnya di kepulauan Lease. Secara turun temurun hak kepemilikan lahan atau petuanan telah berlaku dan sangat dipahami oleh masyarakat terutama dalam tradisi pengelolaan sumberdaya alam. Negeri Nalahia mengenal ada tiga bentuk kepemilikan atas lahan secara adat antara lain :

1. Dati : Hak kepemilikan lahan atau petuanan oleh satu marga yang masih berada dalam satu garis keturunan. Aturan dalam kepemilikan dati diatur oleh kepala dati yang telah disepakati oleh anak-anak dati dalam marga tersebut.

2. Pusaka : Hak kepemilikan lahan atau petuanan berbeda marga namun masih memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan darah, pusaka ini dapat berupa tanah pusaka maupun tanaman. Lahan ini dapat dimanfaatkan secara bersama oleh marga yang ada didalam pusaka tersebut atau secara bergantian sesuai dengan aktivitas pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya. Ada tiga marga yang memiliki pusaka sebagai berikut :

- Lewerissa
- Leiwakabessy
- Haurissa

3. Dati Negeri : Lahan atau petuanan milik Negeri termasuk didalamnya dati lenyap atau dati yang pemiliknya sudah

tidak ada dan dikelola oleh Negeri. Dalam pengelolaan dati ini dapat dikelola langsung oleh Negeri tetapi juga dapat disewakan kepada masyarakat untuk dikelola dan diatur pembagian hasilnya. Status dati yang masuk katagori dati lenyap ada dua antara lain:

- Saamena
- Syaranamual

c. Tata Kelola Air Bersih

Sumber air yang cukup representatif bagi masyarakat Negeri Nalahaia adalah sumber air Waiwoko. Pada kawasan air Waiwoko telah ada peruntukan kawasan hutan lindung untuk sumber air tersebut. Luasan kawasan konservasi yang disepakati dan ditetapkan dengan keputusan Negeri adalah sekitar 700m<sup>2</sup>.

Terkait dengan peruntukan wilayah Kawas hutan lindung, diberlakukan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Negeri dengan keputusan Negeri. Larangan untuk penebangan pohon maupun pembukaan lahan untuk kebun oleh masyarakat. Bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini maka dikenai sanksi berupa teguran kalau pelanggaran yang sama terulang maka dikenai denda uang atau penyitaan terhadap alat chain chaw, kalau penebangannya dilakukan dengan menggunakan chain chaw. Pada area ini juga diberlakukan larangan untuk pengambilan batu untuk bangunan dan lain-lain

d. Peruntukan Lahan

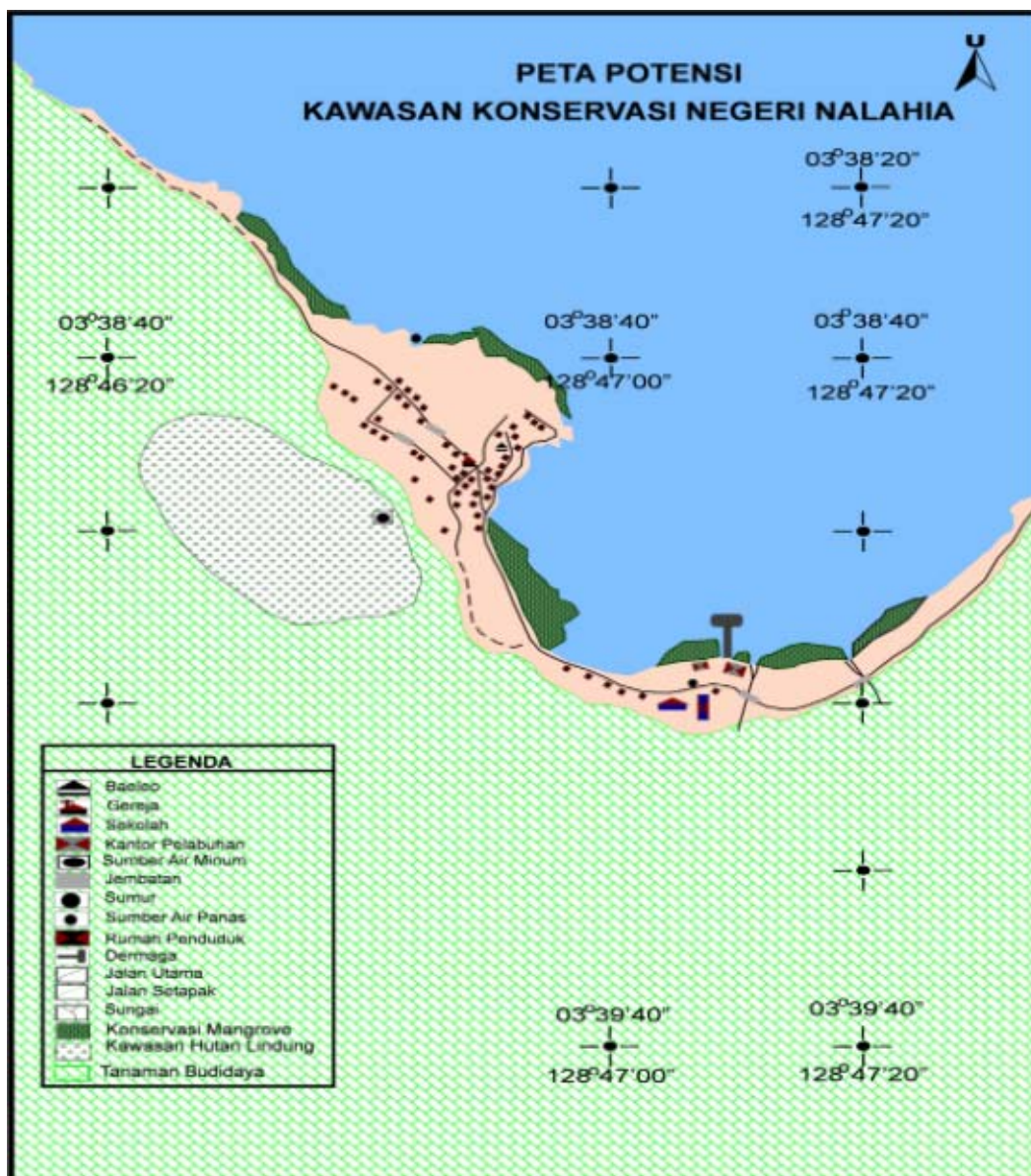
Beberapa tipe peruntukan lahan disesuaikan dengan pola pemanfaatan masyarakat, untuk tanaman budidaya seperti sagu, pisang dan kelapa cenderung bertumbuh pada tanah yang sama. Sementara untuk tanaman palawija memiliki lahan yang juga berbeda. Namun lahan yang cukup luas adalah yang ditanami dengan tanaman seperti cengkih, pala, durian, dan lain-lain juga agak berbeda. Klasifikasi tentang peruntukan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Data Peruntukan Lahan Menurut Tradisi Masyarakat

Jenis Tanah	Jenis Komoditi	Warna	Tekstur	Kontur
Taisil	Pisang, kelapa, sagu	Putih berpasir	Berpasir	Lereng
Tanah hitam	Kasbi, keladi	Hitam	Tanah campur batu	landai - lereng
Tanah Liat	Cengkeh, pala, durian	Merah / Hitam	Berat	Lereng

Sumber Data : Hasil FGD dengan Kelompok Masyarakat

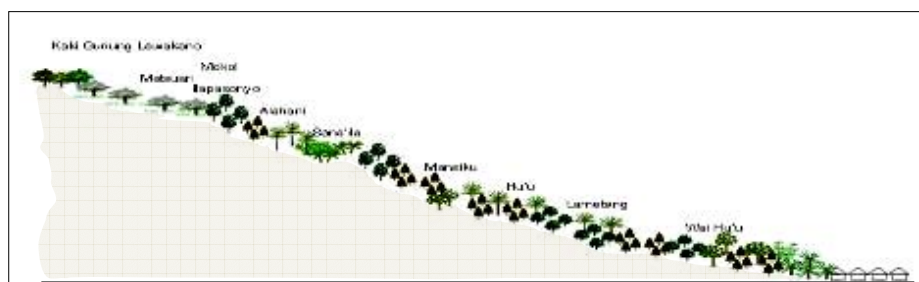
e. Peta kawasan Konservasi Dan Kawasan Lindung





## 4.2.2. Negeri Ameth

Gambar 3. Sketch Map Potensi SDA (Tampak Miring)



<b>Jenis Sumberdaya</b>	- Hutan - Kayu Putih - Paku Kawa - Jamur - Kantung Semar - Kayu Merah - Katu - Tawang - Kayu - Salawaku - Kayu Pule - Kayu Sapar - Mayang - Babi Hutan - Jenis-jenis Burung - Kus-kus	- Cengkih - Durian - Pala - Bambu - Tanaman campuran	- Cengkih - Durian - Pala - Sagu - Tanaman campuran	- Cengkih - Bambu - Pala - Sagu - Tanaman campuran	- Cengkih - Pala - Sagu - Tanaman campuran (kasbi, keladi, patatas, kelapa, kenari, pisang)
<b>Jenis Tanah</b>	- Tanah Hitam (tanah + batu)	- Tanah Hitam (tanah + batu)	- Tanah Hitam (tanah + batu) - Tanah taisil (tanah + batu + pasir)	- Tanah Hitam (tanah + batu) - Tanah taisil (tanah + batu + pasir)	- Tanah Hitam (tanah + batu) - Tanah taisil (tanah + batu + pasir)
<b>Teknologi</b>	- Parang - Kapak (tradisional)	- Parang - Kapak (tradisional)	- Parang - Pacul - Kapak (tradisional)	- Parang - Pacul - Kapak (tradisional)	- Parang - Pacul - Kapak (tradisional)
<b>Aturan</b>	-	-	-	Konservasi hutan untuk daerah tangkapan air tanah	Konservasi hutan untuk daerah tangkapan air tanah
Sumber Data : Hasil FGD Dengan Kelompok Masyarakat					

### a. Profil Vegetasi

Sebaran vegetasi pada lahan darat memiliki profil yang cukup beragam. Degan topografi yang dominan berbukit profil vegetasi dapat dikategorikan atas tiga kategori yaitu :

1. Padat : Vegetasi padat umumnya ditemukan pada hutan atau dimana aktivitas masyarakat rendah dimana secara umum didominasi oleh tanaman-tanaman hutan yang tumbuh secara liar dan memiliki kepadatan tinggi mulai dari anakan, sapihan sampai tegakan dan pohon di

- beberapa lokasi seperti, Kaki Gunung Lawakano, Opipil, Belakang Parang, Wai Honolai, dan lain-lain. Pada wilayah hutan ini keragaman jenis tanaman cukup tinggi.
2. Sedang : Seperti Dusun Sagu di Waihu'u dan Dusun Cengkih di Lameteng dan Mansiku.
  3. Jarang : Seperti Hutan Pohon Kayu Putih di Ilapasonyo dan Metsuari, tanaman campuran seperti Durian, Kenari, Kelapa di Hatoni, Wilayah Kebun di Sana'ila dan Dusun Cengkih di Alahani

b. Pola Kepemilikan Lahan

Bahwa pengelolaan sumberdaya alam darat teristimewa tanah dengan segala sesuatu yang menyertainya dikelola berdasarkan status kepemilikan dari tanah/ wilayah tersebut.

Di Negeri Ameth, status kepemilikan terhadap tanah-tanah secara umum bersifat komunal, meliputi :

1. Dati : Merupakan suatu warisan leluhur untuk suatu marga yang berasal dari satu garis keturunan.
2. Pusaka : Untuk beberapa marga yang punya hubungan keluarga/hubungan darah.
3. Pusaka Dati : Tanah warisan untuk suatu marga tetapi dari garis keturunan yang berbeda.
4. Dati Negeri : Tanah milik negeri, untuk di negeri Ameth dati negeri ini pada umumnya berasal dari Tanah Dati yang marga pewaris sudah tidak jelas atau sudah punah, ataupun tanah lainnya yang asal usulnya tidak jelas dimasukkan sebagai Dati Negeri.

c. Tata Kelola Air

Untuk Negeri Ameth, telah teridentifikasi bahwa ada 4 Sumber Air yang dipakai untuk kebutuhan masyarakat.

Tabel 5. Data Tata Kelola Air

Sumber Air	Bentuk Pemeliharaan		Aturan	Pengawasan	
	Bagaimana	Siapa		Bagaimana	Siapa
Wai Ley	Adanya pengumuman untuk membersihkan kalau lingkungan air sudah kotor	Masyarakat yang tinggal di sekitar air (Pemakai)	Keputusan Pemerintah Negeri : - Menjaga kebersihan - Pengambilan air minum - Tempat cuci - Tempat mandi (harus pakai gayung)	Kunjungan langsung ke sumber air setiap tahun pendekatan kepada pemilik lahan	Pemerintah Negeri
Wai Hu'u					
Wai Ata					
Wai Hutete					

d. Peruntukan Lahan

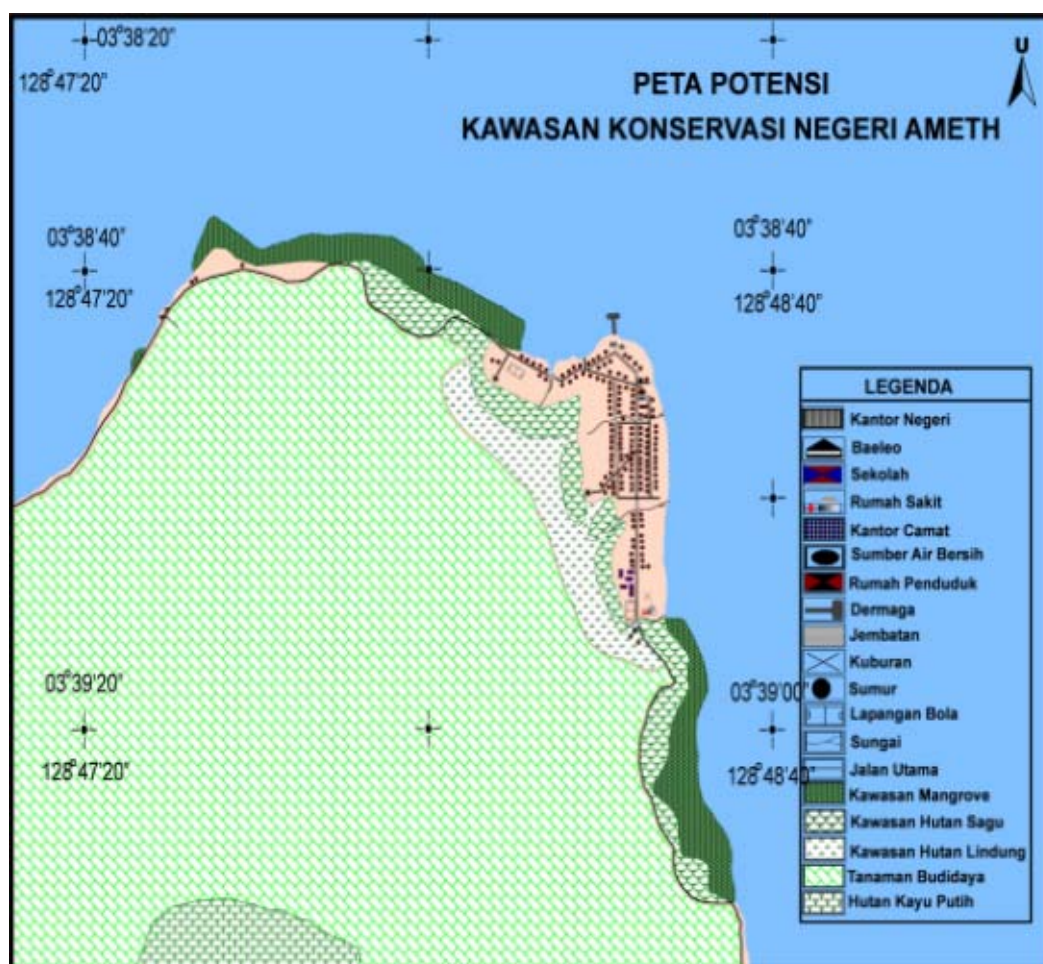
Pola tanam masyarakat secara tradisional disesuaikan dengan kearifan masyarakat dalam peruntukan lahan sesuai dengan jenis komoditi yang ditanam. Akondisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dari sejak leluhur mereka dan diwariskan sampai sekarang. Masyarakat secara fisik memahami betul jenis tanah untuk tanaman budidaya (cengkih, pala,

durian kenari), jenis tanah untuk tanaman palawija dan hortikultura. Berikut beberapa contoh tentang peruntukan lahan oleh masyarakat.

Tabel 6. Data Peruntukan Lahan Menurut Tradisi Masyarakat

Jenis Tanah	Warna	Tekstur	Kontur	Jenis Komoditi
Tanah Merah	Merah	Kasar berbatu	Kemiringan	Kayu Putih
Tanah Hitam	Hitam	Halus berbatu	Kemiringan dan datar	Campuran: Cengkeh, Pala, Kelapa, Durian, dll.
Tanah Abu-Abu	Abu-abu	Berpasir dan berbatu	Datar	Campuran: Cengkeh, Pala, Kelapa, Durian, dll.
Tanah Uba Pasang	Amunisi Peluru	Halus	Datar	Kasbi, Keladi, Petatas, Pisang, dll.
Tanah Bapeci	Hitam kekuningan	Berbecak	Datar	Sagu

e. Peta kawasan Konservasi Dan Kawasan Lindung



### 4.2.3. Negeri Akoon

Gambar 2. Sketch Map Potensi SDA (Tampak Miring)



Jenis Sumberdaya	Kayu Putih (*) Paku Kawa Jamur Kantung Semar Bambu Kayu Merah Katu Tawang Kayu Salawaku Kayu Pule Kayu Sapar Nenas Mayang Babi Hutan Jenis-jenis Burung Kus-kus	Cengkeh (*) Kayu Salawaku Kayu Merah Kayu Sapar Kelapa Nenas (Kebun) (*) Mayang Bambu Kayu Pule Kayu Tawang Cempeda Kayu Putih Durian Babi Hutan Kus-kus Jenis-Jenis Burung	Sagu (*) Cengkeh (*) Pala (*) Durian Kenari Kayu Suring Mayang Gayang Kelapa Langsa Pete Kenari	Sukun Mangga Nangka Kedondong Mayang Pisang Kuini Langsa Nangka Belanda Pepaya Ternak : Ayam Babi Sapi
Jenis Tanah	Tanah warna keputihan; agak kemerahan, berbatu dan agak berpasir	Tanah Hitam dan sebagian merah; berkarang	Tanah Hitam dan sebagian merah; berkerikil	Batu karang; sebagian tanah hitam dan tanah merah
Teknologi	Chainsouw; Parang; Tumbak; Kapak	Chainsouw; Parang; Tumbak; Kapak	Chainsouw; Parang; Tumbak; Kapak	Chainsouw; Parang; Tumbak; Kapak
Aturan	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kebakaran besar di Tahun 2006 akibat Manusia &amp; Musim Kemarau</li> <li>✓ Batas Tanah Thn 1980'an (antar dusun) pembentukan komisi</li> <li>✓ Longsor Thn 1980</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kebakaran besar di Tahun 2006 akibat Manusia &amp; Musim Kemarau</li> <li>✓ Batas Tanah Thn 1980'an (antar dusun/dati) pembentukan komisi</li> </ul>	Batas Tanah Thn 2006'an (antar dusun/dati) pembentukan komisi	Batas Tanah Thn 2006'an (antar dusun/dati) pembentukan komisi
Sumber Data : Hasil inventarisir data langsung lewat FGD dengan kelompok masyarakat Akoon				

#### a. Profil Vegetasi

Sebaran vegetasi pada lahan darat memiliki profil yang cukup beragam. Dengan topografi yang dominan berbukit, profil vegetasi dapat dikategorikan atas tiga kategori yaitu :

1. Padat : Kepadatan vegetasi daerah hutan, umumnya ditemukan pada daerah-daerah pinggiran pemukiman hingga kurang lebih 200 meter kehutan, dimana daerah ini ditumbuhi berbagai tanaman campuran dengan memiliki keragaman yang begitu tinggi, antara lain, Cengkih, Pala, Mayang, Durian, Pisang, Kelapa, Petai dll dengan kondisi tanah yang subur.  
Topografi kawasan ini bervariasi yakni, berbukit, lembah dan datar. Umumnya ditemui tanaman produktif masyarakat seperti cengkih, pala kelapa, durian dan buah-buahan. Kondisi ini sebagian besar ditemukan pada Lokasi Hatusuil, Dusun Nahumata dan Dusun Hina.
2. Sedang : Kondisi Vegetasi dengan kepadatan sedang ditemukan agak ketinggian dari kondisi yang padat, umumnya ditumbuhi dengan Tumbuhan Pohon yang berukuran kecil, Pohon Kayu Putih dan jenis tumbuhan yang tidak ekonomis, yang biasanya dipakai untuk kayu bakar oleh masyarakat. Kondisi ini ditemukan pada Areal lokasi Batu Tumbak.
3. Jarang : Kondisi kepadatan vegetasi yang jarang ditemukan pada bagian ketinggian atas mendekati pusat pulau, umumnya ditumbuhi dengan tanaman pohon kayu putih yang berukuran kecil, dan tanaman hutan liar yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kondisi kepadatan yang jarang banyak ditumbuhi alang-alang dan rumput liar lainnya. Kondisi lahan kosong yang tidak subur dan tidak dimanfaatkan. Kondisi ini ditemukan pada areal lokasi Telaga Peleno dan Lokasi Batu Pipil.  
Vegetasi yang memiliki kepadatan padat umumnya kondisi tutupan besar, hal ini karena ditumbuhi dengan tanaman ekonomis, seperti cengkih, pala, kelapa, pohon-pohon besar dll, memiliki tingkatan tutupan 90 %, jika dibandingkan dengan daerah dengan kepadatan sedang dan jarang, tutupannya sangat kecil, karena sangat tergantung dari vegetasi yang tumbuh di kawasan tersebut. karena pada lahan ini, kebanyakan ditumbuhi dengan tanaman kecil dan jarang sehingga tutupan sangat terbuka.

b. Pola Kepemilikan Lahan

Secara umum hak kepemilikan atas tanah di Negeri Acoon mirip dengan yang berlaku di Negeri-negeri lainnya di kepulauan Lease. Secara turun temurun hak kepemilikan lahan atau petuanan telah berlaku dan sangat dipahami oleh masyarakat terutama dalam tradisi pengelolaan sumberdaya alam. Kepemilikan ini yang dikenal antara lain

1. Dati : Hak kepemilikan lahan atau petuanan oleh satu marga yang masih berada dalam satu garis keturunan. Aturan dalam kepemilikan dati diatur oleh kepala dati yang telah disepakati oleh anak-anak dati dalam marga tersebut. Yang memakan warisan dati adalah Laki-laki dan Perempuan yang tidak menikah.

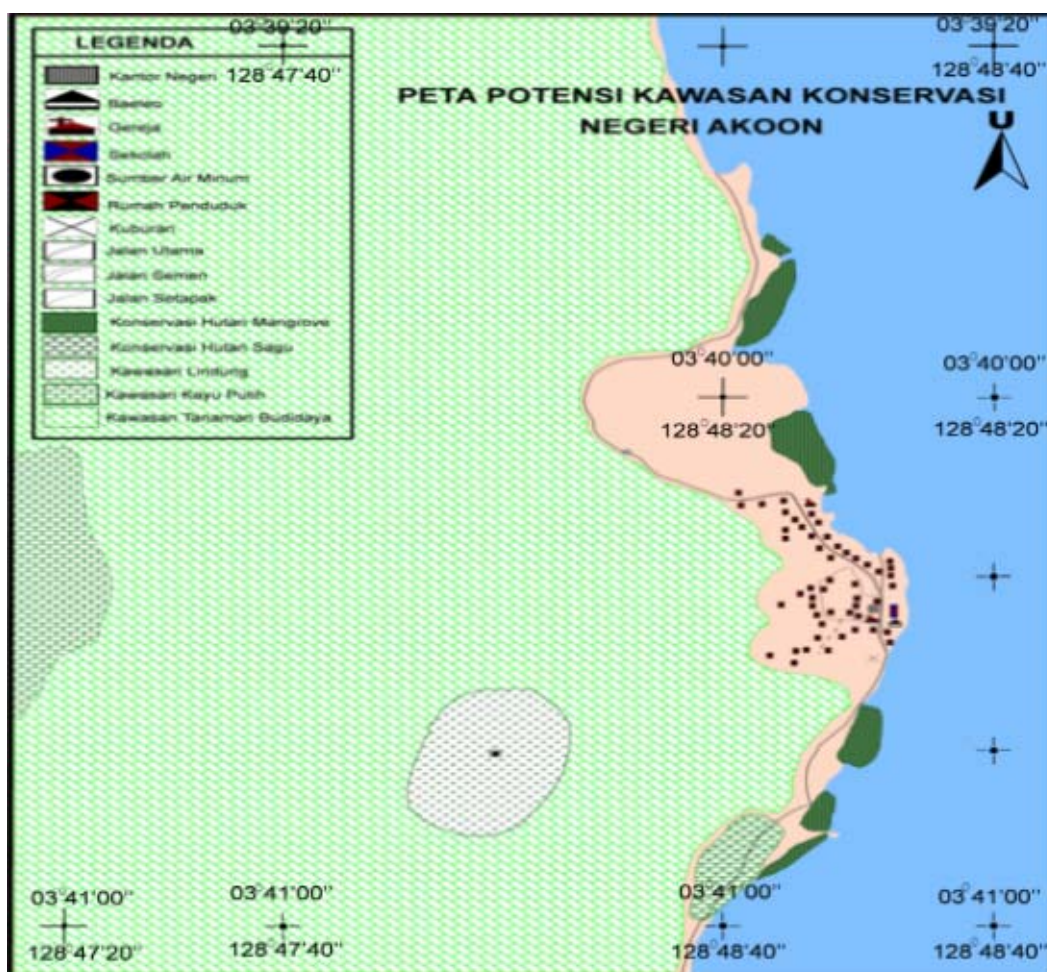
2. Pusaka Dati : Hak kepemilikan lahan atau petuanan berbeda marga namun masih memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan darah, pusaka ini dapat berupa tanah pusaka maupun tanaman. Lahan ini dapat dimanfaatkan secara bersama oleh marga yang ada didalam pusaka tersebut atau secara bergantian sesuai dengan aktifitas pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya. Bila satu marga memiliki beberapa dati, maka semua dati memiliki hak yang sama.
  3. Dati Pusaka : Hak kepemilikan yang diperoleh dari marga namun telah ditentukan untuk dikelola oleh turunan tertentu, jadi berbeda dengan Sati Pusaka, yang dikelola oleh semua dati dalam marga tersebut.
  4. Dati Negeri : Lahan atau petuanan milik Negeri termasuk didalamnya dati lenyap atau dati yang pemilikinya sudah tidak ada dan dikelola oleh Negeri. Dalam pengelolaan dati ini dapat dikelola langsung oleh Negeri tetapi juga dapat disewakan kepada masyarakat untuk dikelola dan diatur pembagian hasilnya.
- c. Tata Kelola Air Bersih.
- Sumber air di Negeri Akoon bersal dari air tanah yang terletak di dusun Hina kurang lebih 2 Km dari rumah penduduk. Pada lokasi ini merupakan kawasan yang padat dengan tumbuhan/vegetasi antara lain tumbuhan Pohon Beringin, Durian, Pala, Mangga, Rumpun bambu, yang sangat lebat dengan tutupan 90 % dan kerapatan sangat padat, sehingga memungkinkan lokasi ini merupakan daerah tangkapan air yang baik, walaupun dari informasi penebangan pohon pada areal ini dilakukan oleh pemilik dati, namun upaya pemerintah negeri untuk mengantisipasi dengan pendekatan-pendekatan, sehingga areal itu bisa dikelola dengan baik. Hal ini juga disebabkan bila musim kemarau panjang, debit air semakin kecil, akibat penebangan pohon pada areal tersebut, sebaliknya bila musim hujan, kondisi air membaik. Di lokasi tangkapan air tersebut, telah dibuat bak penampung pada tahun 1935 oleh Belanda, kemudian diperbaiki lagi pada 15 Juni 2003, dimana air tersebut disalurkan ke masyarakat melalui bak-bak penampung yang telah dialiri secara gravitasi dari bak penampung induk, kemudian dari bak penampung itu oleh masyarakat memanfaatkan untuk kebutuhan hari-hari. Pengelolaan sumber air ini dipercayai oleh pemerintah negeri, sehingga dalam penerapannya dikelola dengan baik, untuk kepentingan masyarakatnya.
- d. Peruntukan Lahan
- Beberapa tipe peruntukan lahan disesuaikan dengan pola pemanfaatan masyarakat, untuk tanaman budidaya seperti sagu, pisang dan kelapa cendrerung bertumbuh pada tanah yang sama. Sementara untuk tanaman palawija memiliki lahan yang juga berbeda. Namun lahan yang cukup luas adalah yang ditanami dengan tanaman seperti cengkih, pala, durian, dll juga agak berbeda. Klasifikasi tentang peruntukan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Data Peruntukan Lahan Menurut Tradisi Masyarakat

JENIS TANAH	JENIS KOMODITI	WARNA	TEKSTUR	KONTUR
Taisil	Pisang, kelapa, sago	Putih berpasir	Berpasir	Lereng
Tanah hitam	Kasbi, keladi	Hitam	Tanah campur batu	Datar - lereng
Tanah Liat	Cengkeh, pala, durian	Merah / Hitam	Berat	Lereng

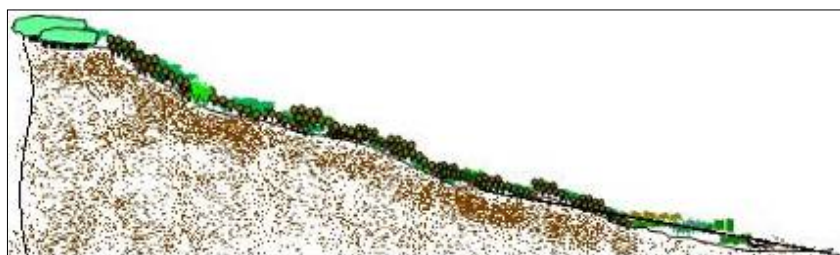
Sumber Data : Hasil Inventarisir Lewat FGD Dengan Kelompok Masyarakat Akoon

e. Peta kawasan Konservasi Dan Kawasan Lindung



#### 4.2.4. Negeri Abubu

Gambar 3. Sketch Map (Penampang Miring)



Jenis Sumberdaya	- Kayu Putih - Paku Kawa - Tanaman Campuran	- Cengkeh - Kayu Salawaku - Kayu Merah - Kayu Sapar - Kelapa - Mayang - Bambu - Kayu Pule - Kayu Tawang - Cempeda - Kayu Putih - Durian - Coklat - Tanaman Campuran	- Sagu - Cengkeh - Pala - Durian - Kenari - Kayu Suring - Mayang - Gayang - Kelapa - Langsat - Pete - Kenari - Kasbi - Keladi	- Sukun - Mangga - Nangka - Kedondong - Mayang - Sagu - Pisang - Kuini - Langsa - Nangka Belanda - Pepaya - Kasbi - Keladi
Jenis Tanah	Tanah warna keputihan; agak kemerahan, berbatu dan agak berpasir	Tanah Hitam dan sebagian kuning kemerahan; berkarang	Tanah Hitam dan sebagian merah; berkerikil	Batu karang; sebagian tanah hitam dan tanah merah
Teknologi	Chainsouw; Parang; Tumbak; Kapak	Chainsouw; Parang; Tumbak; Kapak	Chainsouw; Parang; Tumbak; Kapak)	Chainsouw; Parang; Tumbak; Kapak
Aturan	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Masalah	- Kebakaran besar di Tahun 2006 akibat Manusia & Musim Kemarau - Batas Tanah Thn 1980'an (antar dusun) pembentukan komisi Longsor Thn 1980	- Kebakaran besar di Tahun 2006 akibat Manusia & Musim Kemarau - Batas Tanah Thn 1980'an (antar dusun/dati) pembentukan komisi	Batas Tanah Thn 2006'an (antar dusun/dati) pembentukan komisi	Batas Tanah Thn 2006'an (antar dusun/dati) pembentukan komisi

##### a. Profil Vegetasi

Sebaran vegetasi pada lahan darat memiliki profil yang cukup beragam. Degan topografi yang dominan berbukit profil vegetasi dapat dikategorikan atas tiga katagori yaitu:

1. Padat : Kepadatan vegetasi daerah hutan atau dimana aktivitas masyarakat rendah, umumnya ditemukan



pada daerah-daerah pinggiran pemukiman hingga kurang lebih 200 meter kehutan, dimana daerah ini ditumbuhi berbagai tanaman campuran dengan memiliki keragaman yang begitu tinggi, antara lain, Cengkih, Pala, Mayang, Durian, Pisang, Kelapa, Petai dll dengan kondisi tanah yang subur. Di beberapa lokasi seperti, ewang (dati aunalal) dan dati lesil. biasanya pada areal ini keragaman jenis tanaman cukup tinggi.

Kondisi ini ditemukan juga pada kawasan tangkapan air, yang biasa disebut daerah Kepala Air, Dusun Erssona dan Dusun Amahalo.

2. Sedang : Kondisi Vegetasi dengan kerapatan sedang ditemukan agak ketinggian dari kondisi yang padat, umumnya ditumbuhi dengan Tumbuhan Pohon yang berukuran kecil, Pohon Kayu Putih dan jenis tumbuhan yang tidak ekonomis, yang biasanya dipakai untuk kayu bakar oleh masyarakat. Kondisi ini ditemukan pada kawasan Dusun Lalasinahaya

3. Jarang : Kondisi kerapatan vegetasi yang jarang ditemukan pada bagian ketinggian atas mendekati pusat pulau, umumnya ditumbuhi dengan tanaman pohon kayu putih yang berukuran kecil, dan tanaman hutan liar yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kondisi kerapatan yang jarang banyak ditumbuhi alang-alang dan rumput liar lainnya. Kondisi lahan kosong yang tidak subur dan tidak dimanfaatkan. Kondisi ini ditemukan pada lokasi Dusun Picanusa.

#### b. Pola Kepemilikan Lahan

Potensi sumberdaya alam darat yang ada di Negeri Abubu, dikelola berdasarkan hak kepemilikan sejak turun temurun. Ada areal yang secara umum merupakan milik pemerintahan negeri dan ada juga areal yang menjadi hak milik dati. Hal ini sangat jelas pembagiannya, sehingga sering terdengar istilah tanah negeri dan tanah dati. Untuk areal yang menjadi hak milik negeri, dikelola oleh pemerintah negeri dengan mendapat masukan dan persetujuan dari masyarakat setempat. Sementara areal yang merupakan hak milik dati, dikelola oleh para ahli waris dari keturunan dati tersebut.

Untuk wilayah Maluku yang memiliki negeri-negeri adat, cukup terkenal dengan tradisi seperti ini. Namun ada hal yang sering menjadi permasalahan, ketika suatu areal petuanan dati, dieksploitasi oleh pemiliknya dengan tidak mempertimbangkan dampak secara umum bagi masyarakat setempat. Hal seperti ini sering terjadi, termasuk di Negeri Abubu. Dengan alasan hak milik, maka pengelolaan atas kepemilikan semakin kuat tanpa melihat dampak dari eksploitasi tersebut.

c. Tata Kelola Air (Sumber Air, Pengelolaan)

Sumber-sumber air tersebut berada pada suatu areal yang dimiliki oleh datu, sehingga yang terjadi selama ini adalah sumber-sumber air tersebut di dikelola berdasarkan keinginan dari datu yang bersangkutan.

Pada areal sumber air, banyak terdapat tanaman atau pohon yang dapat menyerap air, sehingga debit air tetap terjaga. Namun untuk kepentingan dan kebutuhan dari pemilik atau datu, maka areal tersebut telah banyak dieksploitasi untuk membuka lahan perkebunan dengan menebang sebagian besar tanaman atau pohon yang berada pada areal tersebut. Selama ini pemerintah Negeri Abubu telah melakukan berbagai pendekatan dengan pihak datu atau pemilik areal sumber air, namun sampai sekarang belum ada kesepakatan terkait dengan tata kelola sumber air secara bersama.

d. Peruntukan Lahan

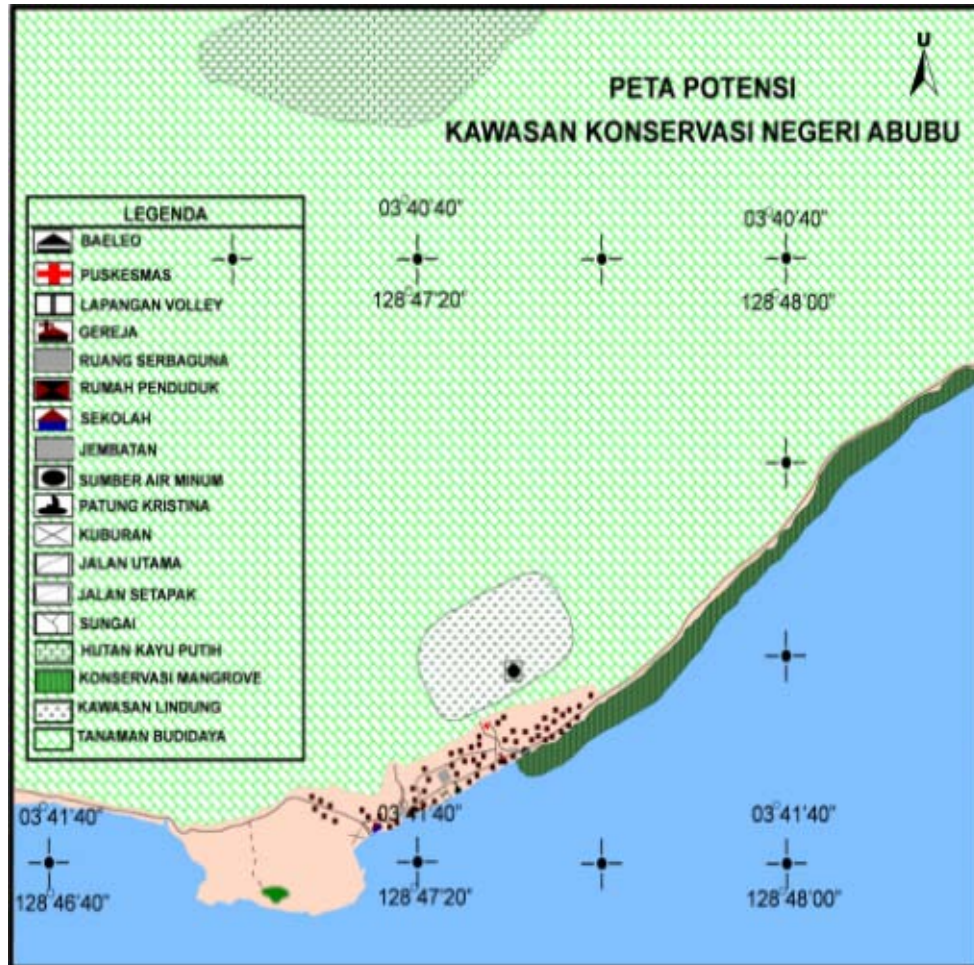
Beberapa tipe peruntukan lahan disesuaikan dengan pola pemanfaatan masyarakat, untuk tanaman budidaya seperti sagu, pisang dan kelapa cenderung bertumbuh pada tanah yang sama. Sementara untuk tanaman palawija memiliki lahan yang juga berbeda. Namun lahan yang cukup luas adalah yang ditanami dengan tanaman seperti cengkih, pala, durian, juga agak berbeda. Klasifikasi tentang peruntukan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Data Peruntukan Lahan Menurut Tradisi Masyarakat

JENIS TANAH	JENIS KOMODITI	WARNA	TEKSTUR	KONTUR
Taisil	Pisang, kelapa, sagu	Putih berpasir	Berpasir	Lereng
Tanah hitam	Kasbi, keladi	Hitam	Tanah campur batu	Datar - lereng
Tanah Liat	Cengkeh, pala, durian	Merah / Hitam	Berat	Lereng

Sumber Data : Hasil Inventarisir Lewat FGD Dengan Kelompok Masyarakat Abubu

e. Peta kawasan Konservasi Dan Kawasan Lindung



### 4.3. Pertemuan Penyelarasan

#### 4.3.1. Proses Pelaksanaan

Kegiatan ini berlangsung di 4 Negeri masing-masing selama 1 hari dalam bentuk pertemuan umum dimana dalam pertemuan ini hasil tiap pemetaan tiap negeri dipresentasikan. Perwakilan masyarakat yang hadir dalam pertemuan ini melakukan *cross-check* dan klarifikasi terhadap data dan informasi yang telah terinventarisir. Mengingat pentingnya kegiatan ini maka selain upaya mendapatkan data dan informasi masyarakat juga diminta untuk menyepakati beberapa hal terkait dengan peruntukan area untuk wilayah konservasi.

#### 4.3.2. Kesepakatan

No	Nama Negeri	Point Kesepakatan
1	NALAHIA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada wilayah sumber air <math>\pm 700m^2</math> sudah dibuat oleh pemerintah negeri untuk sumber air.</li> <li>2. Konservasi hutan mangrove</li> <li>3. Konservasi hutan sagu</li> <li>4. Dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah negeri dan seluruh masyarakat.</li> <li>5. Harus dibuat kesepakatan menyangkut aturan-aturan untuk pengelolaan daerah sumber air</li> <li>6. Kesepakatan penguatan kapasitas kewang sebagai institusi adat</li> </ol>
2	AMETH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peruntukan areal hutan lindung antara 100 - 2000m<sup>2</sup> di semua sumber air</li> <li>2. Kesepakatan ini akan di tindaklanjuti dengan pendekatan dari pemerintah negeri terhadap pemilik lahan atau datu pada area sekitar sumber air tersebut</li> <li>3. Konservasi hutan sagu</li> <li>4. Konservasi hutan mangrove</li> <li>5. Kesepakatan penguatan kapasitas kewang sebagai institusi adat</li> </ol>
3	AKOON	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peruntukan areal hutan lindung untuk sumber air sekitar 500m<sup>2</sup></li> <li>2. Kesepakatan ini akan di tindaklanjuti dengan pendekatan dari pemerintah negeri terhadap pemilik lahan atau datu pada area sekitar sumber air tersebut</li> <li>3. Konservasi hutan sagu</li> <li>4. Konservasi hutan mangrove</li> <li>5. Kesepakatan penguatan kapasitas kewang sebagai institusi adat</li> </ol>
4	ABUBU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peruntukan areal hutan lindung untuk sumber air sekitar 500m<sup>2</sup></li> <li>2. Kesepakatan ini akan di tindaklanjuti dengan pendekatan dari pemerintah negeri terhadap pemilik lahan atau datu pada area sekitar sumber air tersebut</li> <li>3. Konservasi hutan sagu</li> <li>4. Konservasi hutan mangrove</li> </ol>

#### 4.4. Workshop Revitalisasi dan Refungsionalisasi Kelembagaan Kewang dan Sasi

- a. Identifikasi Komponen Sasi
- b. Identifikasi Aturan Yang Pernah Berlaku
- c. Identifikasi Kelembagaan Kewang Tiap Negeri
- d. Identifikasi Isu Pengelolaan Tingkat Pulau
- e. Kesepakatan  
Point-point Kesepakatan Oleh 7 Negeri Pada Kegiatan “ Workshop Revitalisasi dan Refungsionalisasi Kelembagaan Kewang Dan Sasi 7 Negeri Di Nusalaut “

Kelembagaan Kewang Negeri-Negeri di Nusalaut (K2N3)

Apa yang disebut dengan jaringan Kelembagaan Kewang Negeri-Negeri di Nusalaut K2N3 ?

- Kumpulan program, praktisi, dari NEGERI-NEGERI yang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui kegiatan SASI
  - Dengan demikian maka anggota pada jaringan ini terdiri dari:
    - Anggota masyarakat - Staf kewang/pengawas
    - Tokoh adat - Lembaga dana
    - Peneliti/Academik - Pengambil keputusan
- Catatan : keanggotaan jaringan ada pada tingkat negeri

Bentuk Kelembagaan Kewang Negeri-Negeri di Nusalaut (K2N3)

Kelembagaan kewang negeri-negeri di nusalaut (k2n3) berbentuk sebuah jaringan kerjasama dan menekankan pada sebuah upaya melalui proses dan media pembelajaran bersama.

Latar Belakang

1. Ada keinginan kuat di NEGERI-NEGERI untuk bekerjasama dengan masyarakat untuk menggunakan sasi sebagai salah satu pendekatan pengelolaan SDA Pulau Nusalaut (darat dan laut), melalui kelembagaan Kewang.
2. Disadari bahwa untuk mencapai keberhasilan maka diperlukan kerjasama serta penggunaan pendekatan yang sama melalui program dan lembaga kewang negeri-negeri di NUSALAUT dalam jaringan Kelembagaan Kewang Negeri-Negeri di Nusalaut (K2N3).

Program dan Strategi Berbeda Kelembagaan Kewang Negeri-negeri di Nusalaut (K2N3)

- Prog. Sasi (Meliputi Pengelolaan dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam Hayati dan non Hayati)
- Prog. Pendidikan (Sasi Kawasan)
- Prog. Eko-Bisnis (Hasil Sasi atau Sumberdaya Alam Hayati -non Hayati dan Energi)
- Prog. Kawasan Penyangga
- Prog. Pengelolaan Kawasan Rumpon

Strategi Belajar dan Maju Bersama Dalam Pengelolaan SDA antar (7) Tujuh Negeri dan Pemerintah Negeri Melalui Jaringan Kelembagaan Kewang Negeri-Negeri di Nusalaut (K2N3)

- Untuk itu telah dirintis sebuah upaya pembentukan jaringan kerja, yang difasilitasi oleh Yayasan Hualopu, pada tanggal 30 Sep 2008, di Ameth (kantor Bapak Raja)

- Para peserta pertemuan akhirnya sepakat untuk membentuk sebuah Jaringan Kerja yang disebut : jaringan Kelembagaan Kewang Negeri-Negeri di Nusalaut (K2N3)
- Beberapa pertemuan yang akan diselenggarakan, mulai dari Ameth, yang bertujuan untuk saling belajar dan bertukar pengalaman tentang penggunaan pendekatan jaringan Kelembagaan Kewang Negeri-Negeri di Nusalaut (K2N3) perlu dirancang

#### Maksud

- Jaringan Kerja ini akan membantu program dan kegiatan dalam penggunaan strategi atau pendekatan jaringan Kelembagaan Kewang Negeri-Negeri di Nusalaut (K2N3) agar dapat terlaksana dengan lebih baik dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengelolaan SDA darat dan laut melalui saling belajar dan tukar pengalaman antara program/kegiatan sejenisnya. (di dalam dan di luar Pulau Nusalaut)
- Untuk mencapai keberhasilan pendekatan jaringan Kelembagaan Kewang Negeri-Negeri di Nusalaut (K2N3) maka disusun Modul Pembelajaran, agar dapat membantu lembaga, program, kegiatan yang bekerja sama khususnya untuk mencapai 3 tujuan utama :

#### Tujuan Utama:

- Melaksanakan program/kegiatan dengan lebih efektif;
- Mempelajari secara sistimatis bagaimana strategi dan pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan lebih baik;
- Meningkatkan kemampuan anggota jaringan untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan kondisi lokal

Dukungan dalam meningkatkan kapasitas kewang masing-masing negeri yang dapat diberikan oleh jaringan Kelembagaan Kewang Negeri-Negeri di Nusalaut (K2N3) Meliputi : Perencanaan Program, Manajemen Program, Pemantauan , Analisis, Komunikasi

#### Model Konseptual

1. Suatu model konseptual adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara beberapa faktor yang diyakini dapat memberikan dampak atau saling mempengaruhi.
2. Model Konseptual tidak menyajikan semua faktor atau hubungan, tapi hanya faktor-faktor yang penting saja
3. Model Konseptual yang disajikan dalam dokumen ini menggambarkan kondisi umum, faktor-faktor dan asumsi-asumsi dalam konteks pengelolaan dan sasi konservasi sumberdaya laut dan pesisir di daerah tropis Indo-Pacific.
4. Dengan demikian, model konseptual ini bertujuan melukiskan kerangka kerja secara menyeluruh dan utuh;

### Model Konseptual



- Target adalah Faktor yang merupakan fokus dari program atau kondisi ideal yang diharapkan akan dicapai dalam waktu tertentu. Dalam diagram digambarkan oleh suatu lingkaran.
- Ancaman Langsung adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi target secara langsung. Dalam diagram digambarkan sebagai oleh segi empat
- Ancaman Tidak Langsung adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi atau mengakibatkan adanya ancaman langsung. Dalam diagram digambarkan oleh segi empat.
- Strategi adalah tindakan yang diambil untuk menjawab ancaman dan mencapai target. Dalam paket ini, semua proyek paling tidak menggunakan satu strategi Kelembagaan Kewang Negeri-Negeri di Nusalaut (K2N3). Proyek-proyek juga dapat menggunakan strategi dan instrumen konservasi serta pengelolaan sumberdaya lainnya. Dalam diagram digambarkan dengan segi enam (hexagon).
- Aktor adalah individu dan organisasi yang mempunyai keterampilan dan kapasitas/kemampuan untuk menerapkan strategi-strategi tersebut. Dalam diagram digambarkan oleh segi-4 lain.

Kesepakatan umum dengan lampiran-lampirannya :

1. Kami bekerja bersama-sama agar kegiatan kami mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk keberhasilan jangka panjang.
2. Kami berusaha untuk mencapai cita-cita Jaringan Kerja :
  - Membentuk kelompok praktisi (yang terdiri dari individu/perorangan maupun organisasi-organisasi KEWANG dan peneliti).
  - Mempunyai komitmen/kesungguhan dalam usaha bagaimana pengelolaan sumberdaya alam darat dan laut - pulau Nusalaut dilakukan dengan baik.
  - Untuk menunjang pengembangan sasi dengan cara saling berbagi pengalaman dan informasi.
  - Pendekatan yang disepakati dalam menangani isu dan masalah adalah menggunakan model konseptual
  - Kesepakatan ini berlaku sementara selama satu (1) tahun dan akan diperbaiki dikemudian hari untuk mendapatkan kesepakatan jangka panjang seterusnya.

3. Yang mewakili negeri-negeri di Nusalaut

AMETH, 30 SEPTEMBER

TANDA TANGAN

AMETH.....  
(W. D. PARINUSSA)




(RAJA NEGERI)

AKOON.....  
(J. T. WATTIMENA)



(RAJA NEGERI)

ABUBU.....  
(C. AUNALAL)




(SEKRETARIS NEGERI)

TITAWAI.....  
(A. SIAHAY)



(SEKRETARIS NEGERI)

LEINITU.....




(N. TANASADE)  
(SEKRETARIS NEGERI)

SILA.....  
(A. SOSELISSA)



(RAJA NEGERI)

NALAHIA.....  
(I. HETHARIE)



(RAJA NEGERI)



## 5. REKOMENDASI

### ➤ Masyarakat

- Perlu adanya penyusunan peraturan negeri di masing-masing negeri sebagai bagian dari upaya tindaklanjut dari kesepakatan-kesepakatan yang telah terbangun.
- Kelembagaan Kewang Negeri-Negeri Nusalaut (K2N3) merupakan jaringan kerja tingkat pulau yang perlu mendapat legitimasi penuh dari semua komponen masyarakat adat di pulau Nusalaut
- Kawasan Lindung dan wilayah-wilayah konservasi masyarakat harus dipahami sebagai bagian penting dalam pengelolaan kawasan hutan pulau kecil demi keberlanjutannya.

### ➤ Pemerintah

Dengan dimekarkannya Nusalaut sebagai kecamatan sendiri terlepas dari kecamatan Saparua, maka wilayah ini tidak dapat terhindar dari kegiatan pembangunan infrastruktur kecamatan serta percepatan pembangunan dari berbagai sektor. Sehubungan dengan ini, maka disarankan sebagai berikut :

- Mengingat Nusalaut merupakan pulau kecil maka pembangunan infrastruktur kecamatan sebaiknya tidak dipusatkan semata-mata di kota kecamatan.
- Setiap perencanaan pembangunan sebaiknya dilaksanakan secara partisipatif dengan menindaklanjuti hasil-hasil kajian dan pemetaan yang telah dilakukan masyarakat
- Perlu ada kebijakan yang dapat melindungi hak-hak masyarakat adat dan ulayatnya
- Legitimasi dari Pemerintah terhadap Forum K2N3

### ➤ NFP Facility

- Perlu ada fasilitasi dari pihak NFP-FAO terhadap program tindaklanjut terkait dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah terbangun di masyarakat
- Program yang akan dikembangkan oleh Pihak NFP-FAO, juga diarahkan untuk isu-isu penguatan masyarakat adat dan pengelolaan ekosistem pulau kecil.



## YAYASAN INLULINS

### PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM MANAJEMEN HUTAN BERKELANJUTAN UNTUK PENYEDIAAN AIR DI PULAU KEI KECIL

#### 1. PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Pulau Kei khususnya Kei Kecil (Bagian Selatan) merupakan wilayah pulau kecil yang sangat strategis dalam penyediaan air melalui muaranya di Desa Evu (Perusahaan Daerah Air Minum-PDAM Evu), tidak hanya bagi kepentingan masyarakat pedesaan pesisir dan Kota Langgur sebagai Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara hasil pemekaran (di Pulau Kei Kecil = Nuhu Roa). Tetapi juga bagi Kota Tual dan masyarakat Pulau Dullah yang dihubungkan dengan Jembatan USDEK. Namun secara alami Pulau Kei Kecil hasil angkatan terumbu karang muda Kala-Pleistosen (0,6-11 juta tahun silam) ini, sangat rentan terhadap degradasi hutan-tanah dan siklus air segar, guna mendukung pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang terus meningkat di tengah ancaman pemanasan global kini ke depan.

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa kapasitas pasokan air dari PDAM Evu dalam melayani kebutuhan masyarakat dan pembangunan di kota Langgur-Tual serta desa-desa sekitar, makin hari makin menurun. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya pasokan dan seringkali macet-macet, termasuk di hotel/penginapan para turis. Keprihatinan terhadap masalah air bersih ini pun disuarakan khusus oleh Ketua Tim Komisi C DPRD Maluku setelah kembali dari Kunjungan Kerja di Malra (Suara Maluku, 27/3/2007). Fenomena ketidaklestarian air yang terkait dengan pengelolaan dan penurunan kemampuan fungsi hutan (ketidakharmonisan alam) dan lemahnya masyarakat adat/desa pada kawasan hulu hingga muara Air Evu (Wear Masil) ini sangatlah memprihatinkan ke depan, jika tidak diselamatkan dari sekarang.

Antara lain melalui program-program yang mendukung terlaksananya manajemen hutan berkelanjutan guna memenuhi kepentingan masyarakat setempat, dan nasional-global, di masa kini maupun masa mendatang (Departemen Kehutanan dan GTZ, 2005). Ditegaskan bahwa *program* yang dimaksud di sini bukanlah program perencanaan pemerintah, tetapi merupakan proses dialog partisipatif (dari masyarakat setempat) menuju kesepakatan rencana pengelolaan hutan lestari. Makna kata *hutan* pun tidak terbatas pada sektor kehutanan saja, tetapi berkaitan pula dengan sektor-sektor lain secara holistik.

Sehubungan dengan partisipasi/keterlibatan masyarakat setempat termasuk kaum perempuan, maka pemahaman "kosmologi tradisional tentang realitas dunia sebagai harmoni alam semesta, adat istiadat, dan kenyataan hidup manusia dalam kerangka berpikir mitis, global/holistik, dan intuitif" (Yumarma, 2006) adalah penting. Dan

kiranya dapat diterapkan pada kawasan petuanan Kei Kecil Selatan lingkaran OHOIFUNWARMANEU (Ohoinol, Marfun, Warwut, Semawi, Letvuan, Evu). Hal mana secara ekologis, kerusakan hutan pada kawasan hulu (zona penyanggah) akan berdampak negatif pada sumber air di hilir Evu. Kerusakan hutan ini melibatkan Masyarakat Adat (*indigenous peoples*) dari desa-desa/ kampung atau *ohoi* setempat yang berbatasan. Masyarakat adat (~ *Nuhu Duan* dalam terminologi Kei) disini, dimengerti sebagai kelompok masyarakat yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai adat-istiadat rujukan yang diwariskan dari para leluhur; tatanan tradisi ini pun jadi rujukan pendatang-pendatang (*Marvutun*) entah sudah lama beberapa generasi ataupun yang baru.

Dalam paradigma lama, masyarakat adat/*ohoi* lebih sering dipandang sebagai agen perusak hutan, dan tidak memiliki pengetahuan tentang manajemen/pengelolaan hutan atau pentingnya hutan dan pepohonan bagi penghidupan (*livelihoods*) dan kesejahteraan mereka (MIPA, 2005; Envirocare, 2005). Sehingga pembangunan hutan/kehutanan bersama aneka rencana manajemen cenderung terfokus pada pandangan tersebut, dan mengabaikan partisipasi dalam aplikasi pengetahuan tradisional (*indigenous knowledge*) serta pengalaman-pengalaman arif yang dimiliki komunitas-komunitas pedesaan tersebut tentang manajemen hutan berkelanjutan. Akibatnya kearifan lokal mereka semakin pudar bahkan punah, dan menghambat pengelolaan hutan lestari. Padahal, jika bekerja bersama komunitas-komunitas *ohoi* dan sharing dengan mereka secara partisipatif-konstruktif tentang isu-isu lingkungan dan produk-produk budaya tradisional, akan dapat dipahami bahwa mereka telah mempraktekan manajemen hutan dan budaya tradisional selama turun-temurun, serta memiliki pengetahuan/pengalaman yang baik dan otentik, di mana dapat diaplikasikan bagi penghidupan menuju kesejahteraan lahir-batin berkelanjutan ke depan (secara ekologi-ekonomi-sosial budaya).

Hilang atau pudarnya pengetahuan tradisional (akar budaya Kei) berbarengan dengan erosi Bahasa Kei dan kerusakan hutan/deforestasi dan lingkungan yang berlangsung merupakan permasalahan aktual, yang cenderung diakselerasi oleh pertumbuhan penduduk yang cepat disertai kemiskinan, pertumbuhan pasar lokal dan pengaruh budaya materialis globalisasi, proses/prosedur pembangunan *top-down* sektoral (introduksi jenis tanaman/benih dan paket teknologi dari luar yang tidak adaptif misalnya) yang memarginalkan masyarakat adat demi percepatan pembangunan dan homogenisasi kultural. Pertumbuhan penduduk dan kemiskinan, disertai model pembangunan resentralis-top down yang tidak partisipatif dan tidak terintegrasi, serta lemahnya hukum, menyeret masyarakat adat setempat untuk membebani lahan petuanan dengan kegiatan pertanian dan eksploitasi hutan yang bermanfaat jangka pendek, melampaui paham kebahagiaan/kesejahteraan (dunia akhirat, material spiritual) dan praktek manajemen berkelanjutan tradisional yang berwawasan lingkungan.

Masyarakat adat dan komunitas-komunitas desa pada kawasan hulu tersebut baik lelaki maupun perempuan, cenderung kehilangan rasa percaya diri terhadap kemampuan manajemen tradisional mereka (seperti *Atuvun* & aneka produk budaya arif-kreatif) untuk menolong diri sendiri secara sustainabel. Mereka menjadi tergantung pada godaan solusi-solusi instan eksternal berjangka pendek dalam pemecahan problema kemiskinan yang dihadapi dengan cara mengeksploitasi sumber daya lahan petuanan (penebangan dan penjualan kayu, input kimiawi dengan pola pertanian monokultur berbasis varietas luar, obat-obatan kimia yang sarat efek samping). Dimana erosi dan banjir di musim hujan, berbarengan dengan degradasi sumber daya pesisir pulau, dan kekeringan di musim kemarau (krisis ketersediaan air), menjadi fenomena yang lasim kini.

Mengingat komunitas adat yang cenderung tergantung pada manajemen pembangunan eksternal (hasil rencana *top-down* sektoral) hingga kini, termarginal bahasanya sebagai media pengetahuan tradisional (mengalami degradasi/kepunahan

budaya) dan kurang kapabel dalam menangani problem hidup yang dihadapi serta implikasinya bagi kehidupan orang banyak, seperti kebutuhan air minum yang bermuara dan tersalur melalui PDAM Evu. Dengan kata lain, keputusan-keputusan perencanaan yang dibuat oleh "orang luar", semakin jauh dari kebutuhan masyarakat dan kebudayaan arif setempat, sehingga hasil dari program-program yang dilaksanakan tidak sesuai dalam pengentasan kemiskinan (perbaikan kesejahteraan) dan kesenjangan sosial serta degradasi lingkungan hidup.

Karenanya perlu dipromosikan model pendekatan perencanaan alternatif (dalam kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih) yang melibatkan para pihak/multi-stakeholders dari *governance* atau kelembagaan pembangunan setempat (masyarakat adat & *civil society* lain, wiraswasta, dan pemerintah daerah pada suatu Lokakarya/Workshop Perencanaan) guna menyepakati rencana strategis manajemen hutan berkelanjutan bagi penyediaan air termasuk pengentasan kemiskinan dan resolusi/prevensi konflik. Sifat perencanaannya adalah partisipatif, desentralis-bottom up berbasis pengetahuan/budaya tradisional dari masyarakat adat kawasan OHOIFUNWARMANEU, yang bermanfaat bagi semua penghuni pulau menuju pembangunan berkelanjutan untuk pulau kecil tersebut.

Agar *perencanaan strategis partisipatif* sebagai komponen penting dari Manajemen Hutan Berkelanjutan berbasis Pengetahuan Tradisional dimaksud, benar-benar merupakan titik masuk humanis di mana seluruh stakeholders terkait dapat melibatkan diri lewat SEMILOKA (Seminar dan Lokakarya) berdasarkan kebutuhan riil pada kawasan sasaran secara adaptif, maka perlu didahului dengan Penelitian Awal guna mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu kunci serta harapan-harapan yang perlu dipecahkan secara holistik. Hasil penelitian awal (pra-SEMILOKA) secara kualitatif ini, dapat dipakai untuk menentukan alternatif topik yang akan ditawarkan kepada peserta seminar dan lokakarya perencanaan strategis. Sutomo dkk. (2002) menegaskan, topik perencanaan ini sangat bermanfaat sebagai ruang lingkup program yang akan disusun, sehingga membatasi pembicaraan pada hal-hal yang kurang relevan dengan maksud dan tujuan kegiatan. Sedemikian sehingga pada akhir lokakarya perencanaan strategis tersebut, dapat menghasilkan serangkaian program terpadu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (OHOIFUNWARMANEU), nasional dan global, serta antar generasi (*Tuv Har Vit Ne Mav Derat* dalam term Orang Kei).

## 1.2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

### *Tujuan Umum (Goal)*

Kesejahteraan-kemandirian dan kenyamanan masyarakat lokal perempuan maupun lelaki pada kawasan OHOIFUNWARMANEU (Ohoinol, Marfun, Warwut, Semawi, Letvuan, Evu) serta masyarakat Pulau Kei Kecil dan Dullah umumnya diperbaiki, melalui manajemen hutan berkelanjutan bagi kelestarian tanah dan air berbasis pengetahuan tradisional masyarakat setempat.

### *Tujuan Khusus (Objectives)*

- a. Melakukan studi awal (*small research*) guna mengetahui permasalahan dan isu-isu kunci serta harapan kontekstual, berikut spirit pengetahuan tradisional masyarakat adat kawasan OHOIFUNWARMANEU Pulau Kei Kecil dalam manajemen berkelanjutan dari sumber daya hutan tanaman-tanah dan air yang rentan dan terbatas.
- b. Melaksanakan Seminar tentang Hasil Studi yang dilakukan beserta input makalah pendukung.
- c. Menyelenggarakan lokakarya tentang perencanaan strategis (konsensus visi dan rencana aksi bersama) guna meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam

manajemen hutan berkelanjutan bagi keselamatan sumber air dan kesejahteraan hidup.

- d. Mempublikasi dan desiminasi proses maupun hasil perencanaan aksi bersama yang dilakukan dalam mendorong perwujudan *good local governance*.

### 1.3. Output Yang Diharapkan

- a. Terlaksananya penelitian awal (*small research*) dalam menjaring/mendokumentasi data dan informasi tentang permasalahan yang dihadapi serta potensi pengetahuan tradisional di Pulau Kei Kecil kawasan OHOIFUNWARMANEU (terutama dari generasi tua perempuan & lelaki) yang berkaitan dengan manajemen hutan berkelanjutan dan cara-cara menggunakannya, bagi keselamatan sumber daya air (kelestarian hutan-tanah-air) serta sumber-sumber ekonomi kreatif dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat setempat dan melestarikan budaya lokal arif agar tidak punah.
- b. Terbangunnya kesadaran dan partisipasi publik terutama kepedulian masyarakat adat setempat tentang kegunaan akar pengetahuan/budaya tradisional dan perbaikan interaksi antar stakeholders (*strengthening local institution & human development*) bagi perlindungan dan manajemen hutan lestari, sekaligus termotivasi mengembangkan cara-cara dan produk budaya terbaik secara konstruktif berwawasan lingkungan khas Kei Kecil warisan leluhur.
- c. Terwujudnya partisipasi aktif dari semua stakeholders relevan dalam menyepakati (*consensus building*) rencana strategis yang memfokuskan visi-tujuan dan prioritas program aksi bersama dalam manajemen hutan dan sumber air berkelanjutan berbasis pengetahuan/budaya tradisional masyarakat setempat yang lebih kreatif-komprehensif dan berdampak positif terhadap kelestarian aspek-aspek kehidupan/kesejahteraan bersama lainnya pada pulau kecil, termasuk pariwisata.
- d. Terpublikasi dan terdiseminasi keseluruhan proses-hasil dan rencana aksi bersama, sebagai rujukan dan muatan lokal bagi semua pihak terkait dalam pengembangan sumber daya masyarakat adat dan penguatan institusi lokal pendukung manajemen hutan berkelanjutan berbasis lptek tradisional/ budaya arif Orang Kei bagi keselamatan sumber air, sekaligus pelestarian pesisir pulau kecil Nuhu Roa menghadapi ancaman pemanasan global ke depan.
- e. Terlembagakannya bentuk-bentuk sinergi pembaharuan multi-pihak/disiplin/dimensi yang inovatif-humanis bersama dinas pelayan publik terkait ke depan (jangka panjang) dalam pengelolaan hutan/ SDA partisipatif berbasis keunikan pengetahuan tradisional arif dari masing-masing lokalitas/ ekoregion, termasuk ketrampilan mengelola workshop (pendekatan kualitatif) dalam penanganan permasalahan publik secara holistik dan konvergen dengan semangat kebersamaan dan kesederajatan.
- f. Teraktualisasinya *good governance* yang mendayagunakan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan partisipatif terintegrasi yang adaptif dan lestari/berkelanjutan, secara ekologi-budaya-ekonomi-sosial maupun politik, dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang rentan pada pulau kecil seperti Kei Kecil dan Pulau Dullah serta Kepulauan Kei umumnya.

## 2. GAMBARAN UMUM LOKASI KEGIATAN

### 2.1. Penduduk

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Rasio

Kecamatan	2005				2006				2007			
	L	P	J	R	L	P	J	R	L	P	J	R
Kei Kecil	18.228	18.426	36.649	9,9	18.567	18.763	37.330	1,0	18.829	19.020	37.849	1,0
Kei Kecil Timur	5.049	5.120	10.169	1,0	5.147	5.225	10.372	1,0	5.314	5.385	10.699	1,0
Keterangan:	Rasio (R) = Laki-laki (L) / Perempuan (P)											
Sumber:	Maluku Tenggara Dalam Angka 2007											

### 2.2. Mata Pencaharian, Pendidikan, Pendapatan

Dari data penduduk pada Tabel 1, sebagian besar mata pencahariannya pertanian termasuk perikanan, hanya sekitar 10% yang berprofesi sebagai PNS (sipil maupun militer) dan 5% adalah wiraswasta yang kebanyakan bergerak pada sektor informal (UMK = Usaha Mikro-Kecil). Pendapatan mereka kebanyakan rendah dan berfluktuasi.

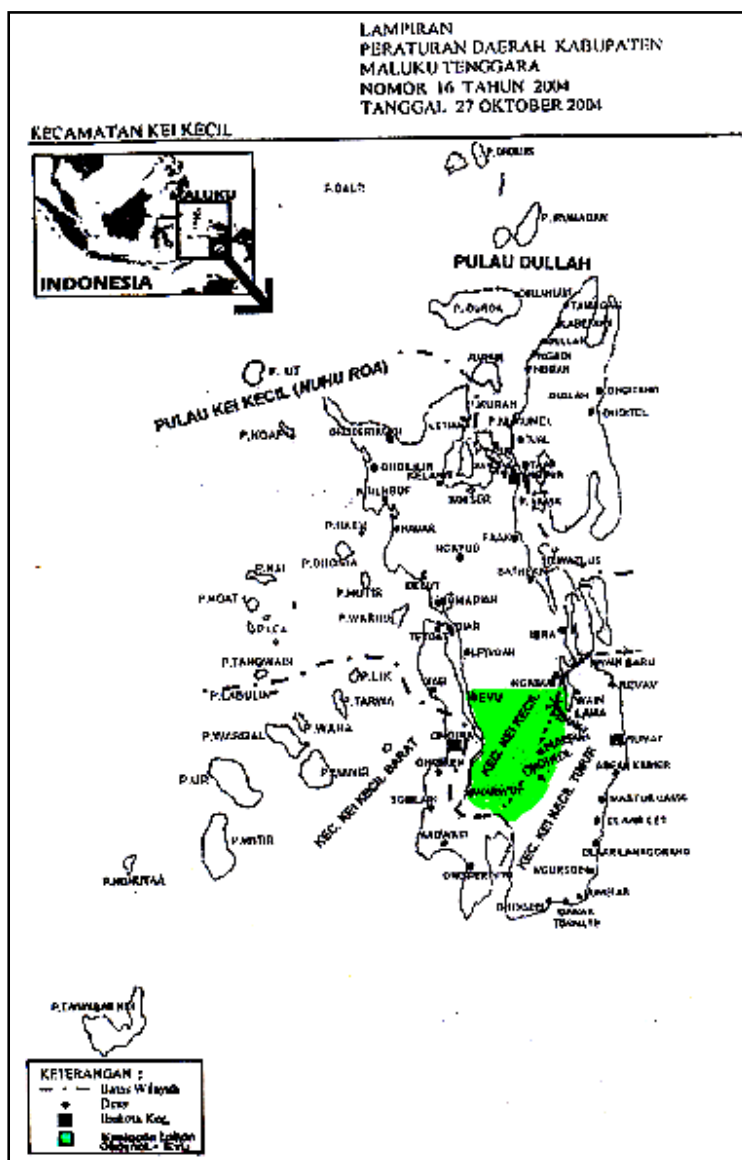
## 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

### 3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi sasaran studi mencakup enam (6) Kampung/Ohoi, yang melibatkan dua kecamatan di Pulau Kei Kecil, yakni Kecamatan Kei Kecil Timur dan Kecamatan Kei Kecil.

Waktu pelaksanaan penelitian awal (pra-SEMILOKA), mulai minggu ketiga dan minggu keempat Desember 2007 (Tahap pertama), minggu pertama sampai 19 April 2008 (Tahap konsolidasi), dan tanggal 20-22 April 2008 (Tahap validasi lapangan). Diikuti dengan Seminar sehari (23 April 2008) dan Lokakarya Perencanaan sehari (24 April 2008).

Gambar 1. Peta Situasi Pulau Kei Kecil dan Kawasan Studi



### 3.2. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Penelitian awal yang dilakukan (pra-SEMILOKA), menggunakan metode kualitatif berupa wawancara atau interview (RRA, PRA, In Depth), kelompok diskusi terfokus (FGD) dan observasi/survei lapangan secara partisipatif (Chambers, 1996; Irwanto, 1998; Selener et al, 1999; Stubenvoll, 2000; Adimihardja dan Hikmat, 2001; Sutomo dkk., 2002; Santoso, 2003; Sugiyono, 2007). Ciri dasar dari desain penelitian kualitatif ini antara lain, bersifat umum, fleksibel, berkembang, muncul dalam proses penelitian; dimana ada sedikit perubahan/ penyesuaian dalam Rencana SEMILOKA yang semula 3 hari menjadi 2 hari secara terpusat di Langgur, sedangkan 1 hari diimplementasi dalam bentuk FGD di 3 kampung.

Urutan kegiatan penelitian pra-SEMILOKA ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pertama

Dimulai setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh INLULINS sebagai Pihak Kedua. Pelaksanaannya pada minggu-minggu terakhir Desember 2007. Hasil penelitian tahap pertama pada kawasan 6 kampung (OHOIFUNWARMANEU) yang didasarkan, seperti terangkum pada Tabel 2.

b. Konsolidasi dan Mobilisasi

Merupakan tindak lanjut dari tahap pertama, pada minggu pertama-19 April 2008, meliputi:

- Pengecekan dan reformulasi selama kegiatan penelitian lapang tahap pertama terhadap permasalahan/problema utama (isu-isu pokok) dan harapan serta isu-isu kunci dalam manajemen hutan (*land use types*) berkelanjutan yang berbasis pengetahuan tradisional, hasil interpretasi data sekunder/pustaka dan *brainstorming* Tim INLULINS.
- Pemantapan dan pengelompokkan informasi beserta data relevan hasil studi lapang tahap pertama melalui Studi Pustaka dalam rangka memahami dan klarifikasi (pengerucutan) aspek-aspek permasalahan beserta isu-isu kunci temuan studi lapangan (Tabel 1).
- Pemantapan materi dan jadwal SEMILOKA, bersama fasilitator utama relevan yang bersedia yakni: akademisi senior berpengalaman luas dengan latar belakang Geografi Sosial dan paham tentang Kei mencakup aspek sosial-budaya (pengetahuan tradisional) maupun perencanaan strategis yang melibatkan multi-stakeholders secara partisipatif, penguatan institusi dan pengembangan sumber daya manusia.
- Pengadaan dan pendistribusian Brosur + Panduan SEMILOKA serta Undangan kepada Fasilitator Utama di Manado (Johannes Esomar, PhD) dan Mitra Fasilitator INLULINS yang terlibat; pendekatan lisan "disusul dengan" Undangan disertai lampiran Panduan/Brosur ke Pimpinan Daerah (Bupati MALRA) dan Kadis Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan Hidup, termasuk Undangan kepada Anggota DPRD dan Dinas-Dinas terkait (Tanaman Pangan, Koperasi dan UKM, Pariwisata, PDAM), Masyarakat Adat melalui 6 Kepala Kampung OHOIFUNWARMANEU (Ohoinol, Marfun, Warwut, Semawi, Letvuan, Evu), dan stakeholders terkait lainnya (wirausaha, para guru, rohaniawan dan rohaniwati).
- Mobilitas para fasilitator ke tempat pelaksanaan (menggunakan kapal laut + pesawat) dan akomodasi pada penginapan di Langgur (Wisma Matahari), kordinasi dengan tim pendukung lokal, serta pemantapan persiapan pelaksanaan (konsumsi, gedung/aula, tema dan dekorasi, sound system, multi media, pembawa acara dan pemeran lain, moderator + notulis, daftar hadir dan kuitansi untuk transpor utusan masyarakat adat, ATK, kertas flap + spidol, transportasi lokal: mobil dan motor).

c. Validasi Lapangan

Kegiatan penelitian lapangan tahap kedua ini ke lingkaran kawasan OHOIFUNWARMANEU pada tanggal 20-22 April 2008, dimaksudkan untuk mengkonfirmasi temuan-temuan (permasalahan, isu-isu kunci dan harapan-harapan) yang telah diformulasi, dan *up dating* rumusan bagi penelaan lanjutan pada SEMILOKA. Melalui tahap ini, diharapkan dapat dihasilkan rumusan permasalahan dan upaya-upaya pemecahan yang tepat guna, efektif dan valid.

Survei lapangan yang dilakukan menggunakan metode gabungan yakni RRA (*Rapid Rural Appraisal*), PRA (*Participatory Rural Appraisal*), FGD (*Focus Group Discussion*), atau Wawancara informal *unstructured* dengan stakeholders utama masyarakat adat (selain wirausaha & pemerintah). Dalam penelitian kualitatif ini, tim peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dengan fokus pertanyaan kunci yang melahirkan banyak



pertanyaan secara interaktif, dalam menggambarkan (memperoleh gambaran tentang) realitas yang kompleks, yang direkam menggunakan *handycam* dan camera digital. Keseluruhan kegiatan penelitian lapangan ini meliputi:

#### Koleksi Data

- Wawancara dengan stakeholders menyangkut detail peran keseharian dalam manajemen hutan, permasalahan dan kesulitan yang dihadapi, kekuatan dan pengalaman mereka tentang pengetahuan tradisional (budaya arif) relevan serta bagaimana internalisasinya di dalam strategi mereka, interest untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan, dan kontribusi-kontribusi yang dapat diberikan.
- Kunjungan Tim ke petuanan kampung dan wawancara dengan masyarakat adat perempuan dan lelaki guna mengolah informasi dan fakta umum (gambaran fisik) terkait seperti: kualitas dan debit air secara kualitatif, pola penggunaan lahan dan kecenderungan perubahan dari tahun ke tahun, program-program pemerintah dalam upaya konservasi hutan di petuanan kampung termasuk kawasan sumber air dan keterlibatan masyarakat dalam program tersebut, contoh-contoh lokasi yang terkonservasi baik (hutannya rindang) dan tidak diganggu oleh masyarakat kampung serta masyarakat umumnya karena kepercayaan/pengetahuan tradisional dan bukan karena anjuran pemerintah (lokasi Nen Dit Sakmas misalnya), kerajinan-kerajinan dan aneka produk budaya lokal kreatif yang berhubungan dengan hasil hutan dan pertanian secara umum, kesejahteraan dan pertumbuhan penduduk, dll.
- Menelaah permasalahan dan isu-isu beserta harapan yang muncul, dimana tekanannya pada identifikasi aksi yang mereka ingin untuk diimplementasi guna memperbaiki praktek pengelolaan yang berkelanjutan dari hutan dan sumber daya alam terkait secara tradisional (*yamad ubud*) maupun formal.
- Konfirmasi dan konsultasi validatif.

#### Analisis dan Umpan Balik

- Analisis data penelitian tahap pertama (permasalahan dan isu-isu kunci, harapan-harapan sukses, potensi dan peluang menuju identifikasi alternatif solusi) dimulai dari lapangan bersama stakeholder sebagai bagian dari proses partisipatif. Analisa lanjutan dilakukan oleh Tim INLULINS (Fasilitator), dimana data kualitatif dan kuantitatif dipresentasi dalam teks, tabel, gambar-gambar dalam laporan prelimener, selain telaah pustaka.
- Kunjungan balik Tim ke area studi dan bertemu dengan stakeholders guna mensharing hasil analisis temuan tahap pertama, serta memperoleh umpan balik (validasi). Selama tahap kedua ini, hasil-hasil didiskusikan, permasalahan diidentifikasi/reformulasi dan isu-isu difokus, serta ide-ide dan rencana-rencana bagi aksi berkelanjutan ke depan dimunculkan. Setiap umpan balik dari komunitas adat/stakeholders adalah hal penting dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan *feeling* tentang kepemilikan program dan aksi implementasi (*ownership*).

#### Pelaporan Hasil Penelitian

- Mengingat penelitian awal yang dilakukan ini adalah dalam rangka penyusunan program aksi sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan riil yang ada di kawasan OHOIFUNWAMANEU secara tepat guna, maka hasil yang diperoleh dapat dijadikan pilihan topik dalam perencanaan strategis yang akan digumuli lebih lanjut dalam Seminar dan Lokakarya.
- Jadi, umpan balik yang diperoleh pada tahap kedua (validasi), direformulasi dalam topik-topik yang telah disusun, dan didiskusikan kembali dalam Seminar sehari guna

mengkristalisasi arah, serta mensistimatisasi/menyusunnya menjadi Rencana Strategis dengan fokus visi dan prioritas program yang tidak lebih dari lima tahun (dapat juga mengindikasikan sasaran operasional untuk tahun pertama) dalam Lokakarya Perencanaan.

d. Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA)

SEMILOKA tentang "Pengetahuan Tradisional Dalam Manajemen Hutan Berkelanjutan Untuk Penyediaan Air Di Pulau Kei Kecil" ini direncanakan berlangsung dalam 3 hari, dimana pelaksanaannya bersifat fleksibel sesuai perkembangan di lapangan. Yakni hari pertama (22 April 2008), diimplementasikan dalam bentuk FGD (dan wawancara mendalam) pada 3 kampung guna menyerap/merefokus/memvalidasi isu-isu serta ide-ide dan rencana aksi ke depan dari kebanyakan masyarakat adat yang sibuk dengan aktivitas keseharian, dan tidak dapat hadir (meninggalkan kampung) ke Langgur selama 2 hari. Dalam rangka mengikuti SEMILOKA dengan jadwal yang ketat pada tanggal 23-24 April 2008, untuk mengkristalisasi/memfokuskan arah dan orientasi ke depan, serta mensistematiskan/menyusun atau merencanakannya dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk memecahkan permasalahan pada kawasan OHOIFUNWARMANEU. Strategi yang direncanakan merupakan prioritas atau arah keseluruhan yang luas/holistik serta disepakati oleh para stakeholders, pilihan tentang cara-cara terbaik untuk mencapai visi bersama dalam beberapa tahun ke depan (tidak lebih dari lima tahun).

Terakhir, menuliskan gagasan Renstra yang disepakati/direkomendasi sebagai dokumen resmi, yang merefleksikan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat adat OHOIFUNWARMANEU bagi pembangunan berkelanjutan pada zona/kawasan petuanan mereka. Dokumen rumusan/rekomendasi Rencana Strategis ini (Allison dan Kaye, 2005) harus memberi pendidikan dan bimbingan, sehingga semakin padat dan teratur dokumen itu akan bermanfaat dalam memandu operasi-operasi dari stakeholders terkait. Dijelaskan bahwa bagi proses perencanaan strategis yang singkat, dokumen Renstra-nya boleh jadi tidak lebih dari 3-8 halaman yang mencakup: rumusan misi/visi, ringkasan strategi inti, dan daftar prioritas program jangka pendek dan panjang serta prioritas manajemen/operasi-operasi jangka panjang dan pendek. Dengan catatan: idealnya, ide-ide besar sudah diperdebatkan (Seminar) dan diselesaikan (Workshop), sehingga perbaikan (rumusan) hanya merupakan masalah kecil menambah detail, merevisi format, atau mengubah kata-kata di bagian tertentu.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Studi Awal

Tabel 2. Rangkuman Identifikasi Masalah Pokok, Isu-Isu Kunci (Aspek Masalah)

No	Isu-Isu Kunci (Aspek-Aspek Masalah)	Masalah/Isu Pokok
1	Deforestasi akibat pembalakan, pengggajian dan penjualan kayu legal dan ilegal; belum ada ketentuan untuk DAS/mata air.	Ekologi/ Lingkungan Hidup
2	Keterbatasan air untuk kebutuhan keluarga dan pertanian (air sungai) baik jumlah maupun kualitas (keruh dan kotor di musim hujan, kering di musim kemarau) dari tahun ke tahun.	
3	Erosi tanah, disertai longsor pada tepi sungai tertentu.	
4	Pemburuan yang sewenang-wenang terhadap Kus-Kus ( <i>Medar</i> ), Pombo ( <i>Tarut-Kamun</i> ), Kaka Tua, Lebah ( <i>Wanan</i> ), Maleo ( <i>Kilwar</i> ), dan degradasi lingkungan.	
5	Pembakaran/kebakaran ( <i>Angrat</i> ), pengambilan kayu bakar, penggantian kayu unggulan lokal ( <i>Ai Fra, Der</i> , dll) dengan Jati dari luar, erosi dan kepunahan biodiversity (sumber pangan dan obat Kei); kebergantungan & ketidakpercayaan pada petugas.	
6	Deforestasi jadi kebun monokultur jangka pendek selain Ubi Kayu/Enbal (terutama sayuran untuk dipasarkan ke Langgur-Tual). Apalagi kait orang, dia bebas walau pada bantaran DAS.	Ekonomi/Agroekonomi (Agribisnis)
7	Praktek kebun diversifikasi/inter-cropping tradisional bertanaman umur panjang mode <i>Atuvun</i> (agrofores tradisional mode Kei) yang alami dan berdaulat dalam bibit (produksi sendiri) serta pangan organik, dirubah ke monokultur jangka pendek berbasis input luar yang mahal dan merusak (tanah, air, tanaman, kesehatan manusia) mulai dari bibit-pupuk dan pestisida kimiawi.	
8	Tanah dangkal dan rendah kesuburan, kekurangan bahan organik atau humus (terbakar) sekaligus kekurangan air (kelembaban), berdebu dan mengotori udara ( <i>tanbul</i> ) di musim kering, dan tererosi di musim hujan.	
9	Produksi dan harga jual bahan mentah rendah ( $\approx$ pendapatan) serta fluktuatif, tingginya biaya input pertanian dan biaya hidup.	
10	Sistim tebas-bakar-tanam dengan periode bero/istirahat ( <i>kait</i> ) yang pendek, menyebabkan lahan cenderung gersang ( <i>navibut</i> ), bahkan berlobang dan merosot akibat pengambilan tanah kapur ( <i>tanat rohat, vatrohat</i> ).	
11	Terbatasnya peluang aktivitas <i>off-farm</i> (subsistem Agribisnis setelah panen hasil), bahkan tidak nampak sama sekali industri pedesaan (agroindustri) meliputi agrowisata atau agroturisme. Industri kerajinan bambu dan tikar, wisata Mandi air tawar di Evu, tempat Pemakaman <i>Tebtut</i> di hutan pesisir pantai Letvuan, dan tempat Pemakaman Nen Dik Sak Mas yang berhutan sekunder di dekat Semawi, dll belum terkelola secara profesional	Ekonomi/Agroekonomi (Agribisnis)
12	Pangan lokal terdesak oleh RASKIN, obat tradisional terdesak oleh obat generik pabrikasi dan produk luar lain sesuai anjuran dan resep dokter	

No	Isu-Isu Kunci (Aspek-Aspek Masalah)	Masalah/Isu Pokok
13	Usaha sektor jasa lainnya yang mengurangi tekanan terhadap daya dukung lahan pertanian baru sebatas Usaha Kios kebutuhan harian pada keenam kampung.	
14	Lembaga keuangan pendukung usaha dan kehidupan masyarakat yang ada, baru terbatas pada <i>Credit Union</i> (CU) atau Koperasi Kredit (Kopdit) seperti jaringan CU AHA di Semawi, Ohoinol, Marfun, dan lain-lain.	
15	Lemahnya daya dukung ekonomi lahan petuanan yang ada, berbarengan dengan pudarnya daya dukung sosial budaya beserta spiritualitas tradisional, dimana secara simbolik memberikan makna khas yang dapat dihayati dan dijadikan rujukan bersama.	
16	Kerusakan sosial: menurunnya saling percaya, pentingkan diri sendiri, mental pengemis-kuli dan tipu-tapa, mabuk dan kacau, "dagang hukum adat", krisis kepemimpinan masyarakat, sulit kompak dan mudah pecah/konflik, keranjingan pesta dan konsumeris, berpikir parsial jangka pendek.	Sosial Budaya
17	Kebanyakan nilai-nilai dan ajaran sosial budaya arif yang ada cenderung disampaikan atau ditutur secara lisan lewat Bahasa Kei yang cenderung dilupakan dan diganti dengan logat "Gaul TV"; beberapa dokumentasi yang ada bersifat tematis dan terbatas.	
18	Menurunnya partisipasi masyarakat adat dalam koperasi dan organisasi berbasis masyarakat ( <i>community-based</i> ).	
19	Rencana pembangunan cenderung <i>top-down</i> sektoral yang tidak terintegrasi dan terkordinasi; ketidakpercayaan pada petugas instansi teknis (birokrasi).	Institusi dan Sumber Daya Manusia (Pendidikan)
20	Ketiadaan rencana pengembangan khusus untuk area petuanan hutan yang ada, termasuk zonasi tipe penggunaan lahan lain dalam batas petuanan masing-masing kampung.	
21	Tidak memiliki akses untuk menjangkau sumber-sumber finansial dan usahawan sebagai mitra usaha ekonomi rakyat.	
22	Anak-anak kampung dari SD-SMP-SLTA yang fasih Bahasa Kei, justru tidak ditingkatkan dan dilestarikan secara formal di sekolah malah diganti sepenuhnya oleh Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing (di didik menjadi orang asing = <i>Marvutun</i> menurut istilah Kei atau Orang <i>Amber</i> menurut bahasa Papua).	
23	Tidak ada fasilitas yang menunjang pelestarian pengetahuan/budaya tradisional dan pengembangan SDM Orang Kei (Sanggar Budaya, Museum, Perpustakaan misalnya).	

## 4.2. Pelaksanaan Seminar

### 4.2.1. Penyajian Makalah

Ada tujuh makalah yang disajikan, terdiri dari dua Makalah Utama, dan lima Makalah Penunjang, dengan judul-judul sebagai berikut:

#### Makalah Utama

- a. PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM MANAJEMEN HUTAN BERKELANJUTAN UNTUK PENYEDIAAN AIR DI PULAU KEI KECIL  
Oleh Conradus Ufie, Ketarina Esomar, Refael Marthinus Osok, Joseph A. Ufi, Rhony E. Ririhena, Kosmas Rahado (TIM INLULINS)
- b. KEBIJAKAN MANAJEMEN HUTAN UNTUK KAWASAN SEKITAR OHOINOL SAMPAI EVU, PULAU KEI KECIL (Pengembangan Materi SAMBUTAN)  
Oleh J. Nahusona (DISHUTBUN-LH MALRA)

#### Makalah Penunjang

- c. PROTEKSI AIR SEGAR MELALUI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAHAN-HUTAN DAN PESIR MENUJU PEMANFAATAN PULAU KECIL BERKELANJUTAN  
Oleh Rafael Martinus Osok (YAYASAN INLULINS)
- d. PENGEMBANGAN AGROFORESTRI DAN AGROWISATA BAGI KEBERLANJUTAN HIDUP DI KEPULAUAN KEI  
Oleh Kosmas Rahado (YAYASAN INLULINS)
- e. PERTANIAN BERKELANJUTAN, PANGAN TRADISIONAL, DAN KEMANDIRIAN PULAU KEI KECIL DALAM GUGUS PULAU  
Oleh Rhony E. Ririhena (YAYASAN INLULINS)
- f. UKM PRODUK BUDAYA KREATIF DAN LEMBAGA KEUANGAN MASYARAKAT CREDIT UNION  
Oleh Conradus Ufie (YAYASAN INLULINS)
- g. CATATAN TENTANG SUMBERDAYA ALAM PULAU KECIL TERMASUK PULAU KEI KECIL DAN TANTANGAN KESEJAHTERAAN HIDUP  
Oleh Johannes Esomar (UNIVERSITAS NEGERI MANADO)

### 4.2.2. Identifikasi Arah dan Prioritas Hasil Seminar

Diskusi dan perbincangan yang berlangsung selama Seminar mengindikasikan arah baru dan prioritas strategi dalam manajemen kawasan yang berkelanjutan ke depan. Hasil identifikasi dan rangkumannya sebagai berikut:

- Isu EKOLOGI (Lingkungan Hidup), aspek-aspeknya meliputi:
  - Hutan (flora-fauna), tanah dan air
  - Tanaman andalan khas kampung
  - Agroforestri dan pertanian organik
  - Flora-fauna/tanaman endemik potensi alam Kei
- Isu EKONOMI, aspek-aspeknya meliputi:
  - Pendapatan
  - Pola pangan tradisional (enbal, dll) vs RASKIN
  - Usaha tanaman pangan, herbal (obat-obatan) tradisional
  - Agrowisata/agroturisme (pariwisata)
  - Pemasaran dan jaringan pasar
  - Pendanaan (CU, donatur, dll)
- Isu SOSIAL-BUDAYA, aspek-aspeknya meliputi:
  - Pengetahuan tradisional dalam manajemen sumber daya alam
  - Aset sejarah kampung (*Nen Dit Sak Mas, Tebtut, Ngus Mayas*, dll)

- Pakaian adat, tari-tarian, upacara adat, dll
- Sanggar seni budaya, taman budaya Kei
- Isu PENDIDIKAN, aspek-aspeknya meliputi:
  - Muatan lokal-kurikulum
  - Bahasa daerah (Bahasa Kei)-pepatah, legenda atau cerita-cerita sejarah, kamus
  - Museum Kei
  - Perpustakaan daerah (khususnya koleksi tentang Kei)
- Isu GENDER, untuk semua isu yang disebutkan di atas

### 4.3. Pelaksanaan Workshop

#### 4.3.1. Pembagian Kelompok dan Pertanyaan Diskusi

Peserta kemudian dibagi dalam 5 kelompok berdasarkan kelompok isu/aspek masalah (dalam bentuk pertanyaan) guna mendiskusikan usulan strategi dan sasaran pemecahan. Diikuti dengan penjelasan tentang maksud pertanyaan yang perlu dijawab dalam Diskusi Kelompok, yakni:

##### Kelompok I :

1. Apakah ada tindakan-tindakan anda yang mencerminkan pengetahuan tentang pelestarian/ keberlanjutan fungsi hutan, tanah dan air?
2. Apakah perlu dilakukan peta batas wilayah dan tata guna lahan di wilayah Ohoinol-Evu?
3. Apakah hasil pemetaan ini perlu didukung dengan PERDA yang berbasis masyarakat?
4. Apa saja tanaman andalan khas di dusun/desa anda?
5. Apakah terdapat pola kombinasi tanaman (umur panjang, umur pendek) di desa/dusun bapak?
6. Bagaimana peran perempuan dalam pelestarian:
  - a. Sumberdaya hutan-tanaman/biodiversiti, tanah, dan air?
  - b. Pengetahuan tradisional yang ada?

##### Kelompok II :

1. Dari mana sumber pendapatan anda/keluarga selama ini?
2. Apakah cukup untuk menjamin kehidupan keluarga? Apakah sumber pendapatan ini sudah termasuk usaha kerajinan? (kerajinan apa saja?)
3. Jenis pangan/obat tradisional apakah yang dikonsumsi?
4. Apakah jenis pangan/obat tradisional tersebut perlu dipertahankan dan dikembangkan?
5. Bagaimana peran perempuan dalam pelestarian:
  - a. Sumberdaya hutan-tanaman/biodiversiti, tanah, dan air?
  - b. Pengetahuan tradisional yang ada?

##### Kelompok III :

1. Seandainya RASKIN dihentikan bagaimana pendapat anda?
2. Apakah upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memasarkan hasil-hasil usaha anda?
3. Bagaimana usaha anda untuk memperoleh dana penunjang usaha anda?
4. Bagaimana peran perempuan dalam pelestarian:
  - a. Sumberdaya hutan-tanaman/biodiversiti, tanah, dan air?
  - b. Pengetahuan tradisional yang ada?

##### Kelompok IV :

1. Apakah tindakan anda untuk melestarikan bahasa Kei dan pengetahuan tradisional?

2. Sebutkan aset sejarah (lokasinya) di desa anda dan apakah tindakan anda untuk melestarikan aset-aset tersebut?
3. Sebutkan pakaian adat, tari-tarian, upacara adat yang ada?Kapan digunakan?
4. Apakah perlu dibuat sanggar budaya demi melestarikan pakaian adat, tari-tarian dan upacara-upacara adat diatas?
5. Bagaimana peran perempuan dalam pelestarian:
  - a. Sumberdaya hutan-tanaman/biodiversiti, tanah, dan air?
  - b. Pengetahuan tradisional yang ada?

#### Kelompok V:

1. Apakah pengetahuan-pengetahuan tradisional yang ada perlu dilestarikan melalui pendidikan formal?
2. Apakah perlu bahasa Kei diajarkan di sekolah?
3. Apakah perlu dibuat Museum Kei demi melestarikan aset sejarah Kei ?
4. Apakah perlu dibuat perpustakaan untuk mengumpul semua informasi dan hasil-hasil penelitian tentang Kepulauan Kei?
5. Sebutkan potensi objek wisata yang ada di desa anda?
6. Bagaimana peran perempuan dalam pelestarian:
  - a. Sumberdaya hutan-tanaman/biodiversiti, tanah, dan air?
  - b. Pengetahuan tradisional yang ada?

### 4.3.2. Hasil Diskusi Kelompok dan Pleno

#### Kelompok I :

1. - Perlu adanya penanaman pohon-pohon serta menjaga dan melindungi hutan  
- Dibuat peraturan desa untuk melindungi hak-hak masyarakat
2. Itu sangat perlu, karena apabila tidak ada peta batas wilayah dan tataguna maka akan terjadi penebangan hutan secara sembarangan dan peta ini bukan saja hanya untuk desa Ohoinol dan Evu saja tetapi untuk semua desa
3. Juga sangat perlu, desa membuat peraturan desa dan disetujui serta diperkuat oleh perda, sehingga aturan desa itu mempunyai hukum yang kuat dan dapat menjamin hak-hak masyarakat, sehingga tidak ada pelanggaran yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri
4. Tanaman-tanaman itu dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu :
  - Tanaman umur panjang, seperti :
    - Kelapa
    - Lemon
    - Nangka
    - Mangga, dll
  - Tanaman umur pendek, seperti :
    - Enbal
    - Talas
    - Kacang-kacangan
    - Sayur-sayuran
    - Padi Gogo (Padi Merah), dll
5. Ya, memang ada kombinasi, karena dalam suatu lahan atau kebun di tanam berbagai macam tanaman, baik tanaman umur pendek, maupun tanaman umur panjang
- 6a. Sumber daya hutan, tanah dan air  
Perempuan mempunyai peran juga dalam masyarakat untuk menjaga hutan dan lahan serta mempunyai peran dalam mengelola hasil lahan itu sendiri :
  - Kerajinan tangan

- Reboisasi hutan kembali
  - Menentukan lahan untuk suatu kebun
- b. Pengetahuan tradisional
- Berdasarkan sejarah adat Kei bahwa Dit Sakmas adalah salah satu tokoh perempuan yang memperkenalkan *Hawear* kepada kita.
- Untuk itu tradisi *Hawear* harus harus dipertahankan sehingga perempuan bukan saja ada di belakang forum tetapi perempuan juga harus tampil sebagai orang yang berperan dalam memutuskan suatu aturan adat

#### Kelompok II :

- 1a. Dari hasil bercocok tanam seperti: ketela (enbal), umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran
- b. Usaha-usaha lain seperti: nelayan, wiraswasta, kerajinan tangan (hasil anyam-anyaman), misalnya: ayak-ayakan (kaler), nyiru, keranjang, tikar, bubuk, anyaman atap rumah (ravat), ngov, kabulin, bis (tempat tembakau). Ngel dan luv (tas orang tua-tua) ada sedikit-sedikit tetapi untuk digunakan sendiri
- 2a. Belum cukup, alasannya karena faktor musim, lahan, dan harga pasar yang tidak tetap
  - b. Usaha kerajinan tangan belum jalan baik dan profesional (kaler, baku, luv, bis, dll yang dibuat, hanya meneruskan cara-cara tradisional)
  - c. Usaha mandiri belum ada
- 3a. Tanaman pangan (*wad banau*): enbal (ketela), umbi-umbian (enmav, bo'o & tanvuun = ronan, ronvatu, tua, en, manad), buah-buahan (muu, kustel, fau ayai, nur, wasan, uar, umuun, hukun, mayel, ingyan, kamor), sayur-sayuran yang ditanaman maupun dari hutan (huk kalir, sos, af'ut, sukalvovo, ngeng, lavetar) bersama binatang atau *wad* lain (vav yaat, tarut kamun, medar, kilwar, yabar bubuut, buu rubai, langar, nguran, aloat, ngar-ngar, kabin)
  - b. Tanaman Obat Tradisional seperti :
    - Untuk kaum perempuan :
      - 1). Pada masa hamil, obat tradisional yang dikonsumsi adalah: bida ful, ngir-ngir, lantiva, waranlanit, bakurung
      - 2). Sesudah melahirkan, obat tradisional yang dikonsumsi adalah: ngifat, ngungus, kasdat, or, kasis, kaniv, lakdanan, yat
    - Untuk kaum laki-laki, obat tradisional yang dikonsumsi seperti: yanar (kayu susu), rahai (akasia), rot, envul kadel
    - Untuk anak-anak, obat tradisional yang dikonsumsi seperti: kastad, ai haruf, kamatil vuan
    - Untuk umum, obat tradisional yang dikonsumsi seperti: ingroam (daun kayu linggua untuk sakit demam), daun pisang muda (muu lohor, untuk menurunkan panas tinggi), kabus roam (daun kapok, untuk menurunkan panas tinggi), la'ur (gelobe, untuk menurunkan panas), ada juga orang tua yang gunakan lebah madu (wanan)
4. Perlu dipertahankan dan dikembangkan, sebab merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarikan dan digunakan, serta didayagunakan bagi kelangsungan hidup. Termasuk pencuci rambut/sampo tradisional (veat-warun, selain bakurung (cuci pakian)), wangi-wangian dengan bunga kenanga, dan perawatan rambut dengan minyak kemiri & kenari
5. Perempuan harus berperan aktif dan bertindak :
  - Tutur manoman dalam menyampaikan aspirasi yang baik untuk melestarikan sumber daya hutan tanah dan air



- Motivator dalam memberikan dorongan/semangat untuk mempergunakan sumber, daya hutan, tanah, air secara baik bagi kelangsungan hidup memiliki kreasi mengelola sumber daya hutan, tanah, dan air
- Memiliki kreasi dalam mengelola sumber daya hutan, tanah, dan air
- Mampu menerapkan hawear untuk menjaga dan melestarikan sumber daya hutan, tanah, dan air

#### Kelompok III :

1. Ada dua sisi, yaitu :

##### Sisi Pertama

Tidak berpengaruh, karena sudah ada makanan tradisional yang telah menghidupkan masyarakat (lebih khusus Kei)

Contoh : Enbal, Kasbi, Sagu, Ubi, Petatas, dll

##### Sisi Kedua

Pengaruh sisi ekonomi

Contoh : Raskin dapat dijangkau oleh seluruh komponen masyarakat teristimewa masyarakat ekonomi lemah), bila dibandingkan dengan jenis beras lain yang terjual di Pasar

##### Saran Kelompok :

Pemberdayaan masyarakat untuk menanam padi ladang demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri

2. Survei Pasar tujuannya mengecek harga barang yang sama yang datang dari luar daerah dengan hasil milik kita

Contoh: Kacang : Tanah, Hijau

⇒ kemudian kita memberikan patokan harga

##### Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memasarkan hasil usaha :

Terobosan pasar bukan hanya di pasar lokal Tual tetapi sudah merambah ke pasar luar daerah Tual bahkan sampai di Pasar Internasional seperti di Belanda

Contoh: Embal dikemas dalam bentuk yang menarik simpati para pembeli (konsumen)

3. - Tradisi *maren* (gotong royong)
- Pinjaman (pengembalian dengan bunga), contoh : Koperasi (Swasta)
4. a. Sumber daya hutan, tanah dan air  
Pembentukan kelompok Pemberdayaan perempuan
- b. Pengetahuan Tradisional  
Pengembangan Kerajinan tangan tradisional  
Contoh : Tikar, Seloy, Keranjang, Nyiru, Ayakan  
Bahannya dari hasil pelestarian hutan yang melibatkan kaum perempuan seperti; Rotan, Pohon tikar (Karin, Da), serta bambu

#### Kelompok IV :

1. Tindakan pelestarian

- Dilestarikan mulai dari keluarga
- Pendekatan kepada "para pakar" bahasa Kei oleh generasi muda
- Menghimbau generasi muda agar mengikuti dan mendengar lagu-lagu daerah yang sudah beredar dan berkembang lewat rekaman kaset-kaset video demi penghayatan
- Dimasukan dalam lembaga pendidikan
- Terbit Kamus Bahasa Ke
- Peneliti dalam dan luar negeri yang mau masuk untuk meneliti masalah sosial budaya masyarakat Kei Kecil harus menunjukkan surat ijin meneliti sampai pada tingkat kampung

## 2. Aset-aset Sejarah

### Desa Levuan

- Kuburan Raja Ohoivur
- Arca dari Raja Kasdew dan Permaisuri
- Sebuah mas yang disebut "Mas Nang" karena bentuknya seperti Naga di keluarga Tawurutubun
- Luv Mol yang sekarang ada di keluarga Inuhan
- Mas Aweman yang disampaikan oleh keluarga Rumlus

### Desa Evu

- Lokasi "Wearden", ± 2500 m ke darat tempat Soa Wol bertemu dengan Nen Mas II yang dipercaya berubah wujud sebagai air yang mengalir ke Desa Evu (PDAM MALRA)
- Sebuah mas yang disimpan, namanya "Siran Tafngil", disimpan oleh keluarga Elmas

### Desa Semawi

- Tempat Makam Nen Dit Sakmas

### Desa Marvun

- Kuburan Leluhur Balyang yang mati di atas batu, tulangnya masih utuh sampai sekarang

### Desa Warvut

- Tempat tinggal Nen Mas Kaun

### Desa Ohoinol

- Ngus Mayas (ada juga jamur unik "Sukalvovo" yang hanya muncul/dipanggil dengan lagu khusus; "Wear Lian" yang dipercaya sebagai tempat *Aloat*/Belut yang berhubungan dengan Tanebar Evav; dan "Rubilus" yang berhubungan dengan Tutrean-Kei Besar).

*Tindakan Pelestarian:* dibuat suatu keputusan desa untuk menjaga dan melindungi aset-aset tersebut

## 3. Pakaian Adat, Tari-Tarian, Upacara Adat yang ada

- Pakaian Adat
  - Untuk Wanita* : Kamum dan Sbo Lib-Lib serta Ravit Seting
  - Untuk Pria* : Kamum pendek dengan ikat kepala (Rik-Rikat)
- Tarian Adat :
  - Sosoi
  - Tari Perang (Temar-Rubil, Katar-Sbad) dengan iringan varsukat
  - Sawat (Tiva Sawat)
  - Sul, dengan iringan Tiva Nam
  - Ngel-ngel, baut atnanit
- Upacara Adat
  1. Rinin (upacara penerimaan tamu-tamu kehormatan, "Orang Baru", akhir peristiwa kematian, kembalinya anak-anak desa dalam menyelesaikan pendidikan tertentu apalagi datang bersama seorang istri dari luar daerah
  2. Voryav
- Penggunaan
  - Disesuaikan dengan situasi/kondisi tertentu, seperti :
    - Upacara perdamaian
    - Dan lain-lain

## 4. Sanggar Budaya

Sangat perlu, karena sanggar merupakan upaya peningkatan pelestarian adat dan budaya demi masa depan

## 5. Peran perempuan dalam pelestarian :

- a. Sumber daya hutan, tanah dan air

Bahwa perempuan juga merupakan suatu nilai luhur dalam arti perempuan mempunyai kehormatan (dalam hal kepemilikan tak tergugat)

- b. Pengetahuan Tradisional
  - Lebih banyak memiliki keahlian khusus tentang lagu-lagu dan tarian adat sekaligus menjadi pelatih
  - Anyaman-anyaman khusus yang terbuat dari bahan lokal
  - Masakan-masakan tradisional (Enbal, Bejab, Sir-sir, Bakasang, Es U Mas masing, dll)

#### Kelompok V :

1. Perlu dilestarikan pengetahuan tradisional dengan dikembangkan produk-produk budaya tersebut seperti :
  - Tarian adat (Sawat, Saryaat, Yerik, Farsukat, Nam) bersama iringan suling & tipa gong
  - Lagu Adat (Utuk Wawar, Ngel-Ngel, Baut Atnanit)
  - Bahasa Kei (Sukat Saran, Liat Dalil)
  - Hukum Kei (Larvul Ngabal)
  - Adat Istiadat (Bel/Pela, Maren)
  - Makanan Tradisional (Enbal dan lainnya), juga ramuan obat tradisional (jamu waranlanit, dll)
  - Permainan-permainan yang banyak dilupakan, seperti :
    - Been kadit (gasing)
    - Been ul
    - Been kambushere
    - Been tasbuun hov kubkubat (kulit bia)
    - Been temar swar
    - Been uar-amuun (balong Kei)
2. Bahasa Kei perlu diajarkan di sekolah-sekolah formal di Kei untuk mendorong anak-anak berkomunikasi dalam Bahasa Kei
3. Museum perlu dibuat untuk melestarikan aset sejarah dan pewarisan nilai-nilai budaya arif
4. Perlu dibuat perpustakaan untuk mengumpulkan semua informasi dan hasil-hasil penelitian tentang Kepulauan Kei sehingga memacu orang untuk mempelajari sejarah budaya sendiri
5. Objek Wisata antara lain :
  - Wearlian Hawang dan Kubur Rat Ohoivur-Letvuan
  - Ngus Mayas (dan lain-lain)-Ohoinol
  - Wear Masil-Evu (menuju Wearden!)
  - Dit Sakmas, Wuar Lair-Semawi/Wain
  - Baranfit/Balyang-Marvun
6. Perlu adanya Sanggar untuk melatih kaum perempuan dalam pelestarian dan pembudidayaan hasil hutan, untuk menambah pendapatan keluarga;
 

Contoh:

*Karin* dibuat *Daar*/Tikar & sejenisnya (Baku, Bis, Luv, Kabulin, Kuva, Ngel), dan pengembangan-pengembangan dengan lebel organik (untuk taplak meja, topi, tas, pengalas gelas, tempat tissue, sandal rotal/dav, dll)

*Da* dibuat *Yavar* (Karaan, Ngov, Ngunit, Sifat, Sahat, Kaler, Karaan, Woban, Lavan, dan lain-lain), serta pengembangan-pengembangan

*U* (Rotan) dibuat Kader, Karanjing, pemukul kasur, meja TV, keranjang bunga, rak buku

## 4.4. Garis Besar Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan

### 4.4.1. Visi

Dalam kurun waktu 25 tahun warga masyarakat adat kawasan Ohoinol, Marfun, Warwut, Semawi, Letuan, dan Evu berhasil memanfaatkan kekayaan budaya (pengetahuan tradisional) dalam mengelola sumberdaya hutan berkelanjutan untuk penyediaan air (jumlah maupun kualitas) dan kesejahteraan hidup di pulau Kei Kecil secara lestari.

### 4.4.2. Isu Pokok

Isu-isu umum yang diidentifikasi, dapat dipersempit/dikerucut menjadi empat isu pokok (masalah strategis) sebagai berikut :

Isu Umum (aspek-aspek masalah)	Isu Pokok (berkaitan dengan masalah)
Deforestasi, erosi tanah, air yang terbatas (jumlah & kualitas), info regulasi/peraturan yang terbatas, dll.	Ekologi/Kelestarian Lingkungan
Tanah dangkal & rendah kesuburan serta air, produksi dan harga jual bahan mentah (= pendapatan) yang terbatas & fluktuatif, gaya hidup terbatasnya peluang aktifitas <i>off-farm</i> serta sektor jasa (turisme, dll).	Ekonomi/Agroekonomi
Lemahnya daya dukung deposit budaya & spirit tradisional sebagai rujukan bersama, sekaligus ladang ekonomi kreatif masyarakat, dll.	Sosial Budaya
Bahasa Kei dan aneka kekayaan budaya/pengetahuan tradisional yang ada belum masuk kurikulum sekolah	Pendidikan/Institusi dan SDM
Catatan: Masalah atau problem dirumus secara positif, yang dapat dipecahkan lewat intervensi-intervensi kreatif	

### 4.4.3. Strategi

Untuk mencapai visi bersama tersebut, maka disepakati 4 strategi dasar/inti yang komprehensif dan terintegrasi untuk 5 tahun ke depan, yaitu :

ISU POKOK	RENCANA STRATEGIS	CAPAIAN
EKOLOGI	UU-PERDA-KESEPAKATAN	BATAS-BATAS WILAYAH YANG JELAS, KAWASAN DAERAH RESAPAN DIJADIKAN HUTAN LINDUNG
EKONOMI	PENGEMBANGAN AGROFORESTRI-AGROWISATA-AGROINDUSTRI	MASYARAKAT MENCAPAI KEMANDIRIAN PANGAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL BUDAYA	PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SELURUH KEKAYAAN BUDAYA KEI	TERBENTUKNYA SANGGAR, MUSEUM, PERPUSTAKAAN
PENDIDIKAN	PENGAJARAN BAHASA KEI DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL MENJADI BAGIAN KURIKULUM SEKOLAH DI WILAYAH MALRA	PENINGKATAN PEMAHAMAN BUDAYA LOKAL DAN KEMAMPUAN BERBAHASA KEI

Ringkasan isu pokok, rencana strategis, dan sasaran capaian yang dikemukakan dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Mendorong dan memberdayakan masyarakat adat untuk mengambil tanggung jawab dalam konservasi hutan dan sumber air (sempadan sungai dan sumur) berdasarkan regulasi/ ketentuan Undang-Undang (UU) terkait, Peraturan Daerah (PERDA) yang partisipatif, serta keepakatan-keepakatan inter & antar ohoi. Sasaran yang hendak dicapai dari strategi dasar ini adalah batas-batas wilayah yang jelas, kawasan daerah resapan dijadikan hutan lindung.
2. Menyadarkan dan memberdayakan masyarakat adat berkesetaraan gender untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis agroforestri (termasuk pertanian organik), agrowisata dan agroindustri dalam arti luas (mencakup kerajinan anyam-anyaman, dll). Sasaran yang hendak dicapai dari strategi inti ini adalah masyarakat mencapai kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan.
3. Menjalini dialog dan kerjasama dengan seluruh potensi yang terkait dengan sosial budaya bagi pelestarian dan pemanfaatan seluruh kekayaan budaya Kei. Sasaran yang hendak dicapai dari strategi dasar ini adalah terbentuknya sanggar, museum, perpustakaan.
4. Menggalang kerja sama dan kemitraan multi-pihak bagi pengembangan institusi dan SDM (pendidikan) dalam rangka mewujudkan pengajaran Bahasa Kei dan Pengetahuan Tradisional menjadi bagian kurikulum sekolah diwilayah MALRA (Maluku Tenggara). Sasaran yang hendak dicapai dari strategi ini adalah peningkatan pemahaman budaya lokal dan kemampuan berbahasa Kei.

#### 4.4.4. Program

Dalam upaya melaksanakan strategi guna mencapai sasaran dan visi yang dicita-citakan, maka masing-masing strategi tersebut dijabarkan menjadi program dan kegiatan. Usulan program dapat dikompilasi/elaborasi berdasarkan temuan Studi Awal dan SEMILOKA, yang disusun sesuai dengan strategi dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai contoh :

##### Program dari strategi no. 1

- Undang-Undang (UU)
  - Mengoleksi dokumen-dokumen relevan tentang Manajemen Hutan Berkelanjutan, Ketersediaan Air, dan Sumber Daya Alam secara umum (UU, PP, KEPRES, Ketentuan dari Menteri terkait, Provinsi, dan Kabupaten)
  - Menelaah dokumen dan memproduksi tinjauan kritis dan ringkasan eksekutif, mengklarifikasi tugas dan tanggungjawab pada level kampung/desa dan masyarakat adat (selain level kecamatan dan kabupaten)
  - Mendistribusi dokumen bagi informasi dan komentar-komentar
- Peraturan Daerah (PERDA)
  - Mengoleksi dokumen Peraturan Daerah Kabupaten MALRA tentang Manajemen Hutan Berkelanjutan, Ketersediaan Air, dan Sumber Daya Alam secara umum (termasuk Keputusan Bupati dan Ketentuan Pelaksanaan dari Dinas Terkait)
  - Menelaah dokumen dan memproduksi tinjauan kritis dan ringkasan eksekutif, mengklarifikasi tugas dan tanggungjawab pada level kampung/desa dan masyarakat adat (selain level kecamatan)
  - Jika tidak atau belum ada dokumen relevan, atau walaupun ada merupakan produk Orde Baru yang sifatnya *top-down* dan sentralistik, maka perlu diproduksi suatu PERDA partisipatif yang memihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat

- Kesepakatan
  - Merupakan konsensus tingkat kampung/desa dan antar kampung dalam pengelolaan kawasan petuanan secara berkelanjutan
  - Menghasilkan kesepakatan berbasis pengetahuan lokal seperti ini dapat dilakukan untuk mengisi kevakuman yang ada, atau merealisasikan ketentuan-ketentuan di level atas
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan secara partisipatif, termasuk penindakan/penegakan hukum terhadap pelanggaran
- Dan seterusnya

## 5. REKOMENDASI

Hasil refleksi Tim INLULINS/Fasilitator berdasarkan situasi riil di lapangan, menunjukkan bahwa permasalahan air bersih dan manajemen hutan berkelanjutan begitu kompleks dan pluri-dimensional, menyangkut pengembangan sumber daya manusia lokal setempat secara kolektif. Permasalahan masyarakat adat yang paternalis pada desa-desa sasaran studi, lebih banyak disebabkan oleh pendekatan sektoral/linear dari pihak luar khususnya negara (pemerintah dan pemerintah daerah mencakup dinas-dinas terkait), yang masih mengabaikan pendayagunaan kearifan lokal dalam mewujudkan *good governance*. Alhasilnya, demokratisasi dan otonomisasi yang diharapkan berpengaruh positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan yang baik (*good governance*), dan peningkatan kualitas kesejahteraan masih lemah atau setidaknya masih dalam proses awal.

Mengingat NFP Facility tahap pertama ini telah dimanfaatkan oleh INLULINS sebagai titik masuk untuk melakukan pembaharuan secara menyeluruh/holistik dan konvergen bagi terwujudnya *good governance* pada level desa, secara memuaskan. Maka disarankan/direkomendasikan, agar NFP Facility tahap kedua dilanjutkan dengan dukungan dana yang lebih memadai, agar arah program bersama yang telah dipepakti dapat ditindaklanjuti secara terfokus sebagai suatu Pilot Project tentang penerapan *good governance* di sektor kehutanan berbasis pengetahuan/kearifan lokal yang adaptif. Hasil kolaborasi *Triple Helix* antara Masyarakat-Pemerintah & NFP-FAO

## DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K. dan Hikmat, H. 2001. Participatory Research Appraisal Dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; Modul Latihan. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Allison, M. dan Kaye, J. 2005. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Chambers, R. 1996. PRA Participatory Rural Appraisal-Memahami Desa Secara Partisipatif. Edisi Indonesia. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Departemen Kehutanan dan GTZ. 2005. Program Kehutanan Nasional (National Forest Program): Tanya-jawab seputar defenisi, prinsip, implikasi, dan perkembangannya di Indonesia. Kerjasama Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman. Jakarta.
- Envirocare. 2005. Improvement of Institutional and Human Resources Capacity for Civil Society and Private Sector Involvement in Forest Management in Kalimantan, Tanga and Coast Regions. Envirocare-Tanzania, Funded by NFP Facility FAO Rome-Italy.
- Irwanto. 1998. Focus Grup Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis. Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jakarta.
- MIPA Tanzania. 2005. Indigenous Knowledge on Forest Management. MBEYA-Tanzania.
- Santoso, P. (ed). 2003. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Cetakan II (Oktober 2006). Pustaka Pelajar Bekerja sama S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM. Yogyakarta.
- Selener, D., Endara, N., Carvajal, J. 1999. Participatory Rural Appraisal and Planning: Workbook. International Institute of Rural Reconstruction. Quito, Equador (South America).
- Stubenvoll, S. 2000. Traditional Agroforestry And Ecological, Social, And Economic Sustainability On Small Tropical Islands. A Dynamic Land-Use System And Its Potential For Community-Based Development In Tioor And Rhun, Central Moluccas, Indonesia. PhD Thesis, TU Berlin.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Alfabeta. Bandung.
- Sutomo, S., Hikmat, H., Saragi, T.P. 2002. Modul Pelatihan Praktis Perencanaan Partisipatif. CV Cipruy. Jakarta.
- Yumarma, A. 2006. Kosmologi Tradisional Usai Gempa. Harian Nasional Kompa

# 3

## KELOMPOK STUDI DESA UWEN

### PENGUATAN HAK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DI DESA UWEN DAN SEKITARNYA KECAMATAN TANIWEL

#### 1. PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Pengelolaan hutan di Indonesia sampai saat ini belum menunjukkan kejelasan tentang hak kepemilikan (*property right*) atas lahan hutan. Hal ini telah menimbulkan implikasi yang kompleks. Di berbagai tempat terjadi persoalan saling klaim terhadap lahan hutan yang sama; konflik vertikal antara masyarakat dengan perusahaan HPH/IUPHHK, bahkan konflik horisontal antar masyarakat pun dapat dipicu oleh persoalan hak-hak atas hutan.

Konflik yang terjadi di bidang kehutanan, dalam kenyataannya telah menjadi faktor penghambat dalam proses pengelolaan hutan lestari karena dari aspek ekonomi khususnya dari sisi pengusaha, konflik mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam berusaha di bidang kehutanan serta mendorong ketidakpedulian terhadap masa depan sumberdaya hutan. Dari aspek sosial masyarakat, konflik menyebabkan adanya tuntutan (*claiming*) atas wilayah, baik per kelompok masyarakat yang besar, kecil ataupun secara individual. Sedangkan dari aspek ekologis, terkait dengan kedua aspek diatas maka akan mengancam daya dukung (*carrying capacity*) kawasan hutan, yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan sumberdaya hutan semakin besar.

Fakta yang ada, membuktikan bahwa saling klaim terhadap lahan hutan antara pengusaha HPH/IUPHHK sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan hutan dan masyarakat sekitar hutan sudah berlangsung lama. Konflik kepemilikan ini terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia termasuk di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kondisi seperti ini mengakibatkan para pihak dalam pengelolaan hutan hanya berorientasi untuk memperoleh manfaat jangka pendek berupa keuntungan yang maksimal tanpa memperhatikan aspek keamanan dan kelestarian sumberdaya hutan.

Konflik lahan hutan antara pengusaha HPH/IUPHHK dan masyarakat terjadi karena disatu sisi, pemilikan/hak penguasaan kawasan hutan masyarakat lokal mengacu pada hukum adat dan hak ulayat yang didasarkan pada aspek historis-cultural dan fakta-fakta di lapangan. Sedangkan pihak pengusaha mendasarkan hak penguasaan kawasan hutan yang dikelolanya pada aturan hukum formal/legal. Kedua belah pihak bersikeras bahwa masing-masing dasar hukum yang diacu memiliki legalitas yang paling kuat.

Menyikapi kondisi di atas maka perlu dilakukan pengkajian dan pemberdayaan masyarakat tentang "*Penguatan Hak Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan*" yang dilaksanakan di desa Uwen dan sekitarnya, kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat.



## 1.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang unsur/kriteria masyarakat hukum adat di desa Uwen dan sekitarnya.
- b. Mengetahui Pola interaksi masyarakat dengan sumberdaya hutan.
- c. Mengidentifikasi jenis-jenis hasil hutan yang digunakan oleh masyarakat.
- d. Memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan.
- e. Memperoleh kepastian batas kawasan / areal petuanan masyarakat adat.

## 1.3.Out Put

Out put yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Masyarakat Adat memiliki hak terhadap sumber daya hutan yang berada di dalam wilayah petuanan mereka, sehingga mereka dilibatkan secara partisipatif dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
- b. Memberi peluang yang besar kepada kelembagaan adat dan perangkat hukum adat untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan.
- c. Masing-masing Masyarakat Adat memiliki batas-batas wilayah petuanan yang jelas dan nyata di lapangan.
- d. Terwujudnya asas kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 2. GAMBARAN UMUM LOKASI KEGIATAN

### 2.1. Letak dan Luas

Kegiatan “Penguatan Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan” ini dilaksanakan di desa Uwen dan sekitarnya dalam wilayah Kecamatan Taniwel. Kecamatan Taniwel terletak di pulau Seram dan termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku. Secara geografis wilayah Kecamatan Taniwel terletak pada posisi 2°55’24” sampai dengan 3°10’25” Lintang Selatan dan 128°10’13” sampai dengan 128°54’22” Bujur Timur.

Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Taniwel sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kairatu dan Amahai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wahai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Piru.

Menurut data statistik Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2007, luas Kecamatan Taniwel adalah 1.496,2 km<sup>2</sup> atau 36,51 % dari luas keseluruhan Kabupaten Seram Bagian Barat 4.099 km<sup>2</sup>. Wilayah Kecamatan Taniwel terdiri atas 34 desa, dimana 28 desa berada di pesisir pantai dan 6 desa di daerah pegunungan.

### 2.2. Kependudukan

Berdasarkan data statistik kecamatan Taniwel tahun 2007 jumlah penduduk di kecamatan Taniwel sampai dengan akhir Oktober 2007 sebesar 18.174 jiwa dengan 4.056 kepala keluarga sehingga tiap keluarga rata-rata beranggotakan 4,48 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 8.869 jiwa dan perempuan berjumlah 9.305 jiwa, itu

berarti sex ratio di kecamatan ini adalah 0,95 dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun selama lima tahun terakhir adalah 2,21 %.

Luas kecamatan adalah 149.620 ha atau 1.496,2 km<sup>2</sup>, dengan demikian rata-rata penduduk per kilometer persegi adalah 12 orang. Berdasarkan kelas umur menurut Simon (2000) maka penduduk di lokasi kegiatan terbagi atas golongan anak-anak (yang berusia antara 1 - 14 tahun) sebesar 39,65 %, dewasa (15 - 24 tahun) sebesar 17,12%, orang tua (25 - 49 tahun) sebesar 36,69%, dan usia lanjut 50 tahun keatas sebesar 6,54%.

### 2.3. Mata Pencaharian

Masyarakat di lokasi kegiatan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani ladang. Sistem perladangannya adalah berladang berpindah dengan masa *bera* selama 8 - 10 tahun jika bekas ladang tidak ditanami dengan tanaman umur panjang. Umumnya setelah panen ladang ditanami dengan tanaman umur panjang dan selanjutnya areal ini menjadi *dusun* milik yang mengusahakannya. Sebagian besar penduduk juga menanam buah-buahan seperti pisang, jeruk, mangga, durian, langsung dan salak. Jenis-jenis tanaman perkebunan atau tanaman umur panjang yang diusahakan adalah cengkih, pala, kelapa, kopi dan coklat. Hasil ladang digunakan untuk konsumsi keluarga dan selebihnya untuk dijual. Hasil buah-buahan dan tanaman umur panjang dijual untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak, membeli sandang dan papan serta kebutuhan keluarga lainnya.

Selain bercocok tanam, penduduk juga memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu (damar, rotan dan berburu), mengolah sagu dan sebagai nelayan. Ada juga sebagai penjual jasa (tukang kayu dan batu), PNS dan pensiunan, namun dalam prosentase yang kecil.

### 2.4. Tingkat Pendidikan dan Kesehatan

Tingkat pendidikan formal penduduk di kecamatan Taniwel tergolong masih rendah karena sebagian besar dari mereka hanya tamat sekolah dasar. Terdapat beberapa penduduk yang masih buta huruf, mereka ini umumnya penduduk yang berusia lanjut dan berdiam di daerah pegunungan.

Sarana pendidikan di kecamatan Taniwel terdiri dari 7 TK, 29 SD, 6 SLTP dan 2 SMU yang terdapat di ibukota kecamatan (Taniwel) dan di desa Sukaraja.. Hampir di setiap desa terdapat sekolah dasar.

Tingkat kesehatan masyarakat di wilayah ini masih tergolong rendah, angka kesakitan masih cukup tinggi. Penyakit yang banyak diderita masyarakat adalah malaria, penyakit kulit dan gangguan saluran pernapasan. Sarana kesehatan berupa Puskesmas dan tenaga perawat kesehatan selain terdapat di ibukota kecamatan juga terdapat di beberapa desa.

### 2.5. Pendapatan

Desa-desa pada lokasi kegiatan memiliki tingkat pendapatan yang cukup bervariasi. Menurut Silaya (2004), diketahui bahwa pendapatan rata-rata kepala keluarga pada beberapa desa di kecamatan Taniwel berkisar antara Rp.5.373.143, sampai dengan Rp.6.028.800,- pertahun dengan sumbangan masing-masing sumber pendapatan adalah 49,90 % dari usaha tani (ladang dan perkebunan), 33,67 % dari hutan (kayu dan bukan kayu) dan 16,43 % dari lain-lain (pedagang, jasa, nelayan, pensiunan). Perbedaan

tingkat pendapatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keragaman sumber pendapatan dan letak lokasi desa.

### 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan tentang "*Penguatan Hak Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan*" ini dilaksanakan di desa Uwen dengan melibatkan beberapa desa disekitarnya (desa Tounusa, Solea, Musihuwey dan Waraloin) wilayah kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 8 bulan sejak bulan Maret sampai dengan November 2008.

#### 3.2. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Letter Of Agreement (LOA) dari NFP Facility (No. 37773) tgl. 17 September 2007, maka kegiatan yang dilakukan di kecamatan Taniwel (desa Uwen dan sekitarnya) adalah sebagai berikut :

- 1). Melakukan Study tentang Interaksi antara masyarakat adat dengan hutan dan pemanfaatan hasil-hasil hutan.
- 2). Melakukan Workshop guna menyampaikan hasil studi pada point 1).
- 3). Melakukan Penataan /pemetaan batas petuanan antar masyarakat adat.

Prosedur pelaksanaan ketiga kegiatan diatas diatur sbagai berikut :

##### A. Persiapan

Kegiatan ini diawali dengan melakukan persiapan dalam berbagai hal berupa :

- Pengurusan ijin ; pengurusan ijin pelaksanaan kegiatan di dilakukan di tingkat kecamatan dan desa.
- Penyiapan Sumber Daya Manusia ; SDM yang terlibat sebagai fasilitator dalam kegiatan ini dibekali dengan pengetahuan praktis yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan.
- Penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna kelancaraan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

##### B. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyampaian informasi tentang kegiatan "*Penguatan Hak Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan*" dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat adat pada setiap desa/negeri. Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang pentingnya kegiatan yang akan dilakukan sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

##### C. Identifikasi

Guna memperoleh data yang akurat berkaitan dengan Kegiatan tentang "*Penguatan Hak Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan*" maka pengambilan data atau informasi dalam kegiatan ini lebih dikhususkan kepada responden atau informan yang paham benar tentang masalah hak ulayat dan adat istiadat pada masing-masing negeri tersebut. Responden atau informan dimaksud adalah Tua-Tua Adat, Bapa Raja, dan tokoh masyarakat lainnya. Sedangkan data atau informasi tentang interaksi masyarakat dengan hutan dan pemanfaatan hasil-hasil hutan serta kontribusinya bagi pendapatan keluarga diperoleh melalui

inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis hasil hutan yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat serta melalui wawancara/pengisian kuisisioner dari beberapa anggota masyarakat/ kepala keluarga. Kegiatan inventarisasi dan identifikasi dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat yang selalu beraktivitas ke hutan. Dengan demikian Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode *PRA (Participatory Rural Appraisal)* yang memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan dimaksud. Untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan, dilakukan pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif (*fenomenologis*).

#### D. Workshop

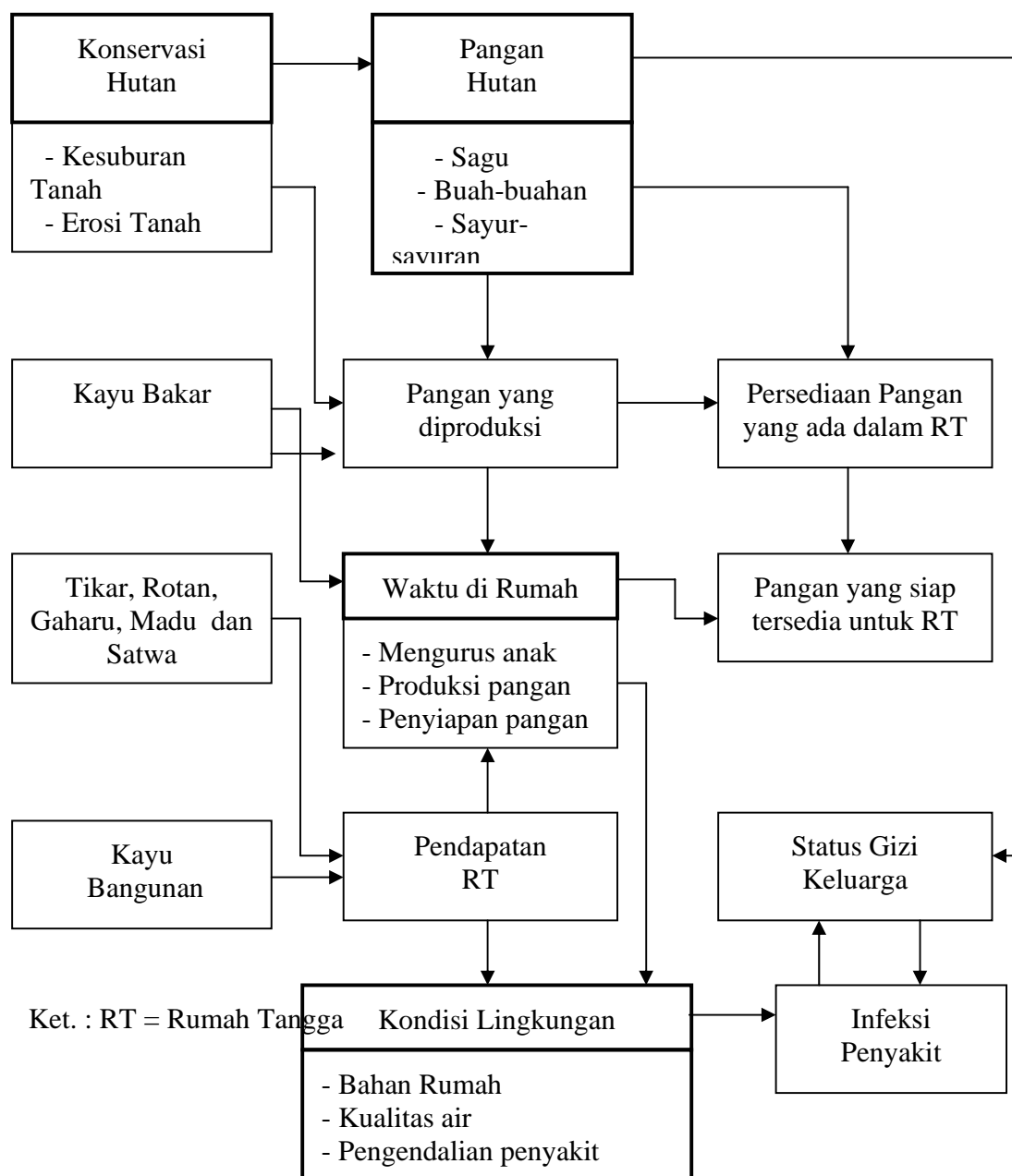
Kegiatan Workshop tentang "*Penguatan Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan*" dilaksanakan selama sehari pada tanggal 7 Juni 2008 dengan melibatkan 45 orang peserta yang berasal dari 7 desa dan terdiri dari Staf Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. Dalam kegiatan workshop ini disampaikan 4 Makalah yaitu 2 makalah utama dan 2 makalah penunjang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Interaksi antara Masyarakat Adat dengan Hutan dan Pemanfaatan Hasil-Hasil hutan.

Interaksi masyarakat di desa Uwen dan sekitarnya dengan hutan dan lingkungan, banyak terkait dengan persepsi yang dipahami oleh masyarakat tersebut. Menurut masyarakat desa Uwen dan sekitarnya, hutan dipahami sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Hal ini karena hutan merupakan sumber bahan pangan, tempat bercocok tanam/berladang dan sumber penghasil kayu bakar dan kayu pertukangan.

Hubungan antara masyarakat desa Uwen dan sekitarnya dengan hutan dalam kaitan dengan ketergantungan mereka terhadap hutan dapat dilihat pada diagram alir berikut :



Gambar 1. Hubungan Ketergantungan Masyarakat Desa Uwen dan sekitarnya dengan Sumberdaya Hutan

Pada gambar tersebut terlihat bahwa masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hutan, khususnya pada aspek kebutuhan pangan, ekonomi dan kesehatan. Hubungan seperti ini memang merupakan warisan nenek moyang mereka, disamping secara ekologis hutan merupakan lingkungan hidup mereka. Sementara itu bagi masyarakat desa Uwen dan sekitarnya, meneruskan kegiatan warisan orang tua/nenek moyang merupakan bagian dari kebudayaan mereka.

Menurut masyarakat, masuknya HPH beberapa tahun yang lalu menyebabkan semakin berkurang dan semakin sulit memperoleh hasil hutan bukan kayu dari dalam

hutan. Berkurangnya tikar pandan, gaharu dan rotan akibat eksplotasi hutan oleh perusahaan kayu, semuanya ini turut berpengaruh pada pendapatan mereka. Hasil-hasil buruan hewan juga semakin berkurang dan masyarakat merasa kehilangan sumber protein yang biasa mereka makan.

#### 4.2. Jenis-Jenis Hasil Hutan yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat.

Hasil Hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Uwen dan sekitarnya berupa hasil hutan kayu dan bukan kayu. Keeratan hubungan masyarakat desa Uwen dan sekitarnya dengan hutan tercermin pula dalam kebutuhan mereka akan kayu, baik untuk kayu bakar, membangun rumah dan ada pula yang menjualnya sebagai salah satu sumber pendapatan keluarga. Kayu tersebut berasal dari hutan alam yang terdiri dari beraneka macam jenis. Umumnya masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang jenis-jenis kayu dan kegunaannya.

Dalam upaya membangun atau memperbaiki rumah, masyarakat umumnya menggunakan kayu-kayu keras seperti kayu besi (*Instia bijuga*), gupasa (*Vitex gufasa*), matoa (*Pometia pinnata*) untuk tiang atau bangunan bagian bawah dan jenis-jenis kayu lunak seperti meranti (*Shorea spp*), kayu merah (*Eugenia sp*), mersawa (*Anisoptera spp*) dan Nyatoh (*Palaquim spp*) untuk bangunan bagian atas. Sedangkan untuk membuat kosen pintu dan jendela serta perabot rumah tangga digunakan jenis-jenis kayu yang termasuk dalam kelompok kayu indah seperti kayu cina (*Podocarpus spp*), lenggua (*Pterocarpus indicus*), buah rao/Dahu (*Dracontomelon dao Merr*), lasi (*Adinia fragilifolia Val*).

Penggunaan kayu bakar sebagai sumber energi oleh masyarakat di desa Uwen dan sekitarnya karena kayu bakar selain mudah diperoleh, juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Kayu bakar cukup tersedia di hutan, cara pengambilannya dengan jalan memanfaatkan pohon-pohon tua yang kering dan telah tumbang atau memungut ranting dan cabang kayu kering yang telah jatuh ke tanah maupun yang masih menempel pada pokok kayu.

Dari hasil observasi di desa, diketahui bahwa kebutuhan kayu bakar setiap kepala keluarga (kk) berkisar antara 2,5 - 4 ikat per minggu yang setara dengan 50 - 80 kg/minggu, sehingga kebutuhan kayu bakar dalam satu tahun berkisar antara 2.600 - 4.160 kg/kk. Menurut Simon (1983) 1 m<sup>3</sup> kayu setara dengan 600,02 kg, dengan demikian kebutuhan kayu bakar dalam setahun berkisar antara 4,33 - 6,93 m<sup>3</sup>/kk.

Sedangkan jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Uwen dan sekitarnya meliputi bahan pangan berupa sagu, sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti ; jenis paku-pakuan, ganemo hutan, rebung, namu-namu, durian dan lain-lain. Selain itu terdapat pula hasil hutan bukan kayu lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti tikar pandan, gaharu, rotan, madu, dan nira dari pohon enau/aren.

Beberapa jenis satwa yang sering ditangkap oleh masyarakat desa Uwen dan sekitarnya adalah kus-kus (*Phalanger sp*), babi hutan (*Sus crova*), rusa (*Cervus timorensis*), dan beberapa jenis burung seperti burung nuri/bayan (*Ecletus roratus*) dan kakatua (*Cacatua molucensis*). Jenis satwa ini umumnya ditangkap untuk dikonsumsi dan selebihnya di jual.

#### 4.3. Masyarakat Hukum Adat di Desa Uwen dan sekitarnya.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa : "... dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya."

Selanjutnya pada penjelasan pasal 67 ayat 1 UU No. 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa : "Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :

- a). Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap).
- b). Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya.
- c). Ada wilayah hukum adat yang jelas.
- d). Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati.
- e). Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan demikian untuk mengetahui unsur-unsur diatas maka dilakukan kajian yang berkaitan dengan unsur-unsur dimaksud. Hasil kajian yang dilakukan di desa Uwen dan sekitarnya dapatlah dikemukakan sebagai berikut :

1. Bentuk dan struktur masyarakat desa Uwen dan sekitarnya merupakan kesatuan kelompok kemasyarakatan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kekerabatan atau kekeluargaan yang tinggi.
2. Keberadaan masyarakat adat dan berbagai pranata pendukungnya masih diakui, baik secara de facto maupun de yure, namun sudah jarang untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya hukum adat yang ada dalam masyarakat saat ini tidak berfungsi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sehingga sistim Pemerintahan Adat menjadi tidak berkembang.
3. Desa Uwen dan sekitarnya memiliki berbagai pranata dan perangkat hukum adat terutama peradilan adat. Pranata dan perangkat hukum adat yang terdapat di desa Uwe dan sekitarnya mengatur hubungan antara manusia dengan sumber daya alam (seperti sasi, dusun, tempat-tempat keramat dll.) dan juga mengatur hubungan antara masyarakat satu dengan lainnya.
4. Desa Uwen dan sekitarnya memiliki wilayah hukum adat dengan batas-batas alam seperti sungai, gunung, lembah, batu dan laut. Setiap anggota masyarakat di dalam desa/negeri mengetahui batas-batas petuanan negerinya dan juga batas-batas petuanan keluarga (marga/soa) maupun batas-batas petuanan milik pribadinya.
5. Terdapat kontribusi sumber daya hutan terhadap rata-rata pendapatan keluarga di desa Uwen dan sekitarnya. Nilai kontribusi sumberdaya hutan terhadap pendapatan keluarga berkisar antara 21,41 % - 48,89 %. Kontribusi sumberdaya hutan ini sangat penting bagi menunjang kelangsungan hidup mereka. Pola interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan pada umumnya sama karena dilandasi oleh pemahaman yang sama yaitu hutan merupakan sumber bahan pangan (tumbuh-tumbuhan dan hewan), tempat bercocok tanam dan sumber penghasil kayu, sehingga hutan harus dijaga dan dipelihara dengan baik.

#### **4.4. Bentuk-Bentuk Kepemilikan Kawasan Hutan oleh Masyarakat Adat di Desa Uwen dan sekitarnya.**

Keeratan hubungan antara masyarakat desa Uwen dan sekitarnya dengan sumberdaya hutan telah mewujudkan suatu sistem atau bentuk kepemilikan hutan yang ada di wilayah ini. Secara umum kawasan hutan primer (ewang) menurut masyarakat di desa Uwen dan sekitarnya telah dikuasai oleh masing-masing marga atau soa. Namun demikian setiap pemilik kawasan hutan atau petuanan itu tetap taat pada aturan-aturan atau adat yang diberlakukan di desa tersebut.

Berdasarkan sistem ini maka kepemilikan kawasan hutan oleh suatu marga/soa akan diwariskan secara turun temurun kepada generasi penerus dari marga atau soa yang bersangkutan. Apabila ada anggota masyarakat di dalam negeri yang mau memanfaatkan

hasil hutan di dalam kawasan hutan yang dimiliki oleh marga lain maka yang bersangkutan harus meminta ijin terlebih dahulu dari marga atau soa pemilik kawasan itu.

Pola pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan ada yang secara perorangan tetapi ada pula secara berkelompok. Pola berkelompok dilakukan jika hasil hutan yang akan diambil/dipungut memang membutuhkan orang atau tenaga dalam jumlah yang cukup, seperti berburu, mengusahakan sagu, membuka kebun baru, dll.

#### 4.5. Pelaksanaan Workshop

Materi/makalah yang disampaikan dalam Workshop ini adalah :

- a. Makalah Utama : "Penguatan Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Uwen Kecamatan Taniwel" oleh *Ir. Th. Silaya, MP*
  - b. Makalah Penunjang I : "Kerusakan Hutan dan Upaya Konservasi Lahan Sistem Dusung" oleh *J. Hatulesila, S.Hut.*
  - c. Makalah Penunjang II : "Peningkatan Produktivitas Lahan dengan Sistem Agroforestri" oleh *Irwanto, S.Hut, MP.*
  - d. Makalah Penunjang III : "Penataan/Pemetaan Batas petuanan" oleh *Ir. Th. Silaya, MP.*
- Hasil simulasi tentang masalah kerusakan hutan dan lahan yang terjadi saat ini. Untuk mendapatkan pemahaman masyarakat tentang kerusakan hutan dan lahan maka dikemukakan pertanyaan : (1) apa yang dapat kita pikirkan (2) apa yang dapat kita rencanakan dan (3) apa yang dapat kita lakukan sebagai upaya penyelamatan hutan dan lahan. Dari 3 pertanyaan ini maka tanggapan yang diberikan oleh peserta workshop adalah sebagai berikut :



Perlu dipikirkan	Perlu direncanakan	Perlu dibuat/dilakukan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa hutan bisa rusak secepat itu.</li> <li>2. Perlu menanam pohon untuk mengembalikan hutan yang rusak.</li> <li>3. Akibat yang dialami karena kerusakan hutan.</li> <li>4. Mengembalikan hutan pada posisi semula</li> <li>5. Berdialog dengan masyarakat tentang pemanfaatan lahan secara baik</li> <li>5. Memikirkan masa sekarang dan masa depan</li> <li>6. Tindakan penyelamatan hutan untuk masa depan</li> <li>7. Bagaimana cara untuk mengembalikan apa yang sudah rusak</li> <li>8. Pemerintah dapat membantu bibit tanaman untuk ditanam</li> <li>9. Bagaimana aparat desa menggerakkan masyarakat untuk melakukan penanaman</li> <li>10. Menghentikan penebang-an pohon dengan sembarangan</li> <li>11. Harus memulai menanam pohon disekitar sungai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai menanam pohon sekarang.</li> <li>2. Mengembalikan lahan yang telah rusak dengan tanaman jangka panjang dan menengah.</li> <li>3. Membuat yang terbaik untuk masa depan anak cucu.</li> <li>4. Menanam kembali jenis-jenis pohon dan tanaman umur panjang.</li> <li>5. Membuat kelompok kerja disetiap desa</li> <li>6. Mengolah lahan</li> <li>7. Mengatur waktu tanam untuk setiap kelompok kerja.</li> <li>8. Secara berkelompok membuat pembibitan tanaman.</li> <li>9. Penanaman tanaman buah-buahan</li> <li>10. Menghentikan budaya ladang berpindah-pindah</li> <li>11. Melakukan penanam-an tanaman produktif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan secara berke- lanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya hutan</li> <li>2. Tindakan nyata dengan memulai menanam pohon dan tanaman umur panjang di sekitar sungai Hau.</li> <li>3. Menanami lahan-lahan terbuka dengan pohon-pohonan dan tanaman umur panjang.</li> <li>4. Membentuk kelompok kerja untuk memulai penanaman</li> <li>5. Reboisasi pada DAS</li> <li>6. Menanam pohon untuk anak cucu dimasa depan</li> <li>7. Menetapkan aturan desa (Perdes) tentang kelompok kerja rehabilitasi lahan</li> <li>8. Melakukan penanaman dengan bibit tanaman yang telah disiapkan pemerintah</li> <li>9. Melakukan penanaman berbagai macam tanaman yang bermanfaat</li> <li>10. Menanam areal dusung dengan tanaman umur panjang dan tanaman tumpang sari</li> </ol>

- Hasil Diskusi/Pembahasan Materi Workshop :
  - a. Perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Adat yang mengakomodir hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
  - b. Harus ada kajian-kajian yang lebih lanjut apabila Perda masyarakat/desa adat ditetapkan oleh karena harus diuji terhadap hakekat keberadaan masyarakat adat khususnya desa/negeri yang ada di wilayah kecamatan Taniwel.
  - c. Pohon/kayu yang tumbuh di sekitar desa harus dipertahankan dan dipelihara secara baik serta diatur pemanfaatannya oleh masyarakat, hal ini berkaitan dengan kenaikan harga BBM saat ini.
  - d. Hutan di sekitar daerah aliran sungai (kali) Hau telah musnah oleh sebab itu perlu dilakukan reboisasi dan diatur dengan peraturan daerah atau peraturan desa sehingga desa-desa di sekitar kali tersebut nantinya tidak mengalami banjir setiap musim hujan.
  - e. Perlu adanya peraturan desa tentang pengawasan terhadap pengelolaan hutan agar masyarakat tidak seenaknya menebang pohon yang dapat menyebabkan kerusakan hutan lebih parah lagi.
  - f. Perda tentang desa adat harus secepatnya di buat sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi desa dalam melakukan tindakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pengrusakan hutan.
  - g. Perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang retribusi kepada desa dan pemilik kawasan hutan bagi Perusahaan kayu yang melakukan kegiatan pemanenan kayu.
  - h. Akibat kegiatan penebangan/pemanenan oleh Perusahaan kayu maka kondisi hutan dan hasil-hasil hutan (rotan, tikar pandan, dll) di petuanan masyarakat Uwen dan sekitarnya telah rusak.
  - i. Perlu adanya pertemuan bersama antara para kepala desa, tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat dari desa Uwen dan desa-desa tetangga lainnya untuk membicarakan secara bersama atas dasar prinsip kekeluargaan dan adat mengenai batas-batas petuanan antar desa, karena pada awalnya desa-desa tersebut adalah satu kesatuan masyarakat adat.
  - j. Perlu adanya pengaturan hak-hak atas hasil hutan, dan pengaturan ini harus dibuat oleh desa.
  - k. Perlu adanya kajian tentang jenis-jenis tanaman yang cocok untuk ditanam dalam upaya rehabilitasi lahan, karena masyarakat belum mengerti dan dapat menilai kecocokan tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan.
  - l. Tindak lanjut dari kegiatan semacam ini perlu difasilitasi oleh pemerintah secara berkelanjutan sehingga masyarakat dapat diberdayakan melalui berbagai kegiatan secara berkelompok terutama untuk mengembalikan kondisi hutan yang sudah rusak di desa Uwen dan desa-desa sekitarnya.
  - m. Perlu adanya kesepahaman antara masyarakat terkait dengan batas petuanan adat pada setiap desa ataupun antar masyarakat sehingga tidak terjadi konflik.
  - n. Perusahaan sering mengambil kayu dekat sungai, sehingga hutan disekitar sungai-sungai yang ada sudah rusak, hal ini tidak bisa dibiarkan saja karena dapat mengakibatkan banjir yang membahayakan masyarakat.
  - o. Aturan hukum adat saat ini telah luntur untuk itu perlu dilihat untuk ditata kembali sehubungan dengan pembuatan peraturan desa/negeri adat.
  - p. Fungsi kawang sebagai polisi hutan harus ditegakan supaya jangan ada lagi penebangan kayu secara sembarangan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kerusakan hutan lebih parah.
  - q. Pemanfaatan hutan untuk kepentingan masyarakat desa sudah saatnya diatur secara baik oleh aparat desa.

- r. Sistem pranata sosial di desa Uwen dan sekitarnya sementara mengalami kelunturan untuk itu aturan-aturan adat yang menjadi norma kehidupan di dalam masyarakat sekarang ini sudah saatnya ditata kembali, khususnya yang berhubungan dengan pemeliharaan hutan.
- s. Batas petuanan Desa Uwen dengan desa-desa tetangga yang lain perlu diatur secara bersama dan sesuai prinsip kekeluargaan serta dengan menjunjung tinggi adat-istiadat peninggalan leluhur.
- t. Larangan penebangan kayu sekarang ini sudah harus diberlakukan untuk itu pentingnya peraturan desa yang mengikat semua masyarakat sehingga kerusakan hutan dapat dibatasi dan dihentikan.

#### 4.6. Pemetaan/Penataan Batas

Dari hasil diskusi dalam pelaksanaan workshop di desa Uwen, terungkap bahwa masalah penataan batas petuanan antar desa di desa Uwen dan desa-desa lain disekitarnya (desa Solea, Tounusa, Musihuwey, Waraloin, Walakone dan Lumapelu) merupakan masalah yang sangat sensitif, demikian pula batas antara marga di dalam satu desa. Hal ini disebabkan karena ketujuh desa tersebut pada awalnya adalah satu kesatuan masyarakat adat yang memiliki satu pemerintahan adat dan satu wilayah pemukiman yang sama di daerah pegunungan. Dengan demikian maka masing-masing desa merasa memiliki hak atas kawasan petuanan tersebut, sehingga perlu adanya kebersamaan diantara desa-desa tersebut dalam menata wilayah petuanan mereka.

Walaupun kondisi wilayah petuanan masyarakat desa Uwen dan sekitarnya demikian, namun melalui pendekatan terhadap pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat maka dalam kegiatan ini telah dilakukan pemetaan/ penataan batas pada lahan milik (hak ulayat masyarakat).

Kegiatan pemetaan/penataan batas di desa Uwen ini dilakukan oleh 2 kelompok/tim pemetaan. Masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang ( 1 orang fasilitator dan 6 orang masyarakat desa ) dan masing-masing kelompok dilengkapi dengan peralatan berupa : 1 buah GPS, 1 buah kompas, 1 meter rol (panjang 50 m), tali ukur dan alat tulis. Diharapkan agar masyarakat desa yang terlibat dalam kegiatan pemetaan ini dapat memahami dan menggunakan peralatan yang ada khususnya kompas dan meter rol sehingga mereka dapat meneruskan kegiatan ini selanjutnya.

Batas-batas kepemilikan kawasan atau petuanan antara marga/soa atau antar keluarga di desa Uwen dan sekitarnya ditandai dengan batas-batas alam seperti sungai, gunung, dan lembah maupun batas-batas buatan seperti jenis-jenis tanaman berupa "gadihu, gamal, pohon durian, dll. Selain itu ada pula batas-batas yang dibuat berupa pagar kayu/bambu dan pal beton.

### 5. REKOMENDASI

#### ➔ Bagi Masyarakat

- a. Hukum adat dan sistem pranata sosial di desa Uwen dan sekitarnya sementara mengalami kelunturan untuk itu aturan-aturan adat yang menjadi norma kehidupan di dalam masyarakat sekarang ini sudah saatnya ditata kembali, khususnya yang berhubungan dengan pemeliharaan hutan.
- b. Dalam rangka penataan batas wilayah petuanan antar desa di desa Uwen dan desa-desa disekitarnya maka perlu adanya pertemuan bersama antara para kepala desa, tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat dari desa-desa tersebut untuk membicarakan secara bersama atas dasar prinsip kekeluargaan dan adat-istiadat

yang diwariskan dari para leluhur mereka. Hal ini perlu dilakukan guna mencegah konflik dikemudian hari.

- c. Kondisi hutan di sekitar daerah aliran sungai sebagian besar telah rusak akibat kegiatan penebangan yang dilakukan oleh perusahaan kayu, oleh sebab itu perlu partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohonan di sekitar aliran sungai dan tempat-tempat terbuka guna mengatasi bahaya banjir dan erosi di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau.
- d. Peranan dan fungsi kewang sebagai polisi hutan harus ditegakan supaya mencegah terjadinya penebangan kayu secara sembarangan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kerusakan hutan lebih parah.
- e. Mengingat tingginya ketergantungan masyarakat di desa Uwen dan sekitarnya terhadap sumberdaya hutan, maka perlu adanya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga kelestarian hutan.

### ➔ Bagi Pemerintah

- a. Permasalahan tentang batas wilayah petuanan antar masing-masing desa di kecamatan Taniwel, khususnya di desa Uwen dan sekitarnya merupakan potensi konflik, untuk itu pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut.
- b. Sesuai Undang-Undang No.41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, maka perlu adanya penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Adat sehingga memungkinkan masyarakat adat memiliki hak ulayat atas kawasan hutan yang berada dalam wilayah petuanannya. Selain itu Perda tersebut harus segera di buat sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi desa dalam melakukan tindakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pengrusakan hutan.
- c. Perlu adanya peraturan desa tentang pengawasan terhadap pengelolaan hutan agar dapat mencegah terjadinya penebangan pohon secara berlebihan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kerusakan hutan lebih parah lagi.
- d. Akibat kegiatan penebangan/pemanenan oleh Perusahaan kayu maka kondisi hutan dan hasil-hasil hutan (rotan, tikar pandan, dll) di petuanan masyarakat Uwen dan sekitarnya telah rusak. Untuk itu perlu perhatian pemerintah dalam mengawasi dan membuat kebijakan yang terkait dengan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di desa Uwen dan sekitarnya.
- e. Perlu adanya perhatian pemerintah dalam melakukan kajian tentang jenis-jenis tanaman yang cocok untuk ditanam dalam upaya rehabilitasi lahan, karena masyarakat belum mengerti dan dapat menilai kecocokan tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan di desa Uwen dan sekitarnya.

### ➔ Bagi NFP Facility

Tindak lanjut dari kegiatan ini berupa rehabilitasi kawasan hutan sekitar DAS dan lahan kosong/terbuka di desa Uwen dan desa-desa disekitarnya serta upaya penanaman jenis-jenis pohon/tanaman yang sesuai dengan kawasan tersebut perlu difasilitasi oleh NFP Facility secara berkelanjutan sehingga masyarakat dapat diberdayakan melalui berbagai kegiatan tersebut secara berkelompok terutama untuk mengembalikan kondisi hutan yang sudah rusak.

## P U S T A K A

Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat (Seram Bagian Barat Dalam Angka Tahun 2007)

Silaya, Th. 2004. Kearifan Masyarakat Lokal dalam Mengelola Sumberdaya Hutan dan Lingkungan di Kecamatan Taniwel. Thesis Program Studi Ilmu Kehutanan, UGM Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).

Simon, H. 2000. Hutan Jati dan Kemakmuran. Problematika dan Strategi Pemecahannya. Cetakan II Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Simon, H. 1983. Analisis Interrelationship Antara Pembangunan Kehutan dengan Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta.

# 4

## KEWANG NEGERI HARUKU

### PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS DAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN UNTUK KOMUNITAS DI NEGERI HARUKU

#### 1. PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling kompleks kebutuhannya. Kebutuhan tersebut kadang berubah mengikuti perubahan peradaban, secara klasik kebutuhan manusia adalah kebutuhan primer, sekunder dan tertier. Dalam perkembangannya terjadi perubahan seiring dengan pesatnya perkembangan peradaban umat manusia salah satunya adalah gaya hidup.

Meningkatnya jumlah manusia menyebabkan meningkat pula pemenuhan kebutuhan mereka, tentunya proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung menyebabkan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Jika tidak diatur secara bijak pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan mendatangkan bencana pada akhirnya, sebuah pepatah bijak dari tokoh dunia terkenal Mahatma Gandhi mengatakan : "*bumi cukup untuk kebutuhan semua orang tapi tidak cukup untuk kerakusan satu orang*".

Propinsi Maluku yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil namun didominasi oleh pulau - pulau kecil memiliki karakteristik sebagaimana kepulauan kecil lainnya yakni memiliki keterbatasan daya dukung serta lebih cepat mengalami perubahan ekologis negatif bila eksploitasi di daratan dilakukan tak terkendali. Penyebaran penduduk yang tidak merata, konsentrasi penduduk yang terpusat pada pulau-pulau kecil menyebabkan tekanan yang luar biasa pada kawasan pulau kecil itu, berkurangnya kawasan hijau yang berganti menjadi pemukiman, perkebunan temui dalam tahun belakangan ini, seperti banjir dan erosi saat musim hujan serta kelangkaan air bersih ketika kemarau melanda.

Selain memiliki kekayaan sumber daya alam, Maluku juga memiliki nilai - nilai luhur dalam pengelolaan sumber daya alam yang merupakan kearifan lokal (indigenous knowlegde) seperti sasi. Nilai ini merupakan kekuatan yang perlu didorong perannya karena bertumpu dan sesuai dengan kepribadian masyarakat lokal. Sasi adalah nilai warisan para leluhur yakni nilai yang telah melembaga dan hidup mengatur keseimbangan antara antara manusia dan alam, ia tumbuh menjadi bagian dan perspektif masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Meskipun pernah diberangus secara sistematis oleh berbagai regulasi pada saat rezim orde baru namun kearifan lokal seperti sasi dan kewang masih tetap hidup. Dengan pengakuan kembali pemerintahan adat lewat UUD 1945 (pasal 18b dan pasal 28), UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.36 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka kearifan lokal juga pranata adat telah mengalami pemulihan.

Haruku sebuah negeri di Pulau Haruku (Kabupaten Maluku Tengah) sejak tahun 1600 telah memiliki kearifan lokal berupa sasi yakni larangan untuk melakukan pengambilan, atau pemanenan terhadap suatu komoditi tertentu di laut maupun di darat pada masa tertentu. Kearifan lokal lain misalnya perhitungan umur bulan dihubungkan dengan pengaruhnya pada kondisi biofisik perairan yakni arus dan angin untuk mencari kondisi ideal untuk melakukan pencarian ikan atau pun pengambilan hasil hutan berupa kayu atau bambu untuk bahan bangunan rumah .

Sebagai negeri adat Haruku yang masih memiliki lembaga kewang dan aturan sasi, lembaga kewang berusaha menjaga jati diri sebagai sebuah lembaga adat yang masih eksis melakukan tugasnya sebagai salah satu kekuatan pengelola sumber daya. Berkat kerja keras mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan di negeri Haruku mereka pernah mendapatkan penghargaan kalpataru kategori penyelamat lingkungan tahun 1985 dari Pemerintah Republik Indonesia, serta Satya Lencana Penyelamat Lingkungan tahun 1999 juga dari Pemerintah Republik Indonesia. Masalah atau tantangan dalam bidang lingkungan yang masih dihadapi sampai saat ini oleh Kewang Haruku antara lain :

- o Penegakan hukum adat tidak dapat dijalankan sempurna karena Negeri Haruku belum memiliki pemerintahan yang definitif.
- o Kerusakan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Wai Memi dan Wai Ira akibat penebangan pohon, dan pengambilan bahan galian C.
- o Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya pelestarian lingkungan.
- o Kurangnya penyediaan informasi lingkungan maupun kebijakan pemerintah mengenai lingkungan bagi masyarakat Negeri Haruku.
- o Aktivitas masyarakat memburu burung maleo atau kegiatan berkebun masyarakat yang menghilangkan kawasan bermain dan mencari makan serta bertelur burung maleo sehingga mengancam populasi mereka.
- o Masih ada upaya pihak luar melakukan pendekatan agar diijinkan mengeksplorasi tambang, padahal kegiatan ini telah mendapat penolakan keras dari masyarakat.

Tentunya tidak semua masalah di atas akan ditangani seluruhnya oleh kewang, oleh karena itu sesuai dengan kapasitas yang ada kewang memprioritaskan pada masalah - masalah yang paling mungkin untuk ditangani.

## 1.2. Jumlah Penduduk

Penduduk negeri Haruku berjumlah 2205 jiwa atau 529 kk, terdiri dari 1065 jiwa laki - laki dan 1140 jiwa perempuan

### 1.3. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk antara lain :

- Tani 475 orang
- PNS 45 orang
- Pedagang 18 orang
- Peternak 10 orang
- Nelayan 175 orang Penjahit 6 orang
- Karyawan swasta 5 orang
- Tukang batu 60 orang
- Tukang kayu 60 orang

### 1.4. Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

- Tamat SD 999 orang
- Tamat SLTP 356 orang
- Tamat SMA 212 orang
- D II 20 orang
- D III 10 orang
- S 1 10 orang

## 2. TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG TELAH DICAPAI

- Penghijauan daerah aliran sungai dan tangkapan air serta pengembalian fungsi ekologis hutan bakau tefah dilakukan di beberapa wilayah.
- Semakin meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan peran masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Terbangunnya rasa cinta anak-anak terhadap lingkungan.
- Posisi dan kapasitas kewang dalam menjalankan mandat adat mulai diperkuat.

## 3. KELUARAN YANG TELAH DICAPAI

Keluaran yang telah dicapai oleh program ini secara umum yaitu :

Dalam jangka pendek :

- Telah terjadi transfer nilai, informasi dan ilmu pengetahuan di masyarakat yang bisa merubah persepsi masyarakat yang keliru tentang pengelolaan SDA Memelihara kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan SDA
- Ada pusat kegiatan lingkungan hidup (konservasi, bank bibit, belajar dan bermain) bagi komunitas terutama generasi muda.
- Menguatnya kapasitas kelembagaan juga pengembangan jejaring kerja antar kewang dengan stake holder yang memberikan dukungan (pemerintah, perguruan tinggi, LSM, lembaga donor, pers dll).



Secara tidak langsung proses ini telah diarahkan untuk :  
 Dalam jangka panjang :

- Terjadi peningkatan mutu lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam yang akan menjadi daya dukung lingkungan seperti ikan Lompa dan burung Maleo.

## 4. METODE PELAKSANA KEGIATAN

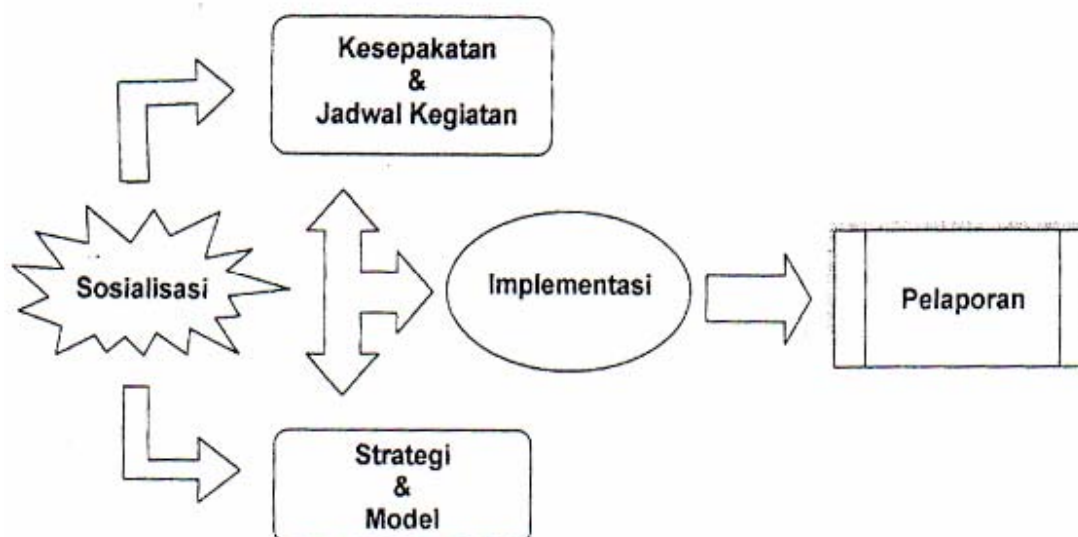
### 4.1. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan

Lokasi kegiatan adalah Negeri Haruku Kecamatan Pulau Haruku kabupaten Maluku Tengah. Penandatanganan kerja sama dilakukan sejak tanggal 1 Nopember 2007, sedangkan kegiatan sendiri dimulai pada awal tahun 2008 meliputi kegiatan sosialisasi untuk mendapatkan masukan-masukan penting bagi pelaksanaan program juga membuat jadwal program.

Kegiatan pasca sosialisasi adalah pembuatan pondasi perpustakaan dimulai bulan Maret 2008, kegiatan berakhir dengan penanaman pohon penghijauan pada akhir bulan Oktober 2008.

### 4.2. Prosedur Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan beberapa tahap yakni :



### 4.3. Sosialisasi kegiatan

Sosialisasi dilakukan pada awal kegiatan bertujuan untuk mendapatkan dukungan bagi program juga masukan penting bagi pengembangan program. Stake holder yang dihubungi adalah pemerintah negeri, tokoh agama, para kepala sekolah tingkat TK hingga SMA, tokoh masyarakat dan aktivis LSM. Pada tahap ini berhasil diperoleh dukungan dari stake holder yang ada juga dibuat rencana kerja serta kontribusi setiap stake holder. Metode yang digunakan adalah *focus group discussion* (FGD).

Dalam proses ini juga dilakukan identifikasi dan pembentukan kelompok sasaran ini dilakukan dalam kelompok masyarakat yang akan menjadi stake holder dalam pelaksanaan program.

Identifikasi stake holder yang dilibatkan didasarkan pada kriteria memiliki concern pada permasalahan lingkungan dan memiliki kemampuan menjadi penggerak masyarakat dalam kaitan dengan pengelolaan SDA berkelanjutan.

Kelompok sasaran program adalah :

#### ➤ Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri

Keterlibatan mereka dalam merencanakan kegiatan dan workshop telah melahirkan beberapa langkah strategis yang berupa rencana tindak lanjut. Sehubungan dengan belum dimilikinya pemerintah negeri defenitif maka beberapa kesepakatan telah diambil untuk nantinya menjadi rencana strategis dalam pengelolaan Sumber Daya Alam nantinya menjadi masukan bagi pemerintahan negeri yang baru.

#### ➤ Guru

Sekolah sangat strategis untuk memajukan kesadaran lingkungan dan dimasukkan dalam kurikulum. Sosialisasi telah dilakukan kepada 3 pimpinan SD dan 1 pimpinan SMP dan SMA.

#### ➤ Tokoh agama dan tokoh masyarakat

Secara strategis kedua unsur ini sangat berperan dalam promosi lingkungan. Tokoh agama yang terlibat adalah 2 orang pendeta ditambah 3 orang majelis jemaat.

#### ➤ Pengasuh SMTPI

Pengasuh Sekolah minggu dan tunas pekabaran injl (SMTPI) sangat potesial karena ini merupakan wadah pembinaan anak dan remaja. Usia ini merupakan usia mencari jati diri oleh sebab itu pemberian pengetahuan dan pengalaman sangat penting termasuk informasi lingkungan. Ada 4 pengasuh SMTPI yang terlibat iangsung dalam pelatihan dan diskusi penyusunan rencana tindak lanjut.

#### ➤ Anak dan remaja

Anak dan remaja di sini adalah anak usia sekolah, lewat proram ini pendidikan diarahkan bukan saja mereka yang masih sekolah saja tetapi menjangkau juga yang putus sekolah yang kemudian diarahkan dalam pembentukan kelompok pencinta alam yang disebut Kewang Kecil. Tugas mereka memang bukan

seperti korps kewang dewasa tetapi menjadi kelompok anak remaja yang memiliki rasa kepedulian kepada alam sekitar.

➔ Aktifis LSM

Diskusi group terfokus dilakukan antara kewang aktifis LSM yakni jaringan Baileo Maluku yang memberikan kontribusi pemikiran dalam membangun strategi serta memfasilitasi kegiatan pelatihan.

## 5. IMPLEMENTASI / PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini dapat diuraikan sebagai berikut :

### 5.1. Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Kawasan bertelur burung Maleo

#### a) Identifikasi masalah sumber air dan burung maleo

Kerusakan Dua sungai yang berada dalam kawasan petuanan negeri Haruku yakni wai Memi dan wai Ira yang kemudian bersatu di muara menjadi wai Learisa Kayeli dimana pada muara ini biasanya ikan lompaa (*trisinabaelama*) masuk dan bertelur.

Kurang lebih tujuh tahun belakang jika terjadi banjir maka terjadi juga erosi yang mengangkat material di sekitar DAS hingga menyebabkan hilangnya sebagian kawasan termasuk sebagian kawasan peletakan telur maleo.

Hasil pengamatan dan identifikasi di lapangan ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab kerusakan antara lain :

- ➔ Penebangan pohon di sepanjang aliran sungai untuk kebutuhan pembangunan rumah pasca kerusuhan 1999 .
- ➔ Pengangkatan batu dan pasir di kali untuk kebutuhan yang sama menyebabkan batuan yang dulu sebagai penyangga di tepi sungai hilang.
- ➔ Kegiatan masyarakat mencuci pakaian di kali dan membuang deterjen dan bahan pemutih pakaian meskipun perlu dibuktikan lebih lanjut, juga patut diduga menjadi racun di sungai bagi ikan.
- ➔ Pemburuan burung maleo dengan menembak atau memasang jerat di tempat bermain dan mencari makan serta pengambilan telurnya oleh manusia dan predator lain.

#### b) Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan diatas adalah ;

Untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pesisir dilakukan penghijauan kembali dan pelarangan melakukan aktivitas yang akan merusak wilayah tersebut. Untuk habitat burung Maleo telah dibuat kawasan budidaya burung Maleo dengan luas 30 x 50 meter yang dipagari setinggi 2 meter yang dirnulai sejak tahun 2006. Jumlah burung Maleo yang telah masuk dalam lokasi ini adalah sekitar 50 ekor dengan jumlah lubang telur di dalam pagar saat ini sekitar 30 lubang sedangkan di luar pagar 20 lubang. Pengelola dari lokasi ini adalah tim Kewang Kecil.

## 5.2. Penghijauan

Dalam kegiatan ini kewang negeri Haruku membuat sebuah kebun pembibitan atau yang disebut dengan bank bibit sebarannya yaitu gayang (250 bibit), gandaria (370 bibit), bintanggor (260 bibit), safawaku (230 bibit), hutung (33 bibit), angka (110 bibit), katapang (53 bibit), langsa (70 bibit), nipa (2.4 bibit), atong (34 bibit), kayu besi pantai (50 bibit) dan bakau (1500 bibit). Luas kebun bibit 20 x 25 m.

Teknis pembibitan : semua bibit disemai di dalam polybag dan pengelola adalah Kewang Kecil.

Jumlah bibit yang sudah ditanam 1850 bibit dengan uraian Jenis tanaman bakau (1500 bibit), bintanggor (300 bibit), kayu besi pantai (50 bibit).

Wilayah penanaman di daerah pinggiran sungai dan pantai oleh tim Kewang Kecil dan masyarakat. Hingga saat ini bibit tanaman penghijauan yang pada awal program berjumlah 2984 anakan kini secara swadaya kewang telah membuat kebun pembibitan atau bank bibit yang menerima bibit penghijauan lalu membagikannya ke masyarakat, koleksinya telah berkisar 3500 anakan dari berbagai jenis pohon kayu maupun pohon buah.

## 5.3. Workshop Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan habitat burung Maleo di negeri Haruku

Waktu kegiatan 30 Agustus 2008 dengan jumlah peserta 27 terdiri dari 22 laki-laki dan 5 perempuan dan berasal dari unsur; Pendidik, Pemerintah negeri, Kewang, Aktivistis LSM, Pengusaha, Tokoh agama dan masyarakat.

Materi workshop:

- Rehabilitasi tempat bertelur burung maleo
- Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS)
- Kaitan dengan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan lingkungan.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan adalah :

1. Perlu adanya revitalisasi kelembagaan kewang negeri Haruku.
2. Harus segera dibuat Peraturan negeri tentang Pengelolaan SDA.
3. Menolak kebijakan pemerintah dalam bentuk apapun yang melakukan eksploitasi yang merusak sumber daya alam di petuanan negeri Haruku
4. Menjalin hubungan kerja sama dengan negeri tetangga dalam pengelolaan kawasan secara bersama. Pendidikan lingkungan wajib dimasukan ke dalam kurikulum muatan lokal pada lembaga pendidikan formal.

➤ Nara sumber : Bpk. Dr. Ir. J.M. Matinahoru

➤ Fasilitator : George Corputty

#### 5.4. Pelatihan Kader Lingkungan untuk komunitas di negeri Haruku

Pelatihan ini bertujuan untuk :

1. Menjaga ekosistem lingkungan terutama menyangkut sumber air dan habitat burung maleo.
2. Agar kader-kader lingkungan melestarikan lingkungan sekitarnya.

Waktu kegiatan 20 September 2008 dengan jumlah peserta 22 orang yang terdiri laki-laki 17 dan perempuan 5 kader lingkungan atau kewang kecil.

Ketrampilan yang didapat :

- Teknik menanam pohon di daerah aliran sungai (DAS) dan pesisir pantai.
- Teknik memantau perkembangan populasi burung maleo (proses bertelur sampai dengan menetas)
- Teknik perlindungan dari predator (manusia maupun binatang)

➔ Nara sumber : Bpk. Dr. Ir. J.M. Matinahoru dan Bpk.Ir. A. Tuhumury,MS

➔ Fasilitator : George Corputty

#### 5.5. Pembuatan perpustakaan untuk masyarakat

##### a). Pembuatan gedung perpustakaan

Kewang telah membangun sebuah taman bacaan atau perpustakaan sebagai sarana informasi dan dokumentasi bagi masyarakat negeri Haruku khususnya anak-anak.

Gedung perpustakaan yang dibangun berukuran 5 x 5 m berdinding papan beratap rumbia, dilengkapi penerangan berdaya 450 W.

##### b). Pengadaan buku tentang Lingkungan

Koleksi judul saat ini yang dimiliki sekitar 600 judul meliputi buku bacaan, majalah, buletin dan laporan penelitian / skripsi, Jumlah kunjungan yang tercatat hingga akhir Oktober 2008 sebanyak 1047 pengunjung.

##### c). Pembuatan meja, kursi dan alat penunjang lain

Perpustakaan memiliki fasilitas penunjang 4 buah bangku panjang, 1 meja tulis serta sebuah taman baca sekaligus tempat bermain bagi anak.

#### 5.6. Kampanye Lingkungan

##### a). Pembuatan papan larangan pemanfaatan SDA destruktif serta larangan pengrusakan ekosistem.

Kampanye lingkungan digalakan dengan pencaanangan papan larangan pemanfaatan SDA dengan metode destruktif serta larangan pengambilan telur maleo

Dampak yang bisa dilihat adalah mulai berhentinya kegiatan pengambilan batu di kali Learissa Kayeli. Sedangkan kegiatan bom ikan masih terjadi sesekali tetapi bukan dilakukan oleh penduduk desa Haruku.

b). **Pembuatan kalender**

Pembuatan kalender lingkungan merupakan bentuk kampanye yang dilakukan, pesan yang dimasukkan bertujuan mengubah perilaku masyarakat untuk berusaha mengelola secara lestari bukan saja mengeksploitasi,

c). **Lomba menggambar dan menulis opini**

Selain kalender lingkungan bentuk lain kampanye lingkungan adalah menggelar Lomba melukis dan menulis opini untuk anak SD, SMP dan SMU yang di dilaksanakan secara bersamaan, dengan peserta sebanyak 134 anak .

Hasil lukisan diseleksi oleh juri Dani Utra seorang aktivis lingkungan yang pernah mendapat pendidikan kampanye dengan media karikatur sedangkan untuk penulisan opini menghadirkan Ronny Samloy SH wartawan media cetak Harian Ambon Ekspres.

d). **Membuat website kewang**

Melalui program ini kewang difasilitasi memiliki website tersendiri [www.kewang-haruku.org](http://www.kewang-haruku.org) untuk menyampaikan kepada pihak lain apa saja aktivitas kewang Haruku yang selama ini jauh dari publikasi. Website ini di desain oleh Irwanto,S.Hut. MP

## 6. REKOMENDASI

### ➔ Masyarakat

1. Penyadaran bagi masyarakat tidak bisa dijalankan secara insidental saja namun terintegrasi dan berkesinambungan
2. Perlu ada peraturan di tingkat lokal lebih up to date dengan perkembangan zaman.
3. Perlu ada rencana strategis pembangunan negeri yang berperspektif lingkungan.

### ➔ Pemerintah

Perlu mendukung inisiatif dari organisasi lokal dalam peran pelestarian Lingkungan terutama pemberdayaan dan penguatan mereka

### ➔ NFP Facility

Perlu ada dukungan program pendidikan lingkungan yang kontinyu bukan saja finansial tetapi terutama jaringan kerja dan advokasi



## YAYASAN TITAMAE

### MODEL REHABILITASI LAHAN KRITIS DENGAN POLA AGROFORESTRY DI DUSUN SOKOWATI, KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

#### 1. PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Permasalahan utama yang dihadapi Dusun Sokowati adalah terdapatnya bagian dusun yang cukup luas yang telah berubah menjadi lahan kritis selama beberapa dasawarsa terakhir.

Terjadinya lahan kritis itu merupakan akibat dari siklus perladangan berpindah dengan pengelolaan yang salah di masa lalu. Lahan-lahan kritis tersebut saat ini semuanya merupakan lahan yang terbengkalai sebab penduduk tidak dapat memanfaatkannya dengan tingkat teknologi yang mereka miliki.

Lahan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk konservasi serta peningkatan pendapatan penduduk apabila dapat dihutankan kembali dengan pola agroforestry. Dengan demikian maka Yayasan Titamae memprakarsai untuk merehabilitasi lahan kritis dengan pola agroforestry sebagai model untuk dikembangkan. Kegiatan ini dapat dilakukan berkat bantuan dana dari NFP-FAO kerja sama dengan Fakultas Pertanian.

##### 1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan lahan dengan pola agroforestry serta mempraktekannya pada satu kebun percontohan.
- b. Pemanfaatan lahan dengan pola ini dapat memberikan hasil, baik hasil peranian maupun hasil hutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Diharapkan dalam jangka panjang terbentuknya hutan, yang dapat memberikan fungsi ganda yaitu fungsi produksi kayu maupun fungsinya sebagai pencegahan erosi dan perbaikan tata air tanah serta fungsi lainnya.

##### 1.3. Output yang diharapkan

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- a. Pola rehabilitasi lahan-lahan kritis di Dusun Sokowati diharapkan sebagai model untuk diterapkan di desa-desa sekitar.
- b. Penduduk Sokowati dan sekitarnya dapat merehabilitasi lahan kritis dan dapat mencegah lahan-lahan lainnya agar tidak menjadi kritis melalui pola agroforestry.

- c. Dalam jangka panjang dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
- d. Sistem persediaan air tanah dapat diperbaiki dan erosi tanah dapat dicegah.

## 2. GAMBARAN UMUM LOKASI KEGIATAN

### 2.1. Penduduk

Penduduk Dusun Sokowati sebanyak 88 KK dan 435 jiwa di mana Kelompok umur 17 tahun ke atas sebanyak 221 orang dan secara keseluruhan ratio laki-laki dan perempuan sebesar 1:1,14.

### 2.2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk dusun sokowati sebagian besar adalah petani dan sebagian kecil peternak dan pegawai negeri Sipil.

### 2.3. Pendidikan

Jumlah penduduk sebesar 435 orang dapat dirinci berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

- Lulusan Sekolah Dasar atau setingkat sebanyak 383 orang
- Lulusan SMP atau setingkat sebanyak 20 orang
- Lulusan SMA atau setingkat sebanyak 30 orang
- Lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 2 orang

### 2.4. Pendapatan

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Dusun Sokowati adalah petani dan hanya sebagian kecil sebagai pedagang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan tingkat pendapatan berkisar Rp 250.000,- sampai Rp 2.000.000,- per bulan.

## 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

### 3.1. Lokasi dan waktu Pelaksanaan

Daerah yang dipilih untuk kebun percontohan adalah areal kebun jemaat Di Dusun Sokowati Desa Unitetu Kabupaten Seram Bagian Barat, direncanakan berlangsung selama tujuh bulan sejak Maret 2008.

### 3.2. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kegiatan-kegiatan yang direncanakan adalah:

- a. Sosialisasi kegiatan dan pembentukan kelompok kerja
- b. Pelatihan/workshop
- c. Implementasi kegiatan



#### 4. MEMBUAT TRAINING KEPADA PETANI KELOMPOK KERJA TENTANG PERENCANAAN, IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SISTEM PERTANIAN MENETAP DENGAN POLA AGROFORESTRY

Pengelolaan sistem pertanian menetap dengan pola agroforestry dilakukan oleh Yayasan Titamae melalui kegiatan-kegiatan: Pembentukan kelompok Kerja Partisipatif, Workshop dan Penerapan/Implementasi Pengelolaan Sistem Pertanian Menetap dengan Pola Agroforestry.

##### 4.1. Pembentukan Kelompok Kerja Partisipatif

Kelompok kerja partisipatif dibentuk tanggal 5 April 2008 (Lampiran 1a dan 1b) dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab :
  - H. Iyai (Kepala Dusun)
  - Pdt.Ny. Ch Patty/Tita (Ketua Majelis Jemaat)
- b. Ketua Kelompok : John Parakate
- c. Anggota :
  1. M Simson Parakate
  2. Yeheskel Iyai
  3. Rolly Lattu
  4. Nimbrot Neite
  5. Yusup Laine
  6. Risat Yawate
  7. Yunus Iyai
  8. Yosepus Kaihena
  9. Ruben Urasana/Herman Urasana
  10. Nani Urasana
- d. Pengawas Lapangan (Titamae):
  - Arnold I. Kewilaa, SPt
  - Petra Kastanya, SE

##### 4.2. Workshop

###### 4.2.1. Persiapan Materi Pelatihan

Adapun materi pelatihan yang disiapkan meliputi :

- a. Konsep Agroforestry dan Penerapannya, (Ir B. Kewilaa, MS)
- b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Agroforestry di Lahan Kritis, (M. Tjoa, SHut, MP).
- c. Metode Pemilihan Pohon Induk Benih Tanaman Hutan dan Perkembunan (Ir L. Riupassa)
- d. Perbanyak Tanaman Dalam Sistem Agroforestry (M. Loiwatu, SHut, MP)
- e. Teknik Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan (Ir L. Riupassa)
- f. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Dengan Sistem Agroforestry (H. Lelloteri, SHut, MP)

#### 4.2.2. Penyiapan Sarana dan Prasarana Pelatihan

Sarana dan prasarana pelatihan yang disiapkan meliputi: Alat tulis menulis, power point, polybag, rotone F, gunting pangkas, kwaz , cabutan tanaman, stek tanaman, tanah, proyektor (LCD), tali dan rumah kepala desa sebagai tempat kegiatan workshop.

#### 4.2.3. Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan ini diikuti oleh 12 orang berlangsung selama dua hari (jadwal pelatihannya Lampiran 2a dan Foto Arahan Ketua Proyek dan Kepala Dusun untuk membuka Wokrshop, Lampiran 2b). Kegiatan ini meliputi kegiatan teori dan kegiatan praktek. Kegiatan teori disampaikan oleh :

- a. Ir. B. Kewilaa, Ms tentang Konsep Agroforestry dan Penerapannya.
- b. M. Tjoa, SHut, MP tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Agroforestry di Lahan Kritis.
- c. Ir. L.L. Riupassa tentang Metode Pemilihan Pohon Induk Benih Tanaman Hutan dan Perkembunan; serta Teknik Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan.
- d. M. Loiwatu, SHut, MP tentang Perbanyak Tanaman Dalam Sistem Agroforestry.
- e. H. Lellotery, SHut, MP tentang Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Dengan Sistem Agroforestry,.

Pada kegiatan praktek diajarkan:

- a. Cara penggunaan Rotone F pada :
  - o Cabutan anakan
  - o Stek Tanaman
- b. Cara Okulasi Tanaman
- c. Cara Mencangkok Tanaman
- d. Cara Penetapan Bibit Unggul
- e. Cara Menanam

#### 4.2.4. Pelaksanaan Sistem Agroforestry (Implementasi Pola Agroforestry)

##### a. Penetapan Lokasi dan Pemetaan

Dusun Sokowati berada di bawah pemerintahan desa Hunitetu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Dusun ini berada di pedalaman, kurang lebih 12 Km dari kota Kairatu (Lampiran 12a). Areal yang digunakan untuk kebun percontohan adalah areal kebun Jemaat yang tidak produktif lagi, kurang lebih 1000 m dari Gereja yang dijadikan sebagai titik triangulasi (titik star).

##### b. Pembersihan Lahan

Pembersihan lahan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pembersihan areal tanam. Kegiatan ini dilakukan dalam 2 tahapan

##### c. Pengadaan Bibit

Pengadaan bibit meliputi bibit tanaman Kehutanan, tanaman Perkebunan, tanaman pertanian dan sayur-sayuran ( durian, rambutan, mangga, kenari, mahoni,

angka, advokad, agathis, lenggua; kelapa, pisang; ketela pohon, keladi, jagung, labu; sawi, ketimun, kacang buncis dan kacang panjang), Lampiran 14.

**d. Rencana Penanaman dan Pemetaan**

Rencana penanaman seluas 1 ha

**e. Realisasi Penanaman Sesuai Pola Agroforestry dan Pemetaan**

Realisasi penanaman sesuai pola agroforestry yaitu:

- Penanaman Kelapa  
Penanaman kelapa sebanyak 58 anakan dengan jarak tanam 10 m x 10 m.
- Penanaman Pisang  
Penanaman pisang sebanyak 47 pohon dengan jarak tanam 5 m x 5 m
- Penanaman Jagung  
Penanaman jagung seluas 50 m x 25 m
- Penanaman Kacang Panjang  
Penanaman kacang panjang seluas 5 m x 20 m
- Penanaman Buncis  
Pananaman bunci seluas 5 m x 25 m
- Penanaman Ubi Kayu  
Penanaman ubi kayu seluas 25 m x 20 m
- Penanaman Keladi  
Pananaman keladi seluas 10 m x 10 m
- Pananaman Labu seluas 25 m x 20 m
- Bedeng Sayur Sawi  
Bedeng sawi seluas 15 m x 15 m
- Penanaman Anakan Durian  
Penanaman anakan durian sebanyak 29 anakan
- Penanaman Pohon Rambutan  
Penanaman anakan rambutan sebanyak 56 anakan
- Pemeliharaan (Pembuatan Pagar)

**f. Penyulaman dan Penanaman Tahap Kedua.**

Kegiatan penyulaman I meliputi kegiatan pebersihan pada areal penanaman tahap I dan perbaikan pagar sedangkan penanaman tahap II meliputi kegiatan penanaman pada lokasi II seluas 50 m x 50 m. Tanaman yang ditanam berupa Cacao, Kelapa, Duria, Rambutan, Mangga, Lenggua, Nangka dan Mahoni.

**g. Penyulaman Tanaman Kehutanan Tahap II dan Penanaman Tanaman Pertanian Tahap II**

Kegiatan penanaman tanaman pertanian tahap II meliputi kegiatan pebersihan dan penanaman pada areal penanaman tahap I seluas 50 m x 25 m sedangkan penyulaman tanaman Kehutanan tahap II meliputi kegiatan penanaman pada lokasi I dan lokasi II seluas 100 m x 50 m. Tanaman pertanian yang ditanam meliputi jagung dan boncis, sedangkan tanaman kehutanan Durian, Rambutan dan Mangga.

## 5. REKOMENDASI

Setelah menyelesaikan kegiatan rehabilitasi lahan kritis dengan pola agroforestry di Dusun Sokowati, dengan hasil sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka kami memberikan beberapa rekomendasi.

### ➔ Kepada Masyarakat

- a. Kebun percontohan Rehabilitasi lahan kritis dengan pola agroforestry di dusun Sokowati merupakan model untuk dikembangkan di desa-desa sekitar.
- b. Rehabilitasi lahan kritis dengan pola agroforestry dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dalam jangka panjang dapat mencegah bahaya banjir yang sering terjadi.

### ➔ Kepada Pemerintah

- a. Perlu merencanakan dan menetapkan luasan lahan kritis untuk dikelola dengan pola agroforestry secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencegah meluasnya lahan kritis.
- b. Rehabilitasi lahan kritis dapat ditangani oleh dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan dengan pola agroforestry.
- c. Proyek-proyek rehabilitasi lahan kritis perlu melibatkan masyarakat sebagai pemilik tanah.
- d. Rehabilitasi lahan kritis sebaiknya menggunakan jenis-jenis kayu yang tergolong multiple purpose tree species.

### ➔ Kepada FAO

- a. Jangka waktu penyelesaian proyek rehabilitasi lahan kritis selama tujuh bulan dengan biaya yang terbatas belum dapat memberikan suatu hasil yang sempurna dengan penerapan pola agroforestry karena harus ada pergiliran tanaman pertanian
- b. Jangka waktu penyelesaian proyek yang singkat karena keterbatasan dana, untuk Tanaman kehutanan belum sampai pada masa pertumbuhan normal apalagi sampai mencapai klimaksnya.



## YAYASAN TOMA LESTARI

### PERBAIKAN SISTEM PEMANFAATAN LAHAN BERDASARKAN PENDEKATAN ZONAFIKASI LAHAN DI HORALE

#### 1. PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

- Banyak pemanfaatan lahan hutan di Pulau Seram belum sesuai dengan karakteristik lahan, pada banyak tempat masyarakat hanya melakukan pemanfaatan lahan pada lokasi yang mereka sukai dan dianggap baik.
- Banyak lokasi di Pulau Seram mulai terancam oleh bentuk pemanfaatan lahan yang tidak tepat yang selama ini dipraktikkan.
- Pemilihan jenis tanaman yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan yang memperpendek jangka waktu pemanfaatan lahan.
- Sistem pemanfaatan seperti ini mempercepat pembukaan lahan hutan dan mempercepat proses kerusakan tanah dan penurunan kesuburan tanah.

Strategi yang digunakan adalah: "Social Forestry", dengan teknik pengelolaan "Management Regime (MR)"

Management Regime : adalah pengelolaan lahan hutan yang bervariasi dari petak ke petak untuk memaksimalkan produktifitas tiap jengkal lahan hutan sesuai kondisi fisik lahan dan faktor ekonomi yang menyertainya guna meningkatkan pendapatan masyarakat..

Desa Horale dipilih karena :

- Terletak di Tengah Teluk Saleman  
2 sungai yang mengalir dalam wilayah desa ini berpotensi menimbulkan sedimentasi bila daerah hulu sungainya mengalami kerusakan akibat pembukaan lahan.
- Wilayah desa Horale cocok untuk implementasi kegiatan  
Bentuk relief wilayahnya yang landai s/d bergunung memberi kesempatan pengembangan berbagai komoditi tanaman.
- Dengan adanya jalan lintas Seram posisi desa Horale menjadi sangat strategis karena berada pada persimpangan jalan Seram Utara, baik yang ke bagian Utara-Timur maupun Utara-Barat, posisi ini bisa menjadi *entri point* bagi penerapan pemanfaatan lahan yang baik bagi masyarakat di Utara Pulau Seram.
- Ada keinginan penduduk Horale untuk mengolah lahan dengan metode yang lebih baik

## 1.2. Tujuan Kegiatan

Mengkaji bentuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan lokal dan mengarahkannya pada bentuk pengelolaan lahan yang lebih baik berdasarkan pendekatan zonafikasi lahan, bagi upaya konservasi lahan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

## 1.3. Output Kegiatan

### 1.3.1. Jangka Pendek (selama pelaksanaan Kegiatan)

- a. Memperbaiki ketrampilan masyarakat dalam mengolah lahan.
- b. Meningkatkan kapasitas kerja masyarakat secara organisasi.
- c. Membuka wawasan pikir masyarakat untuk memperoleh pendapatan lebih baik lewat metode pengelolaan lahan yang benar.
- d. Masyarakat menyadari potensi-potensi SDA yang mereka miliki dan mengetahui sebaran potensi-potensi tersebut.

### 1.3.2. Jangka Panjang (setelah pelaksanaan kegiatan)

- a. Memperbaiki dan mempertahankan kualitas ekosistem lahan hutan.
- b. Masyarakat mengadopsi Kriteria Management Regime di lahan mereka, sehingga upaya merehabilitasi lahan dan melestarikan daerah tangkapan air dalam waktu panjang bisa tercapai.
- c. Pemanfaatan hasil hutan non kayu secara lestari dan berlanjut.
- d. Pengembangan potensi ekowisata pada hutan rakyat dan hutan adat
- e. Peningkatan taraf hidup masyarakat.

## 2. GAMBARAN UMUM LOKASI KEGIATAN

### 2.1. Letak Geografis dan Letak Wilayah

- Secara geografis wilayah desa Horale terletak antara 02°54'00" - 03°04'30" LS dan 129°02'00" - 129°07'30" BT. (*hasil interpretasi peta JOG, 1976*)
- Secara administratif desa horale terletak pada Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah.
- Secara tanda alam desa Horale terletak di bagian Tengah-dalam Teluk Saleman.
- Batas petuanan desa Horale adalah sbb:  
dari Wai Tali di Tanjung Tale Tetui (batas Barat dengan dusun Wailulu desa Karlutu) sampai Sungai Wai Tolai (batas Timur dengan desa Saleman) dari pegunungan Lumute (batas Selatan-Barat dengan desa Waraka) sampai pegunungan Sopenia (batas Selatan-Timur dengan desa Nuaulu) dan sungai Wai Korule (batas Timur dengan desa Masihulan) serta Gunung Hatu Saka (batas Timur-Utara dengan desa Sawai) (*Peta Petuanan Negeri Horale Nakane, 1930, 2007*).

## 2.2 Kondisi Biofisik

### 2.2.1. Topografi

- Sebagian besar berbukit s/d bergunung dengan kelerengan > 40 %, sebagian kecil bergelombang dan landai dengan kelerengan < 8 %. (*Atlas Zona Agroekologi Indonesia. PPPTA-Dept. Pertanian, 2003*)
- Daerah pegunungan penting di wilayah petuanan Negeri Horale ada di bagian dalam yaitu Pegunungan Lumute di bagian Barat sampai ke gunung Sopania di Bagian Timur
- Gunung Sopania dan Gunung Pos Lawai merupakan daerah yang tertinggi; Gunung Sopania tingginya 1.250 m dpl dan Gunung Pos Laway tingginya 1.342 m.dpl
- Daerah landai desa Horale masuk dalam wilayah yang diklasifikasikan sebagai daerah "rawan banjir", sedangkan daerah berbukit dan pegunungannya masuk dalam klasifikasi daerah yang "rawan longsor" (*Monk, 2000*)

### 2.2.2. Iklim

- Seperti pulau lain di Maluku iklim di Pulau Seram juga di pengaruhi oleh angin monsum yang menentukan bulan basah dan bulan kering, puncak bulan basah pada Januari s/d Maret, sedangkan puncak bulan kering terjadi pada Agustus s/d Oktober (*Monk, 2000*).
- Berdasarkan Regime Zona Agroekologi wilayah desa Horale memiliki suhu yang panas dan lembab, karenanya kegiatan pertanian harus diarahkan pada pembangunan hutan tanaman produksi dan pertanian lahan kering (*Atlas Zona Agroekologi Indonesia PPPTA-Dept. Pertanian, 2003*).

### 2.2.3. Tanah

Ada 2 jenis tanah di wilayah petuanan desa Horale;

- Tanah yang dominan adalah tanah dari subordo *Rendolls*, yang tersebar dari daerah pesisir pantai sampai daerah bergunung di pegunungan Lumute dan gunung Sopania. Rendolls selalu mengalami pelapukan sedang, drainasenya baik dengan tekstur yang halus karena itu Rendolls merupakan tanah yang relatif subur, namun tipe tanah ini memiliki kedalaman horison yang dangkal, tanahnya berbatu dengan dasar tanah berupa kapur. Tanah Rendolls mudah hilang dalam peristiwa pengikisan oleh air dan erosi permukaan apa lagi bila vegetasi penutupnya telah dibuka.
- Jenis tanah lainnya adalah *Dysropepts*, tipe tanah ini tersebar dari daerah pesisir pantai sampai daerah bergunung terutama di bagian Barat (*Monk, 2000*)  
Dysropepts agak terlapuk, teksturnya halus sampai sedang, drainasenya cukup baik, tanahnya kaya akan kuarsa dan batu pasir bersifat masam, memiliki kedalaman horizon yang dangkal sampai dalam, tipe tanah Dysropepts juga rawan rusak bila vegetasi penutupnya hilang (*Monk, 2000*)

### 2.2.4. Hidrologi

- Menurut Peta Hidrologi Indonesia wilayah desa horale dan sekitarnya memiliki suplai air tanah sedang (*Direktorat Geologi Tata Lingkungan, 1981*).
- Menurut Peta Zona Agroekologi Indonesia (*PPPTA-Dept. Pertanian, 2003*) drainase di wilayah desa Horale masuk dalam kategori baik.

### 2.2.5. Penutupan Lahan

- 90 % Wilayah desa Horale didominasi oleh hutan basah selalu hijau sebagai penutup alami lahannya
- 5 % lahan di tutupi oleh hutan basah gugur daun dan padang sabana dalam bentuk hutan mozaik
- 5 % lahannya ditutupi oleh lahan perladangan dan bekas ladang.
- Terdapat 3 status lahan hutan, yaitu hutan produksi konversi (HPK), hutan lindung (HL) dan hutan produksi terbatas (HPT). Sekitar 60 % wilayah desa Horale berstatus sebagai Hutan Produksi Konversi

### 2.3. Penduduk dan Pendidikan

- Jumlah penduduk desa Horale tahun 2008 adalah sebanyak 124 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 600 jiwa.
- Desa Horale terdiri atas 3 pemukiman; yaitu Horale sebagai desa induk, dusun Saka dan pemukiman resettlement Tanjung Talitetui.
- Penduduk Horale yang menetap umumnya berusia lebih dari 30 tahun, anak-anak berusia < 12 tahun serta para manula,
- penduduk usia belajar (SMP, SMU dan Perguruan Tinggi); 12 s/d 25 tahun berada di kota kecamatan, kota kabupaten dan kota provinsi.
- Desa Horale memiliki satu sekolah dasar dengan jumlah murid secara keseluruhan sebanyak 87 siswa.

### 2.4. Mata Pencaharian dan Pendapatan

- Semua penduduk desa Horale memiliki mata pencaharian sebagai petani peladang dan sebagian ada yang merangkap sebagai nelayan (subsistence).
- Umumnya penduduk desa Horale berada pada tingkat kesejahteraan yang tergolong rendah, pendapatan rata-rata masyarakat Horale dalam 1 tahun mencapai Rp.6.084.613 atau sekitar Rp.500.000/bulan. (*Tjoa, 2005*).

## 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

### 3.1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan berlangsung selama 8 bulan dari bulan Maret 2008 s/d Oktober 2008.

### 3.2. Bentuk-bentuk kegiatan

Bentuk-bentuk kegiatan yang dikerjakan adalah:

1. Studi tentang Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat Berdasarkan Pengetahuan Lokal
2. Workshop Teknik Pengelolaan Lahan Hutan dengan Metode Management Regime
3. Implementasi Kriteria Management Regime di Pilot Site
4. Identifikasi Potensi Ekowisata dan Hasil Hutan Non Kayu



Dalam realisasi kegiatan volume pekerjaan bertambah melebihi rencana kerja semula

- karena ada kegiatan lain yang ditambahkan sebagai dampak dari penguatan kerja
- adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) akibat tragedi penyerangan yang dilakukan oleh desa tetangga (Saleman) yang menghancurkan seluruh perumahan dan infrastruktur desa Horale.

### 3.3. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

#### 3.3.1. Sosialisasi Kegiatan

Metode Sosialisasi

- Focus Group Discussion (FGD) dengan para tokoh masyarakat guna mendapatkan kesepahaman tentang kegiatan yang melibatkan masyarakat.
- Wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui sistem pemanfaatan lahan secara tradisional yang selama ini dipraktekan untuk kemudian di cari sisi baiknya dan diarahkan pada pemahaman tentang kegiatan pengelolaan lahan hutan dengan metode Management Regime yang akan diterapkan.
- Peninjauan lapangan untuk mengidentifikasi lokasi yang lahannya cocok untuk implementasi metode pengelolaan lahan.
- Identifikasi masyarakat yang memiliki kapasitas yang memadai untuk mengikuti kegiatan; sebagai peserta workshop dan anggota kelompok dalam implementasi kriteria Management Regime, dari identifikasi ini tercatat sebanyak 30 orang masyarakat Horale yang dianggap layak.

#### 3.3.2. Pelaksanaan Kegiatan

##### 3.3.2.1. Studi Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat Berdasarkan Pengetahuan Lokal

Metode pelaksanaannya berupa:

- 1) Kunjungan dan pengamatan ke lahan masyarakat
- 2) Wawancara dengan pemilik lahan

##### 3.3.2.2. Workshop Teknik Pengelolaan Lahan Hutan dengan Kriteria Management Regime dan Pelatihan Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO)

Metode pelaksanaannya berupa:

1. Penyampaian materi dan diskusi
2. Praktek lapangan tentang materi yang telah disampaikan.

##### 3.3.2.4. Implementasi Metode Management Regime

Dilakukan dengan metode demonstrasi plot (Pilot Site).

Prosedur pelaksanaannya meliputi :

1. Penentuan lokasi kerja
2. Pembentukan kelompok kerja
3. Penyiapan lahan penanaman dan lokasi pesemaian
4. Pengadaan tanaman (Annual, Perennial dan Forest Crops)
5. Pembenahan lahan
6. Penanaman
7. Pemeliharaan \*\*

### 3.3.2.5. Identifikasi Potensi Ekowisata dan Hasil Hutan Non Kayu

Dilakukan dengan Metode:

1. Focus Group Discussion (FGD)
2. Kunjungan ke lokasi potensi

### 3.3.2.6. Bantuan Pasca Tragedi Penyerangan (Force Majeure)\*\*

Dilakukan dengan Metode:

1. Bantuan darurat berupa pemberian bahan makanan, alat masak, pakaian layak pakai, dan bahan pembersih \*\*
2. Pemulihan mental berupa hiburan kepada anak-anak dan pemberian bingkisan \*\*

**Keterangan:** \*\* = bentuk kegiatan yang bertambah

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Starting Proyek

Kegiatan Starting project berupa:

- Pertemuan konsolidasi tim kerja
- Penyusunan bentuk kegiatan dan waktu pelaksanaannya
- Penyusunan metode dan standarisasi metode-metode kerja

### 4.2. Studi Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Pengetahuan Lokal

Kerja persiapan Studi Pemanfaatan Lahan meliputi :

- Pengadaan stationery,
- Pengadaan supporting equipment dan peta-peta kerja,
- Identifikasi calon responden
- Kerja lapangan ke Horale selama 4 hari.

### 4.3. Workshop Teknik Pengelolaan Hutan dengan Kriteria Management Regime (MR) dan Pelatihan Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO)

Kerja persiapan Workshop, meliputi;

- Pengadaan stationery dan supporting equipment,
- Identifikasi calon peserta dan stakeholder,
- Penyusunan materi-materi workshop Teknik Pengelolaan Hutan dan pelatihan pembuatan VCO.

Kunjungan kerja pelaksanaan workshop di Horale selama 7 hari, kegiatannya berupa:

- Pertemuan dengan Pemerintah Desa dan Saniri Negeri Horale.
- Identifikasi dan pendaftaran peserta workshop

- Wawancara pendahuluan dengan beberapa masyarakat yang dianggap berhasil melaksanakan usaha perladangan; hal ini dibutuhkan untuk memperkuat esensi pelaksanaan workshop,
- pembenahan Balai desa sebagai lokasi pelaksanaan workshop
- pengadaan sarana dan prasarana workshop yang dibutuhkan.
- Pelaksanaan Workshop dan pelatihan pembuatan VCO

#### A. Workshop Teknik Pengelolaan Hutan

**Workshop Hari 1** ; penyampaian materi dan diskusi,

Materi yang disampaikan terdiri atas:

1. Pemanfaatan lahan dengan sistem Management Regime oleh M.Tjoa S.Hut MP
2. Hutan sebagai penghasil jasa lingkungan oleh J.Putuhena S.Hut MSi
3. Petunjuk Praktis Pemilihan Pohon Induk Benih Tanaman Hutan oleh Ir.L.L.Riupasa
4. Benih dan Teknik Perkecambahan oleh Ir.L.L.Riupasa
5. Petunjuk praktis pembibitan tanaman hutan oleh M.Loiwattu S.Hut MP
6. Teknik penanaman dan pemeliharaan tanaman oleh H.Lelloltery S.Hut MP

**Workshop Hari 2** : praktek kerja lapangan di lahan milik peserta workshop

- Workshop berlangsung dari pagi hari jam 08.30 s/d 17.00 WIT,
- Workshop diikuti oleh 30 orang peserta dan 6 orang undangan
- Workshop berjalan baik dengan tingkat perhatian yang tinggi dari peserta.

#### B. Pelatihan pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO)

**Pelatihan hari 1:** Penyampaian materi tentang VCO dan manfaatnya

**Pelatihan hari 2:** Teknik pengambilan hasil VCO yang telah dibuat.

- Pelatihan pembuatan VCO dilakukan untuk memperkuat esensi kegiatan dan membagi pengetahuan teknologi pemanfaatan buah kelapa kepada masyarakat.
- Pelatihan diikuti oleh 25 orang peserta
- Pelatihan ini berjalan baik dan mendapat perhatian yang serius dari peserta.

### 4.4. Implementasi Kriteria Management Regime

Tahapan Implementasi

#### 1. Penentuan lokasi contoh (Pilot Site)

Lokasi pilot site pemanfaatan lahan dengan kriteria Management Regime adalah di kebun jemaat GPM Horale.

#### 2. Pembentukan kelompok kerja,

- Kelompok kerja ini dibentuk di akhir pelaksanaan workshop yang berasal dari para peserta workshop yang berjumlah 30 orang
- kelompok kerja dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok kerja terdiri atas 10 orang.

### 3. Penyiapan Lokasi Penanaman

- Pembersihan lokasi penanaman. (tahap 1 ).

### 4. Pengadaan Anakan Pohon dan Pembuatan lokasi pesemaian

- Pengadaan anakan pohon (Tahap 1); dari jenis taman buah-buahan yaitu; duku, alpukat, durian dan nangka
- Jumlah anakan pohon 110 anakan. dibeli dari lokasi pesemaian di Ambon dan merupakan anakan pohon dari jenis yang bersifat unggulan.
- Pembuatan lokasi pesemaian di dusun Saka

Anakan Tanaman yang di sediakan berasal dari 3 bentuk asal bibit yaitu:

1. Tanaman cabutan; untuk tanaman kehutanan jenis lokal
2. Tanaman yang dibeli; untuk jenis tanaman buah-buah.
3. Tanaman disemai sendiri; untuk tanaman pertanian (tanaman umur pendek dan tanaman semusiman )

Tanggal 02 Mei 2008 desa Horale mengalami tragedi penyerangan dari desa tetangga (Saleman) yang menghancurkan pemukiman dan semua sarana yang ada)

### 5. Konsolidasi Kegiatan

Diskusi tim kerja membahas kelanjutan kegiatan di Horale setelah tragedi penyerangan dan setelah penerimaan dana tahap 2, disepakati 2 hal yaitu:

- Rencana-rencana kegiatan tidak berubah hanya waktu pelaksanaan disesuaikan
- Bentuk pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan system semi padat karya; setiap kerja di pilot site anggota kelompok kerja diberi upah perhari untuk membantu meringankan hidup mereka yang terpuruk akibat tragedi penyerangan.
- Kunjungan kerja ke Horale untuk konsolidasi kegiatan dengan pemerintah Negeri Horale, pimpinan jemaat dan kelompok kerja.
- Pertemuan sepakat untuk melanjutkan kegiatan meskipun masyarakat Horale dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan konsolidasi:

- Pengadaan anakan pohon (tahap 2); dari jenis tanaman kehutanan, dengan sistem cabutan kemudian dibuat stump dan semai oleh anggota kelompok kerja. Jumlah anakan yang dikumpulkan sebanyak 150 anakan.
- Perbaikan lokasi pesemaian dan Pembersihan lokasi penanaman setelah hampir 2 bulan terabaikan.
- Koleksi data posisi dan luas kebun jemaat untuk membuat peta situasi lokasi dan desain penanaman.

### 6. Penanaman

Kerja persiapan kegiatan penanaman meliputi:

- Pengadaan anakan pohon (tahap 3), dari jenis pohon buah-buahan; rambutan, durian dan lemon cina. Jumlah anakan pohon sebanyak 300 anakan
- Pengadaan bahan dan material pendukung,

- Menyelesaikan desain penanam sesuai kriteria Management Regime

Kujungan kerja kegiatan penanaman selama 6 hari kerja, kegiatan penanam sendiri berlangsung selama 3 hari kerja

- Hari 1 : pembersihan dan pembenahan areal tanam pada lokasi yang berlereng  
 Hari 2 : penanaman lokasi berlereng dan pembersihan/pembenahan lokasi datar  
 Hari 3 : penanaman pada lokasi yang datar.

Hal-hal yang menarik dalam kegiatan penanaman adalah :

- Terjadi diskusi di lokasi penanaman tentang jumlah jenis tanaman kehutanan
- Semua anggota kelompok kerja yang berjumlah 30 orang terlibat,
- Masyarakat yang bermukim di resettlement Tanjung Talitetui turut membantu
- pimpinan jemaat GPM Horale ; ibu Pdt M.Latuperisa dan beberapa orang ibu dari wadah pelayanan wanita jemaat GPM horale turut terlibat
- Tiga hari kerja penanaman menjadi kegiatan yang menyita perhatian masyarakat Horale dan masyarakat dari desa lain yang melintas di lokasi penanaman karena kerja ini melibatkan cukup banyak orang.

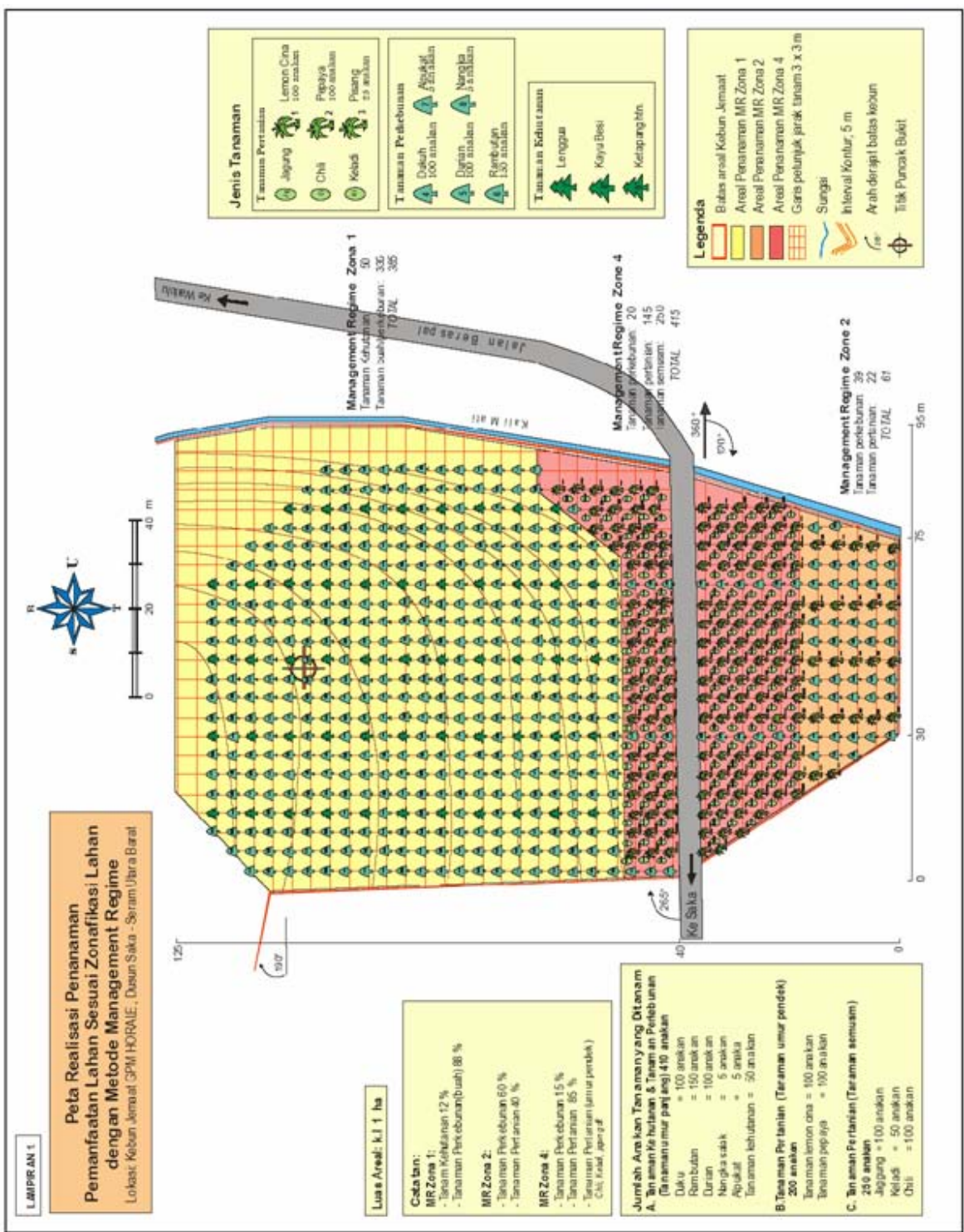
Tabel 1. Komposisi jenis dan jumlah tanaman pada areal penanaman; kebun jemaat Negeri Horale

Tanaman Umur Panujung	Jumlah Anakan	Tanaman Pertanian	Jumlah Anakan
Jenis Tanaman Kehutanan		Jenis Tanaman Umur Pendek	
Kayu besi	30	Lemon cina	100
Pulaka	10	Pepaya bangkok	100
Ketapang hutan	10		
Jenis Tanaman Perkebunan (buah-buahan)		Jenis Tanaman Semusim	
Duku	100	Jagung	100
Rambutan	150	Keladi	100
Durian	100	Chili	100
Nangka salak	5	Singkong	50
Alpukat	5		
Total Tanaman Umur Panjang	410	Total Tanaman Pertanian	550

Kegiatan pendukung setelah penanaman

- Dibuat semaian tanaman umur pendek jenis pepaya bangkok dan chili besar
- Jumlah bibit yang disemai: 150 polibag pepaya bangkok dan 100 polibag chili besar
- Bibit semaian 2 tanaman ini akan dipakai untuk memperkaya jenis tanaman

**Gambar 1.**  
Desain penanaman



## 7. Pemeliharaan tanaman

Kunjungan kerja kegiatan pemeliharaan tanaman, kerja pemeliharaan ini meliputi :

- Pembersihan lahan penanaman dari rumput dan ilalang,
- Pendataan tingkat keberhasilan pertumbuhan anakan pohon tiap jenis.

Hasil Kerja Pemeliharaan :

- Pertumbuhan anakan pohon yang telah berumur 2 bulan cukup baik,
- Tingkat pertumbuhan tanaman umur panjang; tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, dan tanaman pertanian umur pendek mencapai 89 %,
- Tingkat pertumbuhan tanaman pertanian dari jenis tanaman semusim mencapai 95 %.

Tabel 2. Tingkat Pertumbuhan Anakan Pohon di Kebun Jemaat Negeri Horale

Tanaman Umur Panjang	Tingkat Pertumbuhan	Tanaman Pertanian	Tingkat Pertumbuhan
Jenis Tanaman Kehutanan		Jenis Tanaman Umur Pendek	
Kayu besi	90 %	Lemon cina	98 %
Pulaka	80 %	Pepaya bangkok	80 %
Ketapang hutan	100 %		
Jenis Tanaman Perkebunan (buah-buahan)		Jenis Tanaman Semusim	
Duku	91 %	Jaggung	90 %
Rambutan	90 %	Keladi	100 %
Durian	56 %	Chili	90 %
Nangka salak	100 %	Singkong	100 %
Alpukat	100 %		

## 8. Identifikasi Potensi Ekowisata dan Hasil Hutan Non Kayu

Kerja persiapan ; bagian penting dalam kerja persiapan adalah menyelesaikan peta petuanan Horale. Peta ini penting untuk diskusi tentang potensi sumber daya alam dalam petuanan Horale dan sebaran potensi-potensi tersebut.

- Kerja lapangan identifikasi potensi ekowisata dan hasil hutan non kayu dilakukan dengan metode Focus Group Discussion menggunakan peta petuanan yang telah disiapkan,
- kunjungan ke lokasi potensi ekowisata yang bisa dijangkau dan menarik
- Hasil kerja identifikasi potensi ini berupa Peta Sebaran Potensi Ekowisata dan Hasil Hutan Non Kayu dalam Petuanan Negeri Horale.





## 5. REKOMENDASI

### ➤ Kepada Pemerintah Daerah, cq Instansi Terkait

- Kebijakan pemanfaatan lahan hutan harus dilakukan dengan bijaksana dengan memperhatikan zona kesesuaian lahan, mengacu pada peta arahan kesesuaian lahan seperti Atlas Zona Agroekologi Indonesia (PPTA-Dept.Pertanian, 2003)
- Kebijakan investasi pada lahan hutan di sekitar desa Horale dan Seram Utara harus memperhatikan keragaman jenis tanaman yang disesuaikan dengan karakteristik lahan, tidak semata mengejar investasi

### ➤ Kepada NFP/FAO

- Ada tindak lanjut kegiatan dalam bentuk penerapan Management Regime pada lahan yang lebih luas dan lebih kritis, karena kegiatan yang sudah selesai baru sebatas pemahaman kriteria Management Regime dan demonstrasi plot. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa merasakan manfaat lebih maksimal, dan pemerintah serta lembaga-lembaga lain bisa melihat manfaat penerapann kriteria Management Regime

### ➤ Kepada Masyarakat

- Pemanfaatan lahan harus memperhatikan kesesuaian lahan dan aspek ekologis di sekitarnya terutama yang berkaitan dengan fungsi tata air dan keberadaan iklim mikro yang penting untuk mempertahankan kelembaban tanah dan kesuburan tanah, ini berarti tidak membuka lahan secara tebang habis dan tidak menanam tanaman hanya untuk kebutuhan makan saja tetapi harus multi manfaat; untuk makanan, untuk komoditi yang dipasarkan baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan untuk mempertahankan aspek ekologis lahan dan lingkungan sekitarnya.
- Pemilihan jenis tanaman harus sesuai dengan karakteristik lahan sehingga lahan bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu lama, dengan demikian keberlanjutan hasil bisa dipertahankan, dan pemenuhan kebutuhan pangan untuk keluarga bisa terjaga, serta penghasilan dari tanaman yang diusahakan bisa diperoleh dalam jangka waktu yang panjang.

# 7

## DISKUSI MAKALAH STAKEHOLDER

Daftar Pertanyaan Workshop Ambon, 8 November 2008

### A. YAYASAN HUALOPU

1. BAPPEDA Promal - Kondisi masyarakat sebelum dan sesudah program dijalankan
2. A. Tanahitumesing (Dinas Kehutanan, Pertanian, Peternakan Kota Ambon)
  - Data Penduduk dalam hal ini pekerja pertanian perlu disampaikan
  - Aturan yang disampaikan oleh Pemda Maluku Tengah
  - Tugas kewang apa saja
  - Batas pemukiman dengan kawasan lindung apakah terjamin oleh aturan
  - Pertumbuhan penduduk per tahun bagaimana
  - Laju urbanisasi bagaimana
3. Ir. R Oersoek (Yayasan Inlulins)
  - Pola pemanfaatan hutan dan masalahnya apa saja
  - Penamaan local untuk jenis tanah dan cirri-cirinya kalau dapat didokumentasikan
4. Yan Persulesy (Yayasan Tomalestari)
  - Peta-peta yang dihasilkan apa cocok dengan peta yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan khususnya untuk peta pemanfaatan hasil hutan, diharapkan program ini memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam hal untuk perbaikan peta kawasan hutan.
  - Fungsi kewang (peran kewang dalam hutan lindung)

### JAWABAN

- Dapat dilihat trend/kecenderungan pemanfaatan hutan, dapat diinformasikan sebenarnya kecenderungan masyarakat lebih tinggi untuk memanfaatkan hasil laut dibandingkan memanfaatkan hasil darat, masyarakat kurang menebang pohon.
- Ada beberapa hal dimana kita tidak melihat secara keseluruhan, data penduduk hanya merupakan data pendukung, urbanisasi hanya data pendukung (ada kecenderungan masyarakat ke kota untuk sekolah dan bekerja).
- Pola pemanfaatan lahan, bagaimana mereka memanfaatkan lahan secara tradisional, untuk nama-nama tanah tidak ditemui informasi secara jelas.
- Jaringan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah negeri. Beberapa solusi yang diperoleh terutama dalam hal batas-batas tanah (akong dan abubu) ± 30 - 40 m untuk dikelola bersama oleh kedua negeri.
- Kami berharap peta ini dapat digunakan oleh instansi terkait untuk peta pentuan kawasan hutan dan perairan.
- Terkait dengan hutan lindung dijaga untuk tata air.
- Kawasan hutan sagu memiliki aturan antaralain bagaimana sagu harus diambil dan cara pengambilan.

## B. YAYASAN INLULINS

### 1. Fakultas Pertanian

- Hasil survey terhadap sumber air, karena sumber air bukan hanya yang bapak sebutkan tetapi yang saya tahu masih ada sumber-sumber air yang lain.
- Bagaimana peranan masyarakat adat terhadap kawasan hutan dikaitkan dengan peraturan adat untuk menjaga sumber air.
- Bagaimana pendekatan yayasan dengan dinas setempat mengangkut tanaman obat-obatan yang ada di Kei.

#### JAWABAN

- Air di Langgur dan sekitarnya salobar maka untuk sementara kita harus melihat yang mana yang utama yang harus diselamatkan.
- Peserta dan penyajian dalam workshop menggunakan bahasa Kei.
- Hal yang paling sulit adalah menyamakan persepsi masyarakat yang masih tradisional dengan konsep hutan yang berkelanjutan (menyambung pengetahuan lokal dengan pengetahuan moderen). Jadi persoalan yang ditemui dilapangan berhubungan dengan publik.

### 2. Dishutanak Kota Ambon

- Saran saya, apa yang bapak sampaikan diharapkan dibuat suatu rekomendasi untuk kepentingan masyarakat.

#### JAWABAN

- Sudah dibuat tetapi yang dibutuhkan adalah action di lapangan, jadi Air diurus oleh PDAM (Pemerintah) dan hutan dijaga oleh masyarakat.

### 3. Baileo Maluku

- Persoalan di Eum memang sudah sejak lama, harus ada sharing saham antara masyarakat dengan PDAM.
- Bagaimana fungsi-fungsi adat untuk memotori perkembangan dengan model-model desa mandiri dalam hal ekonomi.

#### JAWABAN

Kami sementara melacak-lacak potensi adat istiadat, serta bagaimana menginspirasi masyarakat.

## C. KELOMPOK STUDI DESA UWEN (TANIWEL)

### 1. Ir.R. Oersoek (Yayasan Inlulins)

- Bebrapa hal belum jelas terkait dengan kepemilikan masyarakat
- Lunturnya hak-hak adat masyarakat dan bagaimana hubungannya dengan HPH

#### JAWABAN

- Dalam pengelolaan sumber daya hutan telah diatur dalam UU No 41 Thn 1999, hutan adat merupakan bagian dari hutan Negara. Harus diberlakukan hukum adat dalam kaitannya dengan pengelolaan hasil hutan. Keberadaan masyarakat hulun adat harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Dulu HPH sekarang IUPHK semua izin harus melalui prosedur-prosedur yang ada, dengan izin yang ada diber kewenangan untuk mengelola hutan adat.

2. Bapeda Propinsi Maluku
  - Kenapa terjadi illegal logging, pendekatan-pendekatan yang dilakukan
  - Selama dilapangan dari yayasan ini mendapatkan potensi hutan apa saja di Taniwel

**JAWABAN**

- Pendekatan yang dilakukan setelah workshop antarlain pemetaan.
- Di Taniwel selain hasil hutan non kayu juga ada hasil hutan kayu yang dimanfaatkan untuk dijual.

3. Andri Tan (Dinas Kehutanan Propinsi Maluku)
  - Apakah SBB sudah memiliki peraturan daerah tentang negeri.
  - Berdasarkan PP No 26 untuk membuat suatu negeri adat harus ada inventarisasi hutan adat. Jadi bila masyarakat adat ingin mengelola hutan adat harus melalui prosedur-prosedur.

**JAWABAN**

- Kami tidak perlu mengundang pemerintah karena program ini didanai oleh FAO-NFP
- Atas kerjasama Bapeda SBB dengan Faperta Unpatti telah dilakukan penelitian, tetapi sampai kini belum ada peraturan daerah tentang negeri adat, padahal mereka/masyarakat sangat membutuhkan peraturan daerah untuk menjadi landasan bagi masyarakat untuk menetapkan peraturan-peraturan di desa/negeri adat.

## **D. KEWANG NEGERI HARUKU**

1. Dishutanak Kota Ambon
  - Apakah kewang diberi insentif.
  - Saya mengusulkan agar dibangun menara pengawas di haruku.
  - Kenapa Bpk Elly tidak diberi gelar khusus oleh pemerintah daerah.

**JAWABAN**

Harta diri dan keluarga saya serahkan demi kepentingan bersama di negeri Adat Haruku.

2. Jan Persulessy
  - Saran saya Pak elly baiknya mempunyai kerjasama dengan kewang-kewang yang kawasan hutannya di diami oleh Maleo untuk melakukan perkawinan.

## **E. YAYASAN TOMALESTARI**

1. Ir.S.Limba (Fakultas Pertanian Unpatti)
  - Mengapa pemilihan jenis tanaman hanya sedikit jumlahnya
  - Percepatan pertumbuhan bagaimana
  - Redaksi kalimat ada istilah yang bunyinya sama tetapi memiliki arti yang berbeda (SARAN)
2. Dinas Kehutanan Kota Ambon
  - Pemanfaatan lahan apakah sudah diidentifikasi , apakah kita harus babat semua tanaman yang ada
  - Identifikasi ekowisata mengapa tidak langsung dijustifikasi yang dapat dimanfaatkan

3. Realisasi pembinaan, Penggunaan lahan harus diperhatikan agar tidak bermasalah (batas-batas lahan)

**JAWABAN**

- Jenis tanaman sedikit bukan sesuatu yang ditunjukkan tetapi dipilih oleh masyarakat
- Berdasarkan argument dari masyarakat bahwa lebih baik tanaman yang berbuah karena pada zona I tanamankehutanan sudah banyak.
- Lahan yang digunakan bukan ditebang habis tetapi merupakan lahan kritis karena kebakaran.
- Realisasi pembinaan yaitu dengan memberikan masukan agar masyarakat memanfaatkan potensi yang ada dengan pola pendekatan zonafikasi. Lahan yang digunakan adalah hutan produksi konversi.



## DISKUSI MANFAAT & KEBERLANJUTAN KEGIATAN NFP-FAO

### DISKUSI KELOMPOK I : MANFAAT KEGIATAN NFP-FAO

#### A. YAYASAN INLULINS :

- Manfaat dari NFP-FAO Facility bagi pembangunan kehutanan berkelanjutan di Maluku dan Maluku Utara, sangat dirasakan dan membantu sekali dalam merubah paradig/kultur masyarakat untuk produktif menuju kemandirian lokal.
- Bahwa pembangunan kehutanan yang berkelanjutan tersebut, adalah berbais pada mayarakat lokal/adat pada kawasan hutan yang jadi sasaran studi. Dalam hal ini, perubahan yang dialami oleh masyarakat masih pada taraf awal dan perlu diberdayakan/ditopang menuju kemandirian yang diharapkan.
- Pemberdayaan yang kami lakukan juga ditempatkan dalam tata kelola yang baik (good govermence) di era otonomi daerah sekarang, sehingga perlu ditindaklanjuti pada NFP Facility tahap II (2009), agar terjadi pembaharuan menyeluruh.
- Jika tidak demikian, maka akan bernasib seperti proyekkehutanan yang lain.
- Dari hasil-hasil presentasi dapat dikatakan tahap awal ini merupakan proses :
  1. Identifikasi dan pengenalan masalah-masalah dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan.
  2. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap fungsi hutan; Hutan masih merupakan sumber pendapatan masyarakat. Walaupun pemanfaatan hasil hutan ini masih menyebabkan kerusakan lahan dan keanekaragaman hutan.
  3. Lembaga-lembaga/Organisasi adat tentang pengelolaan hutan mulai luntur.
  4. Intervensi aturan/Undang-Undang pemerintah masih kuat dalam pemanfaatan hutan.
  5. Hukum adat atau hak-hak masyarakat adat perlu diakomodasi dalam peraturan daerah atau hokum adat diberi wewenang yang lebih besar untuk mengatur kawasan hutan di wilayahnya. Pemberdayaan masyarakat/lembaga-lembaga adat menjadi prioritas dan juga melibatkan masyarakat/lembaga adat dalammerencanakan pemanfaatan hutan.

## B. YAYASAN TITAMAE

Manfaat program NFP-FAO yang sudah dilakukan bagi program pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara. Model rehabilitasi lahan kritis dengan pola Agroforestry di Dusun Sokawati oleh TITAMAE.

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang rehabilitasi lahan dengan pola agroforestry.
- Pembangunan hutan dapat berhasil apabila ada kaitannya dengan bidang pertanian dan peternakan dalam suatu pola pemanfaatan lahan secara terpadu (Agroforestry).

## C. YAYASAN HUALOPU

- Manfaat program NFP-FAO turut mendukung kebijakan kehutanan terkait dengan peruntukan kawasan lindung dan kawasan konservasi.
- Institusi-institusi lokal (kelembagaan kewang dan sistem sasi) dapat berperan kembali dalam pengelolaan sumber daya alam.
- Terbangunnya kesepakatan-kesepakatan di tingkat masyarakat adat terkait dengan isu-isu pengelolaan hutan pulau kecil.
- Dengan bantuan ini ada model pengelolaan hutan yang langsung dapat dikembangkan di basis komunitas.

## D. YAYASAN NUSA MARINA - HARUKU (VICTOR SAIYA)

- Manfaat program ada transformasi nilai pengetahuan dan pengalaman di tingkat komunitas untuk mengelola sumber daya alam secara lestari.
- Tumbuhnya inisiatif masyarakat untuk memasukkan isu lingkungan (Hutan dan Tata Air dan Endemik Spesies) dalam muatan pendidikan baik untuk pendidikan formal, maupun informal (katekisasi, SMTPI) yang lebih signifikan.
- Pola pengorganisasian program lebih berhasil karena sesuai konteks bukan meniru dari luar.

## E. YAYASAN TOMALESTARI

Manfaat :

- Manfaat bagi pembangunan kehutanan di Maluku, membantu program rehabilitasi hutan, yang diusahakan oleh pemerintah di lokasi kerja NFP.
- Memberi/membagi pengetahuan dan pengalaman pengelolaan hutan untuk membangun metode-metode yang tepat sesuai karakter/kondisi lokasi/lahan/kawasan hutan di suatu lokasi atau suatu pulau.
- Membantu masyarakat merubah pola pikir dan pola tindak teknik pemanfaatan lahan/hutan menjadi lebih baik.

Program Ke Depan :

- Mendorong percepatan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis terutama dilokasi-lokasi perlindungan tata air.
- Mempercepat perbaikan tingkat kehidupan masyarakat sektor hutan yang rawan longsor dan ancaman degradasi hutannya tinggi.

## F. KELOMPOK STUDI DESA UWEN

- Masyarakat dapat memahami hak-hak mereka sebagai masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan.
- Masyarakat lebih memahami ketergantungan mereka terhadap sumber daya hutan sehingga mereka lebih berperan dalam mencegah kerusakan hutan.
- Masyarakat dapat memahami pentingnya batas-batas kawasan hutan yang definitive dalam aspek kelestarian sumber daya hutan.

## DISKUSI KELOMPOK II. KEBERLANJUTAN KEGIATAN NFP-FAO

### JARINGAN BAILEO MALUKU

- Tingkat desa : Model-model pengembangan dihubungkan dengan kearifan lokal. Peraturan desa. Tata ruang tingkat desa
- Tingkat kebijakan : Perda di tingkat kabupaten
- Bukan workshop saja tetapi harus ada tindak lanjut atau proses selanjutnya.
- Analisis - analisis perlu dilakukan oleh universitas.

### DINAS KEHUTANAN PROMAL

- Perlu memperhatikan pasar untuk hasil hutan.
- Memperhatikan status kepemilikan hutan/taat azas,
- Research tentang hutan adat perlu didorong.

### BAPPEDA PROMAL

- Panitia meluangkan waktu berdiskusi dengan dinas instansi terkait
- Memperhatikan desa tetangga dalam kegiatan NFP-FAO

### AKADEMISI

- Harus menghasilkan outcome bukan saja output. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Pemerintah ikut mengentaskan kemiskinan dengan memperhatikan pasar hasil hutan.
- Memotivasi masyarakat terhadap kesadaran akan fungsi hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi dengan memperhatikan azas kelestarian.

### BKSDA MALUKU

- Memperhatikan model-model pengembangan dari instansi pemerintah. Harus melibatkan instansi pemerintah agar menjadi sinergis.

### BPTH MALUKU DAN PAPUA

- Banyak hal baru yang ditemui yang dapat dikembangkan di tahun depan.



- ➔ Isu-isu kunci dibuat dalam suatu program nyata. Sosial forestry dan Agroforestry.
- ➔ Harus dibentuk dalam suatu lembaga yang menjadi contoh.

#### **DINAS HUTBUN SBB**

- ➔ Perlu pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan hasil hutan non kayu

#### **BALAI TAMAN NASIONAL MANUSELA**

- ➔ Kegiatan NFP-FAO harus sinergis dengan kegiatan pemerintah.

# 9

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### Lampiran 1.

#### DAFTAR PESERTA

- |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| 01. | BC. Tity. M. Oratmangun<br>BAPPEKOT KOTA AMBON    | 02. | Sugeng Handoyo, S.Hut<br>BALAI TN. MANUSELA         |
| 03. | Sartje M. Untajana, S.Hut<br>DISHUTBUN SBB        | 04. | Ir. Thomas M. Silaya, MP<br>KELOMPOK STUDI UWEN     |
| 05. | Prof. Ir. B. Kewilaa, MS<br>YAYASAN TITAMAE       | 06. | Andre Tan, S.Hut<br>DINAS KEHUTANAN PROMAL          |
| 07. | Ir. Th. E. O. Huwae, MT<br>FAKULTAS PERTANIAN     | 08. | Dr. Ir. Simon Raharjo<br>YAYASAN TITAMAE            |
| 09. | M. Tjoa, S.Hut, MP<br>YAYASAN TOMALESTARI         | 10. | Ir. Sadli IE<br>DINAS KEHUTANAN PROMAL              |
| 11. | M. Loiwatu, S.Hut, MP<br>YAYASAN TITAMAE          | 12. | Ir. Jimmy Titarsole, MP<br>FAKULTAS PERTANIAN       |
| 13. | Ir. L. Pelupessy, MS<br>FAKULTAS PERTANIAN        | 14. | Ir. Jacob H. Pietersz<br>FAKULTAS PERTANIAN         |
| 15. | Ir. A. A. Tuhumury, MS<br>FAKULTAS PERTANIAN      | 16. | R.J. Waifly, S.Sos<br>BAPEDALDA PROMAL              |
| 17. | Yan Persulesy, S.Hut<br>YAYASAN TOMALESTARI       | 18. | Dr. Ir. E. Manuhuwa, MSc<br>FAKULTAS PERTANIAN      |
| 19. | Ir. Conradus Ufie, Msc<br>YAYASAN INLULINS        | 20. | August Johannes Ricolat Ufie<br>YAYASAN INLULINS    |
| 21. | Edward ST. Dumadumun, SP<br>DISHUTANAK KOTA AMBON | 22. | Alfred Tanahitumessing, SP<br>DISHUTANAK KOTA AMBON |
| 23. | Eka Nurmala Sari, S.Hut<br>BKSDA MALUKU           | 24. | Lentjie S. Y. Leleulya, S.Hut<br>BPTH MALUKU PAPUA  |
| 25. | Fatimah Tuakia, S.Hut<br>BPDAS WAEHAPU BATU MERAH | 26. | Fransisca Y.R. Luturmas, S.Hut<br>BPTH MALUKU PAPUA |

- |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| 27. | Zulham, S.Hut<br>BKSDA MALUKU                     | 28. | Deddy Syofan<br>BPDAS WAEHAPU BATU MERAH            |
| 29. | Adnan Hakim<br>BPDAS WAEHAPU BATU MERAH           | 30. | Jacobus Birahy, SPi<br>YAYASAN HUALOPU              |
| 31. | George Corputty, SP<br>JARINGAN BAILEO MALUKU     | 32. | John Lewerissa<br>YAYASAN HUALOPU                   |
| 33. | Andjela Sahupala, S.Hut, MP<br>FAKULTAS PERTANIAN | 34. | Ir. Lieke Tan, MS<br>FAKULTAS PERTANIAN             |
| 35. | Chr Flavi Ruban, SPi<br>YAYASAN HUALOPU           | 36. | Pieter Toumahuw, SPi<br>YAYASAN HUALOPU             |
| 37. | Eliza Kissya<br>KEWANG HARUKU                     | 38. | Ir. Gazali Daties<br>BAPPEDA Maluku                 |
| 39. | Chr. Waliulu<br>AMBON EKSPRES                     | 40. | Ruben Tiranda, S.Hut<br>BPTH MALUKU PAPUA           |
| 41. | Ny. N. Sopacua<br>BAPPEDA MALUKU                  | 42. | V.I. Saiya<br>KEWANG HARUKU                         |
| 43. | Ir. E.L. Madubun, MS<br>FAKULTAS PERTANIAN        | 44. | Andre Kiriweno<br>BAPEKOT KOTA AMBON                |
| 45. | Ir. C. K. Pattinasarany, MP<br>FAKULTAS PERTANIAN | 46. | Troice E. Siahaya, S.Hut, MP.<br>FAKULTAS PERTANIAN |
| 47. | Moda Talaohu, S.Hut<br>FAKULTAS PERTANIAN         |     |   |

## Lampiran 2.

**JADWAL WORKSHOP IMPLEMENTASI HASIL KEGIATAN NFP FACILITY FAO  
REGIONAL MALUKU DAN MALUKU UTARA  
Manise Hotel, 8 November 2008**

No.	Waktu	Kegiatan	Moderator	Penangg. Jawab
1.	08.30 - 09.00	Register Peserta		Panitia
2.	09.00 - 09.30	Acara Pembukaan Workshop : - Laporan Panitia - Sambutan Dekan Fakultas Pertanian sekaligus membuka		Panitia
3.	09.30 - 10.00	Istirahat (Snack)		Panitia
4.	10.00 - 12.30 Presentase I :	1. Yayasan Hualopu : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Manajemen Hutan Berkelanjutan di Pulau Nusalaut 2. Yayasan Inlulins : Seminar dan Lokakarya tentang Pengetahuan Tradisional Masyarakat dalam Manajemen Hutan Berkelanjutan untuk Penyediaan Air Bersih di Pulau Kecil 3. Kelompok Studi Desa Uwen : Penguatan Hak Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kecamatan Taniwel	Ir. R. Loppies, MScF	
5.	12.30 - 13.30	Istirahat (Makan Siang)		Panitia
6.	13.30 - 16.00 Presentase II :	1. Yayasan Kewang Haruku : Penguatan Kapasitas dan Pendidikan Lingkungan di desa Haruku. 2. Yayasan Titamae : Model Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Pola Agroforestry secara Partisipatif di Dusun Sukawati. 3. Yayasan Tomalestari : Perbaikan Sistem Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Pendekatan Zonafikasi Lahan di Horale.	Ir. J. Ch. Hitipeuw, MScF	
7.	16.00 - 16.30	Diskusi Manfaat dan Keberlanjutan Kegiatan NFP - FAO: 1. Kelompok I : Manfaat NFP-FAO bagi pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara. 2. Kelompok II : Arah program NFP-FAO di Maluku dan Maluku utara untuk periode berikut.	Ir. D. Liliefna, MSc Dr. Ir. J. M. Matinahoru	
8.	16.30 - 17.00	Pleno Hasil Diskusi		Panitia
9.	17.00 - 17.30	Penutupan		Panitia

### Lampiran 3.

## DOKUMENTASI KEGIATAN



Laporan Ketua Panitia



Pembukaan Acara



Pemaparan makalah Yayasan Hualopu



Pemaparan makalah Yayasan Inlulins



Tanggapan dari peserta Workshop



Peserta dari berbagai instansi



Peserta menyimak dengan seksama



Panitia mengkoordinasikan kegiatan



Diskusi manfaat kegiatan NFP-FAO



Saran dan masukan dari peserta



Diskusi keberlanjutan kegiatan NFP-FAO



Diskusi peserta Workshop



Istirahat dan snack



Panita Workshop

## PROSIDING

"WORKSHOP HASIL KEGIATAN NFP FACILITY FAO REGIONAL MALUKU DAN MALUKU UTARA"

## **PROSIDING**

"WORKSHOP HASIL KEGIATAN NFP FACILITY FAO REGIONAL MALUKU DAN MALUKU UTARA"

# REPROSIDING



ISBN 978-602-8403-00-9



9 786028 403009